



H. Ahmad Rosyid, M.Si., dkk.

EKONOMI DAN KEARIFAN LOKAL “PETANGLONG”

Editor:
Dr. AM. M. Hafidz MS.



**EKONOMI DAN KEARIFAN LOKAL
“PETANGLONG”**

**KUTIPAN PASAL 72:
Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik
Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

H. Ahmad Rosyid, M.Si., dkk.

EKONOMI DAN KEARIFAN LOKAL “PETANGLONG”



Pekalongan - Indonesia

EKONOMI DAN KEARIFAN LOKAL “PETANGLONG”

Copyright © 2021

Penulis:

H. Ahmad Rosyid, M.Si.
Iwan Zaenul Fuad, M.H.
Muhammad Nasrullah, M.S.I.
Irfandi, M.H.I.
Hj. Alvita Tyas Dwi Aryani, M.Si.
Muhammad Nasrullah
Kuat Ismanto
Muh. Izza, M.S.I.
Hella Ariska
Nailal Husna
Muhamad Masrur, M.E.I.
Dr. Agus Fakhрина
Nur Fani Arisnawati, M.M.
Herna Mordianty
Achmad Tubagus Surur, M.Ag.
Muhammad Hufron, M.S.I.
Drajat Setiawan

Editor:

Dr. AM. M. Hafidz MS.

Setting Lay-out & Cover:

Tim Redaksi

Diterbitkan oleh:

PT. Nasya Expanding Management

(Penerbit NEM - Anggota IKAPI)

Jl. Raya Wangandowo, Bojong

Pekalongan, Jawa Tengah 51156

Telp. (0285) 435833, Mobile: 0853-2521-7257

www.penerbitnem.com / penerbitnem@gmail.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan ke-1, Desember 2021

ISBN: 978-623-423-018-5

Kata Pengantar

Buku yang berada di tangan pembaca ini adalah kumpulan tulisan dari serangkaian riset dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh para akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Pekalongan. Riset dan pengabdian tersebut tentu menemukan sesuatu yang bernilai sehingga layak untuk disajikan kepada masyarakat luas, sehingga riset dan pengabdian yang selama ini dilakukan oleh para akademisi kampus mempunyai dampak nyata dalam kehidupan masyarakat umum.

Buku ini terdiri dari tiga tema atau tiga kluster. Pada kluster Ekonomi Pedesaan dapat dikaji bagaimana peranan dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan penggunaan Dana Desa dalam menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Dana Desa merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Harapannya, dengan adanya pemanfaatan dana desa, masyarakat desa sebagai subjek pembangunan menjadi lebih mandiri dan mampu membuka tingkat kesempatan kerja yang lebih tinggi.

Sedangkan di kluster Bisnis Berwawasan Lingkungan, dapat disimak bagaimana menjalankan praktik bisnis dan perekonomian dengan tetap mengacu pada lingkungan dan etika bisnis sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga

keberlangsungan (*sustainability*) suatu bisnis. Belajar dari para wirausahawan di Pekalongan yang harus sering berhadapan dengan banjir dan rob, beberapa tulisan pada kluster ini akan menyajikan apa saja etika bisnis yang perlu dijadikan sebagai referensi untuk berbisnis dengan tetap menjaga lingkungan dan belajar dari pengalaman para wirausahawan di Pekalongan untuk tetap bertahan di tengah ancaman banjir dan rob.

Adapun pada kluster Kearifan Ekonomi Lokal terdapat tiga praktik kegiatan di masyarakat yang berdampak pada sektor ekonomi, yaitu *nyadran*, pengelolaan bank sampah, dan ekonomi kreatif di pedesaan. Kemampuan masyarakat dalam mengenal potensi lokal untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka terefleksi dari kegiatan *nyadran* yang awalnya merupakan sebagai sebuah aktivitas sosial-keagamaan ternyata mempunyai dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di daerah Pekalongan. Demikian pula dengan keberadaan bank sampah sebagai salah satu bentuk dari ekonomi kreatif merupakan wujud dari “kecerdasan” lokal yang perlu disimak melalui buku ini.

Buku ini sebagai ikhtiar dari para akademisi untuk lebih dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi nyata bagi kehidupan di masyarakat. Sebagai sebuah rintisan awal untuk menyemai (diseminasi) hasil riset dan pengabdian, tentu masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Semoga bermanfaat.

Pekalongan, 20 Oktober 2021
Editor

Dr. AM. M. Hafidz MS.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR __ v

DAFTAR ISI __ vii

BAGIAN 1 EKONOMI PEDESAAN

- 1 **Menumbuhkan Kemandirian Desa melalui BUMDes di Desa Gringgingsari Kabupaten Batang** 3-17
H. Ahmad Rosyid, M.Si., Iwan Zaenul Fuad, M.H., Muhammad Nasrullah, M.S.I., Irfandi, M.H.I., & Hj. Alvita Tyas Dwi Aryani, M.Si.
- 2 **Dinamika Pengelolaan Dana Desa di Jawa Tengah** 18-38
Muhammad Nasrullah & Kuart Ismanto

BAGIAN 2 BISNIS BERWAWASAN LINGKUNGAN

- 1 **Mitigasi Banjir Rob dan Dampaknya Perspektif *Enterpreneur* Muslim di Pekalongan** 41-71
Muh. Izza, M.S.I., Hella Ariska, & Nailal Husna
- 2 **Kiat Sukses Berbisnis Batik Pekalongan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam** 72-104
Muhamad Masrur, M.E.I.

BAGIAN 3 KEARIFAN EKONOMI LOKAL

- 1 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pengembangan Produk Berbahan Limbah Konveksi Jeans di Desa Jajarwayang Kec. Bojong Kab. Pekalongan** 107-118
Dr. Agus Fakhrina, Nur Fani Arisnawati, M.M., & Herna Mordianty
- 2 Ritual Nyadran Dukuh Jambean Pesisir Pekalongan (Telaah Antropologi dan Ekonomi Bisnis Islam)** 119-146
Achmad Tubagus Surur, M.Ag. & Muhammad Hufron, M.S.I.
- 3 Pemberdayaan Komunitas Lokal dalam Pengelolaan Bank Sampah di Desa Semampir, Batang** 147-165
Drajat Setiawan

Bagian 1
EKONOMI PEDESAAN

Menumbuhkan Kemandirian Desa melalui BUMDes di Desa Gringgingsari Kabupaten Batang

H. Ahmad Rosyid, M.Si.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan
ahmad.rosyid@iainpekalongan.ac.id

Iwan Zaenul Fuad, M.H.

Muhammad Nasrullah, M.S.I.

Irfandi, M.H.I.

Hj. Alvita Tyas Dwi Aryani, M.Si.

Dosen IAIN Pekalongan

A. Pendahuluan

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Untuk mencapai tujuan ini pada tahun 2020 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp72 triliun kepada 74.950 desa di Indonesia. Jumlah ini meningkat dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp69,8 triliun (JDIH, n.d.).

Gelontoran dana yang besar ini, mungkin menjadi berkah bagi desa dalam menjalankan roda pembangunan di wilayahnya. Namun di sisi lain, keberadaan dana ini menjadi sumber konflik baru di tengah masyarakat desa, utamanya antara masyarakat dengan aparatur pemerintahan desa (Hakim & Mahyuni, 2021; Munandar, 2019; Wulandari

et al., 2017). Masyarakat pada umumnya terlanjur bersikap skeptis terhadap mereka dengan menaruh rasa curiga akan adanya penyelewengan penggunaan dana alokasi dari Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut.

Di tengah tuduhan “tidak amanah”, pemerintah desa juga diliputi kecemasan tentang akuntabilitas pelaporan pengelolaan keuangan yang mereka gunakan (Hanafie et al., 2019; Jamaluddin, 2017). Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Problem pengelolaan dana desa ini juga dirasakan oleh Desa Gringgingsari Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang seiring dengan besarnya dana yang diterima. Untuk tahun anggaran 2017, Desa Gringgingsari memperoleh gelontoran dana sebesar 1.278.039.800 yang terdiri dari: a) Dana Desa sebesar Rp791.413.000; b) Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp315.944.800; c) Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp35.000.000; d) Bagi Hasil Pajak (BHP) daerah sebesar Rp20.682.000; e) Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp150.000.000 (gringgingsari.desa.id, n.d.).

Masalah pengelolaan dana desa ini diperparah dengan masih lemahnya sistem pengendalian internal di Desa Gringgingsari. Selama ini pengelolaan keuangan desa dikendalikan oleh (hanya) satu orang, yakni Kasie Perencanaan Desa. Padahal dalam sistem pengendalian internal mensyaratkan adanya pembagian tugas dan kewenangan, sehingga tercipta *check and balance* dalam pengelolaan keuangan desa (Irfandi, personal communication, February 4, 2017).

Kondisi ini merupakan problematika klasik yang dihadapi oleh desa di mana masih ditemukan lemahnya kompetensi sumber daya manusia aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam pemahaman prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Dampaknya proses penyusunan perencanaan hingga pelaporan keuangan desa menjadi tidak sesuai jadwal yang ditentukan oleh Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa *jo.* Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah sistematis agar problematika ini dapat segera teratasi. Upaya ini diperlukan agar dana desa yang diterima dapat digunakan sesuai tujuan yang ditetapkan pemerintah yaitu pengembangan potensi ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat (Kemenkopmk.go.id, n.d.). Pendirian Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Melalui BUMDes yang didirikan melalui inisiatif masyarakat dan pemerintah desa dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

B. Pembahasan

1. Profil Desa Gringgingsari

Desa Gringgingsari merupakan salah satu dari 15 desa di wilayah Kecamatan Wonotunggal. Desa dengan jumlah penduduk \pm 2.028 jiwa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh tani. Hal ini tidaklah mengherankan karena Desa Gringgingsari

merupakan Desa Agraris dan menjadi salah satu sentra penghasil beras di Kecamatan Wonotunggal.

Wilayah Desa Gringgingsari berbatasan dengan Desa Kedungmalang di sebelah utara dan Desa Sodong di sebelah selatan. Sedangkan Desa Sengare berada di sebelah barat serta Desa Pesalakan menjadi tetangga di sebelah timur. Posisi Gringgingsari dengan pusat pemerintahan kota maupun kecamatan yaitu: jarak dari kecamatan sejauh 7 km, jarak dari kabupaten sejauh 26 km serta jarak dari ibukota propinsi adalah 101 km. Posisi ini termasuk strategis karena tidak terlalu dekat dengan kebisingan kota dan tidak terlalu sunyi.

Gringgingsari dihuni oleh 2.028 jiwa di mana jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan dengan perempuan yaitu 1.042 berbanding 986 jiwa. Usia produktif 15 hingga 65 tahun mendominasi penghuninya yaitu sebesar 1.424 jiwa berbanding 112 jiwa berusia 65 tahun ke atas dan usia 0-15 sebanyak 492 jiwa.

Tingkat pendidikan penduduk Gringgingsari kurang mengembirakan karena didominasi lulusan SD sebesar 1.089 orang dan hanya 15 orang lulusan sarjana. Lulusan SMP sebanyak 227 orang, lulusan SMA/SMK sebesar 85 orang, lulusan D1-D3 sebanyak 9 orang dan hanya 1 orang yang lulusan magister.

Total luas wilayah Gringgingsari adalah 300,04 ha di mana tanah kering mendominasi dengan besaran 111,8 ha. Sedangkan sisanya digunakan untuk tanah sawah 62,34 ha, tanah perkebunan 64,63 ha, tanah hutan 45 ha dan tanah untuk fasilitas umum sebesar 16,27 ha.

2. Desa Gringgingsari dan Potensinya

Desa Gringgingsari terletak di daerah pegunungan. Termasuk wilayah kecamatan Wonotunggal kabupaten Batang. Dahulunya masuk wilayah kabupaten Pekalongan. Desa Gringgingsari dapat terkenal, karena ada Makam Auliya' yaitu makamnya Mbah Syarif Abdurrahman yang terkenal dengan nama Mbah Pangeran Kajoran. Makamnya terletak di pemakaman umum Desa Gringgingsari yang lokasinya ada di sebelah barat Masjid Al Karomah. Banyak para peziarah yang datang ke makam tersebut untuk berdoa meminta kepada Allah agar hajatnya terkabul.

Mbah Pangeran Kajoran meninggalkan beberapa benda bersejarah yang masih ada sampai sekarang seperti pancuran Depok, makam, masjid al-karomah, tasbih dan tongkat yang selalu dipegang khatib sewaktu khotbah jumat dan hari raya. Benda bersejarah ini menarik minat bagi para wisatawan luar daerah untuk berkunjung.

Selain benda bersejarah, Gringgingsari juga memiliki tradisi turun-temurun untuk menjaga air sungai agar tetap suci sebagai bagian dari kosmologi mereka. Bagi warga Gringgingsari, mengotori air yang mengalir di parit itu dianggap sebuah pelanggaran adat yang wajib di jauhi. Tradisi yang tetap lestari ini mampu merawat alam agar tetap asri dan terjaga dari kerusakan sehingga semakin menambah daya tarik bagi wisatawan dari sisi budaya masyarakat.

Tradisi budaya lain yang berkembang yaitu tradisi pengajian rutin ratiban setiap Rabu Wage malam Kamis Kliwon yang turut dihadiri masyarakat luar desa.

Bahkan jumlah wisatawan akan lebih banyak lagi ketika acara khoul syeh Abddurrahman Kajoran/Sunan Kajoran yang diselenggarakan setiap tanggal 9-11 Syawal yang diadakan di makam dan masjid al-Karomah Gringgingsari.

Sayangnya potensi ini masih belum digali lebih optimal lagi karena desa masih tampil apa adanya dan belum banyak dipoles sehingga masih hanya dikunjungi wisatawan domestik yang belum banyak memberikan kontribusi bagi pemerintah Batang maupun masyarakat Gringgingsari karena untuk masuk dan menjelajahi wilayah ini memang tidak dipungut biaya alias gratis. Padahal sebuah objek wisata mestinya mampu membawa dampak ekonomi/kesejahteraan bagi warga sekitar dan juga menambah kas daerah. Lebih-lebih Desa Gringgingsari telah lama digadang-gadang menjadi salah satu destinasi wisata di Kecamatan Wonotunggal selain Desa Sodong dan Silurah yang telah lebih dulu eksis.

Selain destinasi wisata religi, Desa Gringgingsari juga menyimpan potensi wisata alam dengan keberadaan Curug Kanoman, Curug Genting dan Mata Air Sendang Depok. Keberadaan objek alam ini dapat menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi desa. *Positioning* desa sebagai desa wisata alam dan religi dapat menjadi paket komplit yang dapat dinikmati oleh para wisatawan.

3. Menuju Desa Mandiri di Gringgingsari

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/

transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik (Badan Pusat Statistik, 2019). Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.

Syarat desa dikatakan mandiri terdiri dari: pertama, melakukan pendayagunaan sumber daya yang ada di desa; kedua, menjalankan penataan serta pembangunan aset dalam desa; ketiga, aktif dalam kelembagaan masyarakat maupun di lingkungan masyarakat; keempat, tersedianya dana atau anggaran desa guna mengelola berbagai kegiatan baik pemberdayaan maupun pembangunan; dan kelima, terdapat kerjasama antar desa dengan pihak lainnya serta pendampingan dalam desa. Guna mewujudkan kemandirian desa diperlukan strategi pembangunan desa (Kurniawan, 2015).

Strategi pembangunan desa merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi desa yang berisi program untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Strategi yang umum dilaksanakan dalam membangun kemandirian desa terdiri dari: pertama, membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa dengan kritis dan dinamis; kedua, memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa; ketiga, membangun sistem perencanaan dan penyelenggaraan desa yang responsif dan partisipatif; dan keempat, membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif (Kurniawan, 2015).

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu perwujudan kelembagaan ekonomi lokal dalam rangka menuju desa mandiri.

Gringgingsari telah memiliki BUMDes yang diketuai oleh Dasiun, sekretaris Sa'dullah dan bendahara Wahab Prayitno, S.Pd.SD. BUMDes ini didirikan setelah sebelumnya dibentuk organisasi Karangtaruna yang mewadahi tiga dukuh yaitu dukuh Gringgingsari, Ujungsari dan Ketawang Sari. Karangtaruna didirikan pada 27 Mei 2017 dan terpilih sebagai calon dari dukuh Ketawang Sari yaitu Abdul Wahab setelah melalui proses voting tertutup. Dengan berdirinya karangtaruna dan BUMDes ini diharapkan akan segera tersusun program-program pemberdayaan masyarakat yang kuat dalam rangka menuju desa Gringgingsari yang mandiri.

4. BUMDes dan Upaya Desa Mandiri

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Adapun tujuan pendirian BUMDes sesuai Pasal 3 Permendes PDTT adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan perekonomian desa; b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi

desa; d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; f. Membuka lapangan kerja; g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Konsepsi tradisi berdesa merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUMDes. Tradisi berdesa sejalan dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUMDes. Inti gagasan dari tradisi berdesa dalam pendirian BUMDes adalah: a) BUMDes membutuhkan modal sosial seperti kerja sama; b) BUMDes berkembang dalam politik inklusif; c) BUMDes merupakan usaha ekonomi yang bersifat kolektif; d) BUMDes merupakan badan usaha yang dimandatkan UU Desa; e) BUMDes merupakan arena pembelajaran bagi warga desa; dan f) BUMDes melakukan transformasi dari program pemerintah menjadi milik desa (Putra, 2015).

Memang BUMDes sebagai salah satu lembaga yang dimiliki oleh desa dapat berfungsi sebagai lembaga sosial dan sekaligus komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes mesti berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes mesti bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Wahyuni, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, maka BUMDes memiliki ciri khas yang membedakan dengan lembaga ekonomi pada umumnya, yaitu: a) badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama; b) modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil); c) operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal; d) bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar; e) keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa; f) difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa; serta g) pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintah Desa, BPD, dan anggota) (Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).

Pengelolaan BUMDes yang baik sangat bergantung kepada sumber daya manusia yang ada di desa. Namun Desa Gringgingsari masih terkendala dengan SDM yang mumpuni. Penduduk desa masih didominasi lulusan SD dan sangat minim sarjana. Namun mayoritas penduduk yang masih berusia produktif dapat dimaksimalkan potensinya. Pemuda melalui karang taruna dapat menjadi motor penggerak dalam optimalisasi peran BUMDes. Beberapa studi kasus seperti di Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene menunjukkan keberhasilan pemuda sebagai motor penggerak dalam tata kelola BUMDes di Indonesia (Zulfiani & Rivai, 2020).

Keberhasilan pengelolaan BUMDes selain dimotori oleh pemuda juga karena keterlibatan aparat pemerintah desa sebagaimana yang terjadi di Desa Muara Semerah Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci (Perdianto, 2020). Keterlibatan aparat pemerintah desa dan peran pemuda sangat efektif dalam menggerakkan BUMDes dan mendorong pemberdayaan masyarakat.

Pola ini pula yang digunakan di Desa Gringgingsari. Setelah terbentuk karangtaruna pada 27 Mei 2017 selanjutnya dirancang program kerja lima tahunan yang salah satu program utamanya adalah mendirikan BUMDes. Tidak berselang lama kemudian telah terbentuk kelembagaan BUMDes yang diketuai oleh Dasiun yang kemudian bersama-sama dengan aparat desa menyusun program desa wisata. Hingga pada Selasa, 8 Mei 2018 BUMDes, aparat desa, karangtaruna dan mahasiswa KKN IAIN Pekalongan mengadakan pembukaan Curug Kanoman sebagai salah satu destinasi wisata di Desa Gringgingsari (Radar Pekalongan, 2018; Tribun Pantura, 2018).

Keterlibatan pemerintahan desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi standar pelayanan minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga. Demikian pula, pemerintahan desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

C. Penutup

Desa Gringgingsari memiliki potensi untuk menjadi desa yang mandiri. Sumber daya alam yang mendukung seperti Curug Kanoman dan Genting serta mata air Depok dapat menjadi daya tarik wisata alam bagi para wisatawan untuk berkunjung. Selain daya tarik wisata alam, potensi lain yang dimiliki desa ini yaitu wisata religi dengan keberadaan makam mbah Pangeran Kajoran. Keberadaan makam ini selama ini telah mampu menarik wisatawan luar untuk berkunjung terutama saat berlangsungnya haul Mbah Pangeran Kajoran setiap tanggal 9-11 Syawal.

Menjadikan Desa Gringgingsari sebagai desa wisata religi dan alam akan melengkapi destinasi wisata di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. Sebelumnya wilayah ini telah memiliki destinasi wisata di Desa Sodong dan Silurah. Dengan banyaknya objek wisata yang dapat dikunjungi di daerah ini tentunya akan menjadi paket komplit yang dapat menarik minat para wisatawan yang berkunjung. Dengan semakin banyaknya kunjungan maka akan dapat meningkatkan pendapatan asli desa sehingga dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Tata kelola objek wisata ini akan lebih optimal jika diserahkan pada lembaga ekonomi milik desa seperti BUMDes. Dengan pengelolaan yang efektif bertumpu pada sinergi pemuda melalui karang taruna serta aparat desa yang cekatan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dana desa diharapkan akan semakin cepat tercapai cita-cita menuju Desa Gringgingsari yang mandiri.

D. Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kompilasi Data Indikator Pembangunan Berkelanjutan*.
<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1603>.
- gringgingsari.desa.id. (n.d.). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Gringgingsari Tahun Anggaran 2017*. 5.
- Hakim, A. R., & Mahyuni, M. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Konflik Sosial: Studi Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3841>.
- Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2019). Akuntabilitas Dana Desa (Kajian tentang Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4(1), 39–46. <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.39-46>.
- Irfandi. (2017, February 4). *Wawancara dengan Pendamping Desa Gringgingsari* [Personal communication].
- Jamaluddin, Y. (2017). *Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Indonesia Tahun 2015* [Preprint]. INA-Rxiv. <https://doi.org/10.31227/osf.io/yn6tf>.
- JDIH, B. (n.d.). *Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Diubah: Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI*. Retrieved November 10, 2021, from <https://jdih.bpk.go.id/?p=58006>.
- Kemenkopmk.go.id. (n.d.). 2020, *Dana Desa Fokus pada Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Potensi*

Ekonomi Desa. Retrieved November 12, 2021, from <https://www.kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masyarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi-desa>.

Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.

Munandar, A. I. (2019). Kebijakan Dana Desa dan Konflik Sosial: Studi Kasus di Sungai Tabuk, Kalimantan Selatan. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 106-124. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.6902>.

Perdianto, R. (2020). Peran Aktif Pemuda Era Globalisasi dalam Pembangunan Desa Muara Semerah Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. *JURNAL ADMINISTRASI NUSANTARA MAHA*, 2(8), 23-31.

Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.

Radar Pekalongan. (2018, May 11). Desa Wisata Gringgingsari Tawarkan Wisata Alam dan Religi. *Radar Pekalongan Online*. <https://radarpekalongan.co.id/30114/desa-wisata-gringgingsari-tawarkan-wisata-alam-dan-reliji/>.

Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. <https://relawandesas.files.wordpress.com/2008/06/1panduan-bumdes.pdf>.

- Tribun Pantura. (2018). *Curug Kanoman di Desa Wisata Gringgingsari* Batang. <https://www.youtube.com/watch?v=s2njaTgezpU>.
- Wahyuni, D. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul. *Kajian*, 24(3), 191-203. <https://doi.org/10.22212/kajian.v24i3.1869>.
- Wulandari, I., Musyarofah, S., & Asy'ari, M. A. (2017). Konflik Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Menguak Kesadaran Para Aktor. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 146-158. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.285>.
- Zulfiani, & Rivai, K. A. (2020). Tata Kelola Bumdes: Pemuda sebagai Penggerak Bumdes dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 141-154. <https://doi.org/10.52316/jap.v16i2.54>.



Dinamika Pengelolaan Dana Desa di Jawa Tengah

Muhammad Nasrullah

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan
muh.nasrullah@iainpekalongan.ac.id

Kuat Ismanto

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan

A. Pendahuluan

Salah satu sumber pendapatan desa menurut UU No. 14 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1 adalah Dana Desa (DD). Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana Desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat ke desa dapat digunakan untuk pembangunan sarana prasarana (sarpras) desa, sarpras sosial, sarpras usaha ekonomi desa dan lainnya. Selain itu, DD juga dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, seperti pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa, sistem informasi desa, pengelolaan dan permodalan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) dan lainnya.

Dana Desa mulai diberikan pemerintah pada tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp20,7 triliun (rata-rata per desa Rp280 juta). Dana Desa yang diberikan pemerintah

mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2016 meningkat menjadi Rp46,98 triliun (Rp628 juta per desa) dan tahun 2017 meningkat menjadi Rp60 triliun (Rp800 juta per desa). Pada tahun 2018, jumlah DD yang diberikan pemerintah sama dengan tahun 2017 yaitu Rp60 triliun. Pada tahun 2019, jumlah DD yang diberikan pemerintah naik lagi menjadi Rp70 triliun (rata-rata Rp930 juta per desa) dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp72 triliun (rata-rata Rp960 juta per desa) (<http://www.bpkp.go.id/jateng>, 2021). Wilayah Jawa Tengah sejak tahun 2015 telah mendapatkan Dana Desa sebesar Rp2,2 triliun, dan selama lima tahun anggaran Dana Desa yang diterima Propinsi Jawa Tengah telah naik 350% menjadi Rp7,8 triliun pada tahun 2020 (<https://jateng.suara.com>, 2021).

Tujuan pemerintah memberikan DD terutama untuk menciptakan desa mandiri. Di beberapa daerah, DD ini membawa kesuksesan, namun di daerah lainnya masih terjadi persoalan yang perlu diperbaiki. Salah satu kendala penggunaan Dana Desa adalah tentang pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa (Riyanto, 2015). Hal ini diperkuat oleh (Aziz, 2016) yang mengungkapkan bahwa dalam penggunaan Dana Desa masih dirasakan belum efektif karena kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan masih lemah. Selain pengelolaan dan pertanggungjawaban yang masih lemah. Masalah lain yang muncul dalam penggunaan DD adalah masih pasifnya masyarakat, utamanya Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam memberikan usulan program pembangunan desa (Aziz, 2016) dan (Suroso, Hakim, & Noor, 2014), sehingga secara substansi, penggunaan alokasi dana desa masih

belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. (Karimah, Saleh, & Wanusmawatie, 2014)

Oleh karena itu, (Abidin, 2015) menyarankan agar pengelolaan Dana Desa ditingkatkan kapasitasnya. Kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa ini menunjukkan bahwa dana besar yang diberikan kepada desa masih banyak permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang dinamika pengelolaan dana desa khususnya di wilayah Jawa Tengah, khususnya di desa-desa di Kabupaten Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes.

B. Pembahasan

1. Sekilas Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PMK No. 49/PMK.07/2016).

Sasaran penggunaan dana desa adalah:

- a. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- b. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberian Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa dan memperkuat

masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Adapun prinsip penggunaan Dana Desa sesuai dengan Permendes PDT dan Transmigrasi No 19/2017 sebagai berikut:

- a. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. Kewenangan desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal;
- f. Tipologi desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program pembangunan yang dapat dibiayai oleh Dana Desa antara lain: pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sarpras dasar (lingkungan pemukiman,

transportasi, energi dan informasi komunikasi), sarpras pelayanan sosial dasar (kesehatan masyarakat dan pendidikan kebudayaan), sarpras ekonomi untuk mewujudkan lumbung desa (usaha ekonomi pertanian dan non pertanian), sarpras lingkungan (penanganan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup), dan sarpras lainnya. Sedangkan program pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga dapat menjadi desa mandiri (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

2. Proses Perencanaan Pembangunan Desa

UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 71 ayat 2). Sedangkan aset desa dijelaskan sebagai berikut: Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah. Ayat 10 dan 11 Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan Kepala Desa dalam Keuangan Desa dinyatakan dalam Pasal 26 ayat 2 c, e yakni Kepala Desa memegang kekuasaan

pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan menetapkan APBDes.

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 74).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa (Pasal 73).

Dalam merencanakan APBDes, masing-masing desa memiliki cara yang hampir sama. Berikut proses perencanaan yang dilakukan oleh beberapa desa yang diteliti:

Tabel 1
Proses Perencanaan APBDes

Desa	Perencanaan kegiatan	Penentuan skala prioritas
Tambak Baya	Musyawarah masyarakat	Mengacu pada RPJM dan RKP desa
Bawang	Rapat pengajuan pembangunan & rapat penampung hasil musdus	Sesuai dengan PP dan UU, pelaksanaan hasil musrenbangdes, pelaksanaan yang paling mendesak
Wanatirta	Usulan dari dusun tapi pengajuan dari tingkat RT	Penentuan skala prioritas (rencana lebih dibutuhkan)
Gambuhan	Musyawarah Dusun (musdus) yang diajukan ke musdes	Musyawarah desa (musdes) dilanjutkan dengan Pembentukan PPK (Panitia Pelaksana Kegiatan)
Luragung	Lokasi Kegiatan, Menetapkan Alokasi Anggaran	Kebutuhan mendesak dan bencana
Wonorejo	Usulan kegiatan dari tingkat RT	Ditentukan secara bersama-sama dalam musyawarah desa (musdes)
Karangmoncol	Musyawarah	Musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa)
Bantarbolang	Musyawarah dusun (musdus) dan hasilnya dibawa ke musdes	Musdes dilanjutkan dengan pembentukan PPK dan TPK (Tim Pengelola Kegiatan)
Banjarturi	Diskusi yang dilakukan oleh masyarakat dan hasilnya diverifikasi ke desa	Ditentukan kepala desa disesuaikan dengan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

Sumber: data diolah, 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa hampir semua desa dalam melakukan perencanaan selalu melibatkan masyarakat. Masyarakat diminta aktif dalam pengusulan program-program yang akan dijalankan oleh desa. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan keadilan dalam penggunaan Dana Desa dan ini dilakukan untuk menghindari konflik warga. Dalam penentuan skala prioritas kegiatan, beberapa desa telah membentuk

Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Pembentukan PPK dan TPK merupakan amanat dari Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Fungsi dari PPK dan TPK adalah sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa. Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat turut aktif dalam pengusulan program desa. Hal ini sesuai dengan hasil riset (Handayani, 2018), (Wida, Supatmoko, & Kurrohman, 2017) dan (Syamsi, 2014).

Walaupun demikian, bagi sebagian masyarakat desa, jika program yang diusulkan tidak terealisasi, terkadang menyebabkan masyarakat kecewa. karena beberapa faktor, di antaranya; masyarakat desa mempunyai budaya peternalistik, yaitu cenderung percaya kepada apa yang dilakukan pemerintah desa (Setyoko, 2009). Faktor lain adalah faktor politis kepala desa. Yaitu kepala desa memiliki kuasa penuh atas penentuan program dan penggunaan dana desa, sehingga dana desa dapat digunakan untuk menaikkan citra kepala desa (Aziz, 2016).

3. Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Permendes PDT dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2017. DD dapat digunakan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan DD untuk pembangunan dapat digunakan untuk:

- a. Sarana prasarana desa: lingkungan pemukiman (bedah rumah, drainase maupun pengelolaan sampah), transportasi (jalan desa, jembatan, dan lainnya), energi (pembangkit listrik, tenaga diesel), IT (jaringan internet, web desa).

- b. Sarpras sosial pelayanan dasar: MCK, posyandu, polindes, perpustakaan desa.
- c. Sarpras ekonomi desa: embung desa, irigasi, lumbung desa, pasar desa, pondok wisata dan lainnya.
- d. Sarpras pelestarian lingkungan hidup: kesiagaan dan penanganan bencana, pelestarian lingkungan hidup dan penanganan kejadian luar biasa lainnya.
- e. Sarpras lainnya.

Sedangkan penggunaan DD untuk pemberdayaan masyarakat dapat digunakan untuk:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat desa
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa
- d. Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemberdayaan kaum marjinal dan penyandang disabilitas
- f. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dan atau BUMDes bersama
- g. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya
- h. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup
- i. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga

- j. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Proses pencairan dan penyaluran DD harus memenuhi prosedur sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019. Regulasi penyalurannya sebagai berikut:

- a. Dana desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Penyaluran dilakukan dalam tiga tahap:
 - 1) Tahap 1 paling cepat bulan Januari dan paling lambat Juni sebesar 40% dengan syarat Perbup/Perwali tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap desa, Perdes tentang APBDes dan surat kuasa pemindahbukuan DD.
 - 2) Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40%, dengan syarat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I dengan penyerapan paling sedikit 50% dan capaian keluaran paling sedikit 35%.
 - 3) Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20%, dengan syarat laporan realisasi penyerapan tahap II paling sedikit 90% dan capaian keluaran

paling sedikit 75% dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun sebelumnya.

- c. penyaluran untuk kategori desa mandiri dilakukan dalam dua tahap:
 - 1) Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60%, dengan syarat syarat Perbup/Perwali tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap desa, Perdes tentang APBDes dan surat kuasa pemindahbukuan DD.
 - 2) Tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 40%, dengan syarat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I dengan penyerapan paling sedikit 50% dan capaian keluaran paling sedikit 35%. Dan syarat ketiga adalah laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun sebelumnya.

Regulasi-regulasi yang telah ditetapkan pemerintah wajib dipatuhi oleh pemerintah desa. Desa dapat menetapkan prioritas penggunaan dana desanya yang dituangkan dalam APBDes dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa-desa wilayah Jawa Tengah, diperoleh data penggunaan DD baik untuk pembangunan sarpras maupun pemberdayaan masyarakat. Tabel 2 berikut menyajikan data penggunaan dana desa di beberapa wilayah.

Tabel 2
Penggunaan Dana Desa

Desa	Pembangunan	Pemberdayaan masyarakat
Tambak Baya	Tahun 2017 (DD Rp825.250.000): a. Pembangunan jalan poros desa (38%) b. Pembangunan jalan lingkungan (36%) c. Bantuan pembangunan PAUD (5,5%)	Tahun 2017: a. Pembangunan Sistem Informasi Desa (SID) (8%) b. Pendirian dan pengembangan BUMDes (12,5%)
	Tahun 2018 (Rp 984.416.000): a. Pembangunan jalan poros desa (33%) b. Pembangunan jalan lingkungan (34%) c. Posyandu, polindes (7%) d. Pembangunan talud (10%)	Tahun 2018: a. Permodalan BUMDes (10%) b. Pelatihan ibu rumah tangga (6%)
Bawang	Tahun 2017 (DD: Rp799.587.000) a. Pembangunan saluran air bersih (2,5% anggaran) b. Pembangunan jalan lingkungan (80% anggaran) c. Posyandu, polindes (7,5% anggaran)	Tahun 2017 (total 10% anggaran): a. Pelatihan manajemen BUMDes b. Sosialisasi ancaman penyakit desa c. Edukasi gerakan hidup sehat
	Tahun 2018 (DD: Rp720.000.000): a. Pembangunan tandon air (2,5%) b. Pembangunan saluran air bersih (2,75%) c. Pembangunan jalan lingkungan (50%) d. Pembelian kebutuhan perlengkapan medis (35%)	Tahun 2018: Pelatihan dan sosialisasi (9,5%)
Wanatirta	Tahun 2017 (Rp885.410.000): a. Pembangunan jalan lingkungan (33%) b. Pembangunan jembatan (30%) c. Pembangunan talud (15%) d. Pembangunan pagar makam (15%)	Tahun 2017 (7%): Sosialisasi dan pelatihan

	Tahun 2018 (Rp1.732.643): a. Pembangunan jalan lingkungan (50%) b. Pembangunan saluran irigasi (20%) c. Pembangunan jembatan (20%)	Tahun 2018 (10%): Sosialisasi dan pelatihan
Gambuhan	Tahun 2017 (Rp1.035.307.000): a. Pembangunan saluran air bersih (48%) b. Pembangunan jalan poros desa (45%)	Tahun 2017: Permodalan BUMDes (7%)
	Tahun 2018 (Rp1.422.000.000): a. Pembangunan saluran air bersih (40%) b. Pembangunan jalan poros desa (50%)	Tahun 2018: Permodalan BUMDes (10%)
Luragung	Tahun 2017 (Rp 849.776.000): a. Pembangunan saluran air bersih (6%) b. Pembangunan jalan poros desa (60%) c. Pembangunan lain, seperti: jembatan, talud dan perbaikan bangunan (27%)	Tahun 2017: Sosialisasi BUMDes (7%)
	Tahun 2018 (Rp886.771.220): a. Pembangunan saluran air bersih (10%) b. Pembangunan jalan poros desa (50%) c. Pembangunan lainnya (28%)	Tahun 2018: Sosialisasi kesehatan (7%) dan permodalan BUMDes (5%)
Wonorejo	Tahun 2017 (Rp789.947.000): a. Pembangunan jalan poros desa (50%) b. Pembangunan jalan lingkungan (20%) c. Pembangunan gedung PAUD (9%) d. Pembangunan lainnya (12%)	Tahun 2017: Pelatihan kewirausahaan (4%) dan sosialisasi BUMDes (5%)
	Tahun 2018 (Rp680.469.000): a. Pembangunan jalan poros desa (63%) b. Pembangunan jalan	Tahun 2018: Pelatihan siskeudes (6%)

	lingkungan (16%) c. Persediaan kebutuhan medis (25%)	
Karangmoncol	Tahun 2017 (Rp939.606.000); a. Pembangunan jalan poros desa (35%) b. Pembangunan jalan lingkungan (28%) c. Posyandu, polindes dan poskesdes (15%)	Tahun 2017: a. Sosialisasi dan pelatihan BUMDes (12%) b. pembangunan sistem informasi desa (10%)
	Tahun 2018 (Rp1.300.000.000): a. Pembangunan jalan desa dan lingkungan (45%) b. Posyandu, polindes dan poskesdes (15%) c. Pembangunan talud (22%)	Tahun 2018: a. Pelatihan kerajinan (8%) b. Pengembangan SID (10%)
Bantarbolang	Tahun 2017 (Rp1.025.000.000): a. Pembangunan jalan poros desa (40%) b. Pembangunan jalan lingkungan (32%) c. Posyandu, polindes, poskesdes (10%) d. Pembangunan saluran irigasi (12%)	Tahun 2017 (6%): Sosialisasi dan pelatihan BUMDes
	Tahun 2018 (Rp1.300.000.000): Prioritas pembangunan sama dengan tahun 2017, hanya persentase total hanya 90%	Tahun 2018 (10%): Pelatihan siskeudes
Banjarturi	Tahun 2017 (Rp 800.000.000): a. Pembangunan bak/tandon air (25%) b. Pembangunan saluran air (30%) c. Pembangunan jalan poros desa dan jalan lingkungan (40%)	Tahun 2017: Sosialisasi dan pelatihan (5%)
	Tahun 2018 (Rp900.000.000) Prioritas pembangunan masih sama dengan 2017.	Tahun 2018: Terdapat kenaikan persentase menjadi 8%, digunakan untuk pelatihan BUMDes

Sumber: data diolah, 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa penggunaan DD terbagi menjadi dua yaitu pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan sarana prasarana didominasi oleh pembangunan jalan desa, saluran irigasi dan pembangunan jembatan. Lebih dari 50% dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, saluran irigasi dan jembatan Hal ini sangat wajar karena mayoritas jalan desa belum beraspal sehingga menghambat aktivitas masyarakat. Di samping itu, sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa adalah petani, sehingga perbaikan saluran irigasi maupun talud sangat diperlukan sehingga akan memperbaiki produktivitas pertanian. Porsi penggunaan DD masih dominan untuk pembangunan sarana prasarana kerana mereka menganggap sarpras akan lebih kelihatan hasilnya dan bermanfaat bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam perekonomian (Arif, 2017). Hasil ini sesuai dengan penelitian (Depi, 2017) yang menyatakan bahwa DD mampu meningkatkan infrastruktur jalan, akan tetapi masih minim untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil serupa juga dinyatakan oleh (Chasanah et al., 2017) bahwa Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara digunakan 100% untuk pembangunan fisik, hal ini didukung oleh masyarakat karena mereka menganggap pembangunan fisik lebih penting daripada pemberdayaan.

Selain pembangunan, DD juga digunakan untuk aktivitas pemberdayaan masyarakat. Beberapa desa mulai berpikir untuk mengembangkan potensi desanya. Desa Tambak Baya memanfaatkan DD untuk membangun SID. Menurut sekdes, pembangunan SID

sangat penting di era modern, karena dapat digunakan sebagai sarana profiling desa dan agar desa melek teknologi. Selain itu, DD digunakan untuk permodalan, pelatihan dan pengembangan BUMDes, sebagai contoh desa Tambak Baya dan Bawang. Selain itu, DD juga digunakan untuk sosialisasi dan pelatihan usaha mandiri. Hal ini membuktikan bahwa desa memiliki keinginan untuk mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ada pula DD yang digunakan untuk pelatihan siskeudes (sistem keuangan desa). Pelatihan ini ditujukan untuk mempermudah aparatur desa membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan DD.

Salah satu unsur penggunaan DD yang belum maksimal dan belum banyak desa lakukan adalah pembentukan dan pengembangan BUMDes, baru sekitar 60% desa yang memiliki BUMDes. Usaha yang dikelola oleh BUMDes bervariasi, ada yang bergerak di sektor pertanian, pariwisata, pengelolaan sampah dan perdagangan dengan mengelola ruko/pasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perangkat desa, mereka mengatakan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pendirian BUMDes, antara lain: keterbatasan dan kurangnya kader profesional BUMDes, dan persaingan dengan pihak swasta. Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab kurang berkembangnya BUMDes adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan kompetensi SDM dalam menyusun program dan laporan BUMDes (Putri, Falikhatun, & Winarna, 2016), serta SDM kurang fokus dalam pengelolaan dan tidak memiliki jiwa entrepreneurship (Hidayah, Mulatsih, & Purnamadewi, 2019).

4. Pelaporan Dana Desa

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, kepala desa wajib membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester. Untuk semester I, laporan paling lambat akhir bulan Juli pada tahun berjalan, dan semester II dilaporkan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Proses penggunaan dana desa dimulai dari proses perencanaan dalam bentuk pengesahan APBDes. Setelah APBDes disahkan, maka proses pencairan dapat dilakukan dalam tiga tahap sesuai dengan PMK No. 205 tahun 2019. Setiap tahapan pencairan harus disertai syarat di antaranya penyampaian laporan penggunaan dana periode sebelumnya. Berikut ini data pelaporan DD di beberapa desa di Jawa Tengah yang menjadi objek penelitian:

Tabel 3
Pelaporan Dana Desa

Desa	Laporan Semester I	Laporan Semester II	Bentuk Laporan
Tambak Baya	Bulan Juni	Bulan November	Aplikasi siskeudes
Bawang	Bulan Juli	Bulan November	Aplikasi siskeudes
Wantirta	Belum membuat laporan	Belum membuat laporan	Manual
Gambuhan	Bulan Juni	Bulan Desember	Manual
Luragung	Bulan Desember	Bulan Februari 2019	Manual
Wonorejo	Bulan Juli	Bulan Desember	Aplikasi siskeudes
Karangmoncol	Bulan Juni	Bulan November	Manual
Bantarbolang	Bulan Desember	Belum laporan	Manual
Banjarturi	Bulan Oktober	Bulan Desember	Manual

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa sebagian desa masih terkendala dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Beberapa penyebab keterlambatan pelaporan adalah pemahaman SDM/perangkat desa dalam memahami laporan dan penggunaan aplikasi siskeudes. Mereka masih bergantung pada pendamping desa. Semua desa memiliki pendamping desa yang berfungsi untuk memberikan pendampingan penggunaan dana desa mulai penyusunan/perencanaan sampai laporan. Keberadaan pendamping desa sangat membantu aparat desa dalam hal *updating* informasi dan penyusunan laporan. Walaupun demikian, masih terdapat keluhan dari beberapa kepala desa karena pendamping desa tidak mengetahui teknis bangunan.

Kendala yang lain adalah beberapa desa masih menggunakan sistem manual dalam pelaporan dana desa. Padahal menurut perangkat desa, pelaporan dengan menggunakan aplikasi lebih mudah dibanding sistem manual. Penyebab keterlambatan yang lain adalah banyaknya dokumen yang harus dilampirkan dalam laporan.

Konsekuensi dari keterlambatan pelaporan adalah terhambatnya pencairan dana untuk periode berikutnya. Bahkan tahun anggaran berikutnya, dapat dipotong. Jika ini terjadi, maka akan sangat merugikan masyarakat, karena perencanaan pembangunan desa menjadi terhambat.

C. Penutup

Pemberian Dana Desa dari pemerintah kepada desa merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Harapannya, dengan adanya pemanfaatan DD, desa menjadi mandiri dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya sehingga akan mengurangi urbanisasi.

Kucuran dana sebesar kurang lebih Rp1 miliar per desa sejak tahun 2015 telah membuahkan banyak hasil, di antaranya perbaikan infrastruktur desa, baik jalan, jembatan, saluran irigasi maupun bedah rumah. Program-program yang dilaksanakan juga mampu menyerap tenaga kerja karena pembangunan melibatkan masyarakat desa. Di samping itu, program pemberdayaan masyarakat telah dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan mendirikan BUMDes yang tujuannya untuk menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* masyarakat.

Walaupun pemanfaatan DD sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah, masih terdapat kendala yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah, di antaranya adalah peningkatan kapasitas SDM desa, terutama dalam pertanggungjawaban dan laporan. Pekerjaan rumah lain adalah dorongan untuk segera mengembangkan BUMDes agar desa mandiri dapat terwujud.

D. Referensi

Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa (Study of Implementation of Village Finance to Support Fund Village Policy), 61-76.

- Arif, S. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan*, 1(1), 23–32.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi daerah dan efektivitas pembangunan perdesaan. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- Chasanah, K., Rosyadi, S., Kurniasih, D., Pascasarjana, P., Administrasi, I., & Soedirman, U. J. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *IJPA*, 3(2), 12–32.
- Depi, R. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2).
- Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155.
- Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2019). Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Kasus BUMDes Harapan. *JSHP*, 3(2), 144–153.
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 597–602.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Saku Dana Desa*.
- Putri, N., Falikhatun, & Winarna, J. (2016). Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 37–45.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa

- Perangai Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara. *Journal Administrasi Negara*, 3(1), 119-130.
- Setyoko, P. I. (2009). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 14-24.
- Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Wacana*, 17(1), 7-15.
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 21-28.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desanya Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (The Accountability in the Management of the Village Fund Allocation in Villages at Rogojampi District, Banyuwangi Regency). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, IV(2), 148-152.



Bagian 2
BISNIS BERWAWASAN LINGKUNGAN

Mitigasi Banjir Rob dan Dampaknya Perspektif *Entrepreneur* Muslim di Pekalongan

Muh. Izza, M.S.I.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan
muh. izza@iainpekalongan.ac.id

Hella Ariska

Nailal Husna

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan

A. Pendahuluan

Bencana di Indonesia sampai saat ini menjadi perhatian pemerintah salah satunya banjir rob. Rob ini menjadi tantangan di beberapa kota besar di Indonesia karena sebagian besar kotanya berada di dekat pesisir. Marfai (2014) menyebut wilayah kepesisiran Indonesia merupakan wilayah yang sangat rawan terkena bencana. Beberapa kota pesisir yang terkena rob di antaranya Makassar, Jakarta, Cirebon, Semarang dan Surabaya termasuk Pekalongan.

Marfai (2013) menyebut Kota Pekalongan termasuk *waterfront city*, yakni suatu kota yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa. Kepadatan penduduk membawa dampak signifikan terhadap elevasi tanah di wilayah tersebut. Kondisi ini yang menurutnya menjadi penyebab tanah semakin datar sehingga menyebabkan potensi kejadian banjir rob menjadi lebih besar. Kota Pekalongan terjadi rob hampir setiap tahunnya. Ini terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2012, 2014, 2015, 2016 dan 2017.

Dalam riset lanjutannya Marfa'i (2015) menilai secara matematis bahwa kerugian berdasar akibat banjir rob pada skenario genangan 117 cm adalah sebesar 50,26 triliun rupiah, sedangkan kerugian akibat banjir rob pada skenario genangan 133 cm diperkirakan 50,56 triliun rupiah. Dampak kerentanan yang terjadi akibat banjir rob berupa kerentanan fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Suatu dampak yang kompleks karena yang rusak bukan cuma sisi materi saja. Bahkan Marfa'i menyebut dampak tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang beralih mata pencaharian.

Riset lain terkait masalah rob dan dampaknya telah dilakukan banyak pihak di antaranya Nugroho SH (2013) mengkaji mitigasi rob. Drestanto, A. S dkk. (2014) melalui pemetaan area genangan banjir pasang di kawasan lahan budidaya air payau di Kota Pekalongan. Kemudian Darumaya (2011), Desmawan, B. T., & Sukamdi, S. (2012) dan Kasbullah (2014) membahas rob memakai pendekatan interpolasi dengan prinsip *moving average* melalui sifat geologinya. Menurutnya data DEM dapat menggambarkan kondisi elevasi lokasi bencana. Nirwansyah, A. W. (2013), Cahyadi, A., (2017), Mardiatno D. dkk. (2017), membahas isu banjir rob melalui pemodelan spasial bahaya banjir rob berdasar skenario perubahan iklim dan dampaknya di pesisir Pekalongan.

Selama ini wilayah Kota Pekalongan yang terkena rob terparah adalah Pekalongan Utara. Sejumlah enam dari tujuh kelurahan di Pekalongan Utara terkena dampak rob tersebut. Bahkan menurut Walikota Pekalongan (2018) sepertiga wilayahnya terdampak banjir rob. Kerusakan terdampak rob ini berupa kerusakan lahan pertanian, sawah, kerusakan tambak, kerusakan permukiman dan gedung-gedung fasilitas

umum serta kerusakan jalan dan terganggunya sanitasi masyarakat. Akibatnya kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan dengan baik.

Pembahasan ini ini ingin menyampaikan terkait mitigasi banjir rob dan dampak ekonomi di Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Beberapa alasannya adalah sebagai berikut, *pertama* Pekalongan Utara merupakan daerah yang langsung berdekatan dengan bibir pantai sehingga rawan terjadi bencana (Marfai dkk., 2014). *Kedua* Kota Pekalongan merupakan daerah yang tak terlalu luas hanya 44,25 m² dan 33% merupakan wiyalah Pekalongan Utara di mana 6 dari 7 kelurahan terkena dampak banjir rob (Adhyaksa, 2014). *Ketiga* posisi Pekalongan Utara terletak di antara dua sungai relatif besar (Sungai Tirto dan Sungai Loji). Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mitigasi banjir rob melalui *entrepreneur* memecahkan masalah bencana. Model ini bukan terakhir tetapi sebagai harapan solutif untuk memberi kontribusi penanganan kebencanaan.

B. Pembahasan

1. Mitigasi, Banjir Rob dan UMKM

Pembahasan tentang mitigasi bencana saat ini masih populer di Indonesia. Baik di dataran tinggi, dataran rendah sampai di pesisir membicarakan mitigasi bencana. Hal ini karena sifat posisi geografis yang ditempati manusia sekarang belum memastikan kondisi dirinya aman. Di dataran tinggi rawan misalnya terjadi longsor, kebakaran hutan, letusan gunung dan lainnya. Di dataran rendah terjadi adanya banjir, pencemaran dan lainnya. Demikian juga di daerah pesisir juga rawan

terjadinya badai, tsunami bahkan belakangan sering terjadi banjir rob (Faiqoh, F., dkk. 2017).

Mitigasi terhadap suatu bencana harus sesegera dipahami oleh masyarakat. Sebab jika telah terjadi maka kerusakannya bukan hanya rumah saja tetapi infrastruktur jalan, fasilitas umum seperti sekolah dan layanan kesehatan, sanitasi, lahan pekarangan, tegalan, persawahan dan lahan tambak (Marfai, M. A., & Cahyadi, A., 2017). Drajat Suhardjo (2007) menyebut pendidikan mitigasi bencana perlu dilakukan guna menyamakan persepsi dalam merespons bencana yang akan datang. Hal ini karena mitigasi terkait dengan minimalisasi risiko suatu bencana baik secara fisik maupun nonfisik. Menurutnya ada lima hal terkait mitigasi, (1) Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; (2) Pengenalan dan pemantauan risiko bencana; (3) Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; (4) Pengembangan budaya sadar bencana; (5) Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana;

Grotberg (1997) menyebut bahwa mitigasi terkait ketahanan (*resilience*) menghadapi suatu bencana. Menurutnya *resilience* didefinisikan sebagai “kemampuan manusia untuk menghadapi, mengatasi, dan diperkuat oleh pengalaman kesulitan pada saat menghadapi rintangan dan hambatan”. Laporan keempat IPCC menyatakan bahwa ketahanan merupakan kemampuan suatu sistem untuk mengatasi gangguan atau kapasitas untuk dapat beradaptasi terhadap tekanan dan perubahan yang terjadi di lingkungan (Lei, Y., dkk., 2014). Ketahanan akan lebih tepat dari pada meminimalisasi. Menurut

Dodman (2009) ketahanan merupakan suatu proses yang memungkinkan masyarakat tidak hanya mampu menghadapi gangguan tetapi juga mampu menghadapi tantangan yang dapat memperburuk kehidupan dan memfasilitasi lebih banyak tindakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Makna ketahanan dalam memitigasi suatu bencana memiliki empat komponen penting, (1) adaptasi, (2) respons, (3) organisasi diri dan (4) pembelajaran yang dapat diambil (Sapirstein, 2009). Jadi melalui minimalisasi risiko dan ketahanan merupakan inti dan substansi dari sebuah mitigasi.

Bencana terjadi dapat kapan saja dan di mana saja. Ada dua faktor bencana yaitu (1) faktor alam dan (2) faktor non alam. Bencana dari faktor alam dapat berupa kebakaran, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, badai tropis, dan lainnya. Sedangkan bencana dari faktor non alam berasal dari uji coba senjata kimia, perang, pencemaran lingkungan, limbah industri dan lainnya (Maryani, E. (2010). Bencana seperti ini berasal dari ciptaan manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Konteks mitigasi bencana menurut Mufidah, Y. A. (2013) dikenal dua macam, *pertama* bencana alam yang merupakan suatu serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu berupa gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan tanah longsor, dan lain-lain. *Kedua* bencana sosial merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh manusia, seperti konflik sosial, penyakit masyarakat dan teror. Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat

perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana.

Seiring terjadinya fenomena bencana yang ada masing-masing ilmuwan satu dengan yang lainnya memiliki teori sendiri menurut keahliannya. Beberapa teori mitigasi bencana terkait rob dalam hal ini dibagi menjadi dua macam (Adi Sindhupatty, B., 2012), yaitu teori mitigasi struktural dan teori mitigasi non struktural. (1) Teori mitigasi struktural menyebutkan bahwa upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi, bangunan adaptif tahan bencana, ataupun *Early Warning Sistem* yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami (Mustofa, F., & Suharyanto, H., 2014).

Secara ekonomi Kota Pekalongan memiliki prospek potensial. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan tahun 2015 menyebut ada sejumlah 19.615 unit UMKM. Usaha UMKM ini menurutnya mampu menyerap 74.249 tenaga kerja dengan nilai omzet Rp 1,84 triliun (<http://dindagkop.pekalongankota.go.id/>, diakses 9 Sept. 2017). Namun kota ini memiliki 3 persoalan terkait topografinya, yaitu (1) banjir bah. Banjir ini dijumpai pada saat musim penghujan. Jika kondisi musim hujan relatif panjang maka di Kota Pekalongan bagian utara terkena dampak cukup signifikan, Apalagi wilayah Pekalongan utara terletak di antara dua hilir sungai (Loji dan Tirto); (2) masalah air pasang (rob). Masalah air pasang ini di jumpai

ketika kondisi daerah sedang musim penghujan disertai cuaca laut ekstrem. Bila kedua hal tersebut datang bersamaan maka wilayah terkena banjir semakin tinggi; (3) penurunan struktur tanah. Penurunan struktur tanah ini disebabkan karena berkurangnya air di lapisan bawah tanah yang semakin lama semakin menipis. Data Bappeda Kota Pekalongan menjelaskan kondisi lapisan tanah di pesisir Pekalongan mencapai minus 30-50 cm di bawah permukaan air laut (<http://bappeda.pekalongankota.go.id/>, diakses 9 Sept. 2017).

2. Mitigasi Banjir Rob Perspektif *Entrepreneur*

Mitigasi merupakan unsur penting dalam menghadapi suatu bencana. Mitigasi dapat menjadi sebuah alat guna menjaga dirinya dari bahaya yang datang karena sebab alam. Kualitas mitigasi dikatakan efektif jika wagra terkena dampak suatu bencana dapat dieliminir. Semakin sedikit terdampak bencana di masyarakat maka semakin efektif suatu mitigasi tersebut.

Objek kajian dalam pembahasan ini berasal dari para pelaku usaha atau *entrepreneur*. Mereka merupakan sosok yang tak bisa ditinggalkan dalam studi ini sebab memiliki dua posisi. Satu sisi mereka dianggap 'subjek' yang secara tidak langsung terlibat sebagai 'penyebab' adanya problem alam. Pada sisi yang lain mereka juga dianggap sebagai objek. Mereka juga sama-sama terkena dampak dari adanya bencana rob. Sehingga dalam konteks penilaian efektivitas mitigasi berbasis *entrepreneur* ini indikatornya minimal mempunyai tiga hal, yaitu (1) tempat pembuangan akhir atau sejenisnya,

(2) instrumen perhatian terhadap lingkungan, (3) pengolahan sampah atau limbah usaha.

Selanjutnya dari para pelaku usaha atau *entrepreneur* ini oleh peneliti disuruh menjawab sejumlah kuesioner. Hasil kuesioner menjadi bahan riset sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Inilah informasi terkait formula mitigasi banjir rob perspektif *entrepreneur* di Kecamatan Pekalongan Utara. Selain itu juga dilakukan *interview* agar jawaban objek semakin berkualitas. Ada tiga objek pemberian kuesioner atau angket yang dilakukan yaitu *pertama* model angket A.1. Angket ini diberikan bagi kelompok pelaku usaha kecil, *kedua* model angket A.2. yang diberikan kepada kelompok pelaku usaha menengah dan *ketiga* model angket A.3 diberikan bagi kelompok pelaku usaha relatif besar. Ketiga model angket tersebut masing-masing dibagi menjadi tiga bagian pemahaman yaitu (1) Terkait pemahaman *entrepreneur*, (2) Terkait langkah mitigasi banjir rob dan (3) Terkait efektivitas mitigasi banjir rob. Harapannya metode angket ini dapat memberi solusi sederhana atas mitigasi bencana. Seberapa efektifkah solusi yang muncul dari Komunitas tersebut. Berikut ini hasil angket yang dilakukan terkait efektivitas mitigasi banjir rob berbasis *entrepreneur* di Kecamatan Pekalongan Utara.

a. Pemahaman tentang *Entrepreneur*

Langkah efektif pertama untuk memperoleh data mitigasi banjir rob ini adalah meng-*cover* pemahaman tentang kondisi pelaku usaha sendiri atau *entrepreneur*. Kategorisasi pada survei di sini terdiri dari lima pernyataan. Mulai dari sejak berdiri

minimal lima tahun, model instruksi, hasil limbah, pengolahan sampah atau limbah usaha dan adanya lahan sampah atau limbah. Sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian berikut ini:

1) Usaha bisnis sudah 5 tahun lebih

Pernyataan	Options	F	%
Usaha bisnis anda sudah 5 tahun lebih	Ya	27	64,3
	Tidak	15	35,7
	Tidak Tahu	0	0
	Jumlah	42	100

Kondisi usia suatu usaha menjadi perhatian dalam kuesioner ini. Tujuannya untuk mengetahui sepek terjang para pelaku usaha (*entrepreneur*). Semakin lama usia para *entrepreneur* maka presedennya perlu dipelajari. Apakah ada efek dan akibat dari adanya *entrepreneur*, atau ada keterkaitan dengan hal lain sehingga perilaku para *entrepreneur* dapat memajukan lingkunganya.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa para *entrepreneur* bersemangat yang terlihat dari respons sebanyak 27 orang atau 64,3% dari 42 responden menyatakan ya, sedang 15 orang atau 35,7% tidak, dan 0 % yang menyatakan tidak tahu.

2) Model instruksi bisnis 'Top Down'

Pernyataan	Options	F	%
Model instruksi bisnis 'Top Down'	Ya	37	88,1
	Tidak	5	11,9
	Tidak Tahu	0	0
	Jumlah	42	100

Untuk menunjukkan indikasi logis pernyataan selanjutnya adalah dengan model instruksi *entrepreneur* di dalamnya. Dari tabel kedua di atas dapat diketahui bahwa model instruksi para *entrepreneur* memakai pendekatan Top Down. Ini artinya mereka menunggu isyarat atau perintah dari atasan atau orang lain tanpa ada inisiasi sendiri sebagaimana terlihat dari respons sebanyak 37 orang atau 88,1% dari 42 responden menyatakan ya, sedang 5 orang atau 11,9% tidak, dan 0 % yang menyatakan tidak tahu.

3) Produksinya menghasilkan sisa limbah/sampah

Pernyataan	Options	F	%
Produksinya menghasilkan sisa limbah/sampah	Ya	30	71.4
	Tidak	9	21.4
	Tidak Tahu	3	7,1
	Jumlah	42	100

Kehadiran para *entrepreneur* dengan usia dan model instruksi selanjutnya menimbulkan preseden atas sisa limbah. Di mana dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara dominan para *entrepreneur* memiliki sisa limbah. Ini terlihat dari respons sebanyak 29 orang atau 72,5% dari 42 responden yang dipilih secara acak, menyatakan ya, 8 orang atau 20,0% menyatakan tidak, dan hanya 3 orang atau 7,5% yang menyatakan tidak tahu.

4) Ada pengolahan sampah/limbah usaha Anda

Pernyataan	Options	F	%
Ada pengolahan sampah/ limbah usaha Anda	Ya	20	47.6
	Tidak	19	45.2
	Tidak Tahu	3	7,1
	Jumlah	42	100

Kemudian kita lihat salah satu solusi atas penanganan limbah dari para *entrepreneur*. Hampir ada keseimbangan di sini yaitu sekitar 20 orang atau 47,6% dari 42 responden menyatakan ya, 19 orang atau 45,2% menyatakan tidak, dan hanya 3 orang atau 7,1% yang menyatakan tidak tahu.

5) Ada lahan penampungan sampah/limbah

Pernyataan	Options	F	%
Ada lahan penampungan sampah/limbah	Ya	31	73.8
	Tidak	9	21.4
	Tidak Tahu	2	4.8
	Jumlah	42	100

Opsi berikutnya adalah adanya lahan penampungan limbah. Dominan penampungan di sini kebanyakan para *entrepreneur* telah memiliki penampungan limbah. Ini artinya mereka telah peka terhadap lingkungan. Kondisi ini ditunjukkan pada hasil kuesioner mendapatkan sejumlah 31 orang atau 73,8 % dari 42 menyatakan ya, 9 orang atau 21,4% menyatakan tidak, dan hanya 2 orang atau 4,8% yang menyatakan tidak tahu.

b. Pemahaman tentang Mitigasi Banjir Rob

Langkah kedua tentang efektivitas mitigasi banjir rob ini adalah pemahaman tentang substansi mitigasi banjir rob. Kategorisasi pada survei di sini terdiri dari lima hal yaitu berangkat dari sistem drainase pelaku usaha, instrumen perhatian *entrepreneur* pada lingkungan sekitar, adanya perubahan lahan selama lima tahun dan simulasi bagi *entrepreneur* mengatasi rob. Tabel kategorisasi ini ditunjukkan berikut ini:

1) Sistem drainase di perusahaan/bisnis anda

Pernyataan	Options	F	%
Sistem drainase di perusahaan/bisnis anda	Ya	35	83.3
	Tidak	6	14.3
	Tidak Tahu	1	2.4
	Jumlah	42	100

Kondisi usia suatu usaha menjadi perhatian dalam kuesioner ini. Tujuannya untuk mengetahui sepak terjang para pelaku usaha (*entrepreneur*). Semakin lama usia para *entrepreneur* maka presedennya perlu dipelajari. Apakah ada efek dan akibat dari adanya *entrepreneur*, atau ada keterkaitan dengan hal lain sehingga perilaku para *entrepreneur* dapat memajukan lingkungannya.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa para *entrepreneur bersemangat* yang terlihat dari respons sebanyak 35 orang atau 83,3% dari 42 responden menyatakan ya, sedang 6 orang atau 14,3% tidak, dan 1 orang atau 2,4 % yang menyatakan tidak tahu.

- 2) Ada instrumen perhatian terhadap lingkungan sekitar

Pernyataan	Options	F	%
Ada instrumen perhatian terhadap lingkungan sekitar	Ya	31	73.8
	Tidak	5	11.9
	Tidak Tahu	6	14.3
	Jumlah	42	100

Untuk menunjukkan indikasi logis pernyataan selanjutnya adalah dengan model instruksi *entrepreneur* di dalamnya. Dari tabel kedua di atas dapat diketahui bahwa model instruksi para *entrepreneur* memakai pendekatan Top Down. Ini artinya mereka menunggu isyarat atau perintah dari atasan atau orang lain tanpa ada inisiasi sendiri sebagaimana terlihat dari respons sebanyak 31 orang atau 73,8% dari 42 responden menyatakan ya, sedang 5 orang atau 11,9% tidak, dan 6 orang atau 14,3% yang menyatakan tidak tahu.

- 3) Ada perubahan lahan di perusahaan selama 5 tahun

Pernyataan	Options	F	%
Ada perubahan lahan di perusahaan selama 5 tahun	Ya	18	42.9
	Tidak	23	54.8
	Tidak Tahu	1	2.4
	Jumlah	42	100

Kehadiran para *entrepreneur* dengan usia dan model instruksi selanjutnya menimbulkan

preseden atas sisa limbah. Di mana dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara dominan para *entrepreneur* memiliki sisa limbah. Ini terlihat dari respons sebanyak 18 orang atau 42,9% dari 42 responden yang dipilih secara acak menyatakan ya, 23 orang atau 54,8% menyatakan tidak, dan hanya 1 orang atau 2,4% yang menyatakan tidak tahu.

- 4) Ada instrumen perhatian terhadap lingkungan sekitar

Pernyataan	Options	F	%
Ada instrumen perhatian terhadap lingkungan sekitar	Ya	3	7.1
	Tidak	35	83.3
	Tidak Tahu	4	9.5
	Jumlah	42	100

Kemudian kita lihat salah satu solusi atas penanganan limbah dari para *entrepreneur*. Hampir ada keseimbangan di sini yaitu sekitar 3 orang atau 7,1% dari 42 responden menyatakan ya, 35 orang atau 83,3% menyatakan tidak, dan hanya 4 orang atau 9,5% yang menyatakan tidak tahu.

- 5) Di perusahaan punya stimulant atas mitigasi banjir rob

Pernyataan	Options	F	%
Di perusahaan punya stimulant atas mitigasi banjir rob	Ya	17	40.5
	Tidak	7	16.7
	Tidak Tahu	18	42.9
	Jumlah	42	100

Opsi berikutnya adalah adanya lahan penampungan limbah. Dominan penampungan di sini kebanyakan para *entrepreneur* telah memiliki penampungan limbah. Ini artinya mereka telah peka terhadap lingkungan. Kondisi ini ditunjukkan pada hasil kuesioner mendapatkan sejumlah 17 orang atau 40,5 % dari 42 menyatakan ya, 7 orang atau 16,7% menyatakan tidak, dan 14 orang atau 42,9% yang menyatakan tidak tahu.

3. Pemahaman tentang Efektivitas Mitigasi Banjir Rob

Langkah selanjutnya yang ketiga adalah meminta jawaban yang berkualitas. Kualitas jawaban berasal dari hasil survei kemudian dibuat kategorisasi logis. Hal ini bertujuan untuk menilai dan melihat ‘kebenaran’ jawaban. Survei di sini terdiri dari lima hal, berangkat dari *planning* mitigasi *entrepreneur* terhadap bahaya rob, kemitraan perusahaan dalam penanganan rob, langkah atas penanganan banjir rob, mitigasi adalah dominan fisik di perusahaan atau dominan fisik di perusahaan. Berikut ini tabel kualitas kategorisasinya:

a. *Planning* mitigasi bahaya rob

Pernyataan	Options	F	%
<i>Planning</i> mitigasi bahaya rob	Ya	28	66.7
	Tidak	6	14.3
	Tidak Tahu	8	19.0
	Jumlah	42	100

Jangkauan wilayah Pekalongan Utara yang rawan parah terkena rob adalah di bagian barat Sungai Loji. Para *entrepreneur* dalam meangkal

bahaya rob telah memiliki kesiapan. Hal ini terlihat dari kenyataan umum bahwa pasca banjir rob mereka memodifikasi rumah/lokasi usahanya dengan cara meninggikan atau merubah bentuk bangunan. Tabel di atas menunjukkan bahwa para *entrepreneur* kebanyakan memiliki *planning* terhadap banjir rob yang terlihat dari respons sebanyak 28 orang atau 66,7% dari 42 responden menyatakan ya, sedang 6 orang atau 14,3% tidak, dan 8 orang atau 19,0 % yang menyatakan tidak tahu.

b. Kemitraan dalam penanganan banjir rob

Pernyataan	Options	F	%
Kemitraan dalam penanganan banjir rob	Ya	4	9.5
	Tidak	33	78.6
	Tidak Tahu	5	11.9
	Jumlah	42	100

Selanjutnya terkait dengan kemitraan dalam penanganan banjir rob para pelaku usaha terlihat cenderung sedikit. Banyak dari mereka dalam penanganannya dilakukan secara pribadi atau sendiri. Indikasi logis pernyataan yang kedua ini belum determinan sesuai dengan pernyataan pertama Jadi para *entrepreneur* meski telah memiliki *planning* atas kejadian rob namun masih cenderung parsial. Sebagaimana terlihat dari tabel di atas respons sebanyak 4 orang atau 9,5% dari 42 responden menyatakan ya, sejumlah 33 orang atau 78,6% menyatakan tidak, dan 5 orang atau 11,9 % yang menyatakan tidak tahu.

c. Langkah atas penanganan banjir rob

Pernyataan	Options	F	%
Langkah atas penanganan banjir rob	Ya	24	57.1
	Tidak	11	26.2
	Tidak Tahu	7	16.7
	Jumlah	39	100

Kemudian langkah-langkah para *entrepreneur* dalam menangani rob terlihat dari tabel di atas. Sejumlah *entrepreneur* merasa siap dalam penanganan banjir rob. Ini terlihat indikasi dari respons sebanyak 24 orang atau 57,1% dari 42 responden yang menyatakan ya, sejumlah 11 orang atau 26,2% menyatakan tidak, dan 7 orang atau 16,7% yang menyatakan tidak tahu.

d. Mitigasi adalah dominan fisik diperusahaan

Pernyataan	Options	F	%
Mitigasi adalah dominan fisik diperusahaan	Ya	30	71.5
	Tidak	9	21.4
	Tidak Tahu	3	7.1
	Jumlah	42	100

Kemudian kita lihat salah satu solusi atas penanganan limbah dari para *entrepreneur*. Hampir ada keseimbangan di sini yaitu sekitar 30 orang atau 71,5% dari 42 responden menyatakan ya, 9 orang atau 21,4% menyatakan tidak, dan hanya 3 orang atau 7,1% yang menyatakan tidak tahu.

- e. Mitigasi adalah dominan nonfisik di perusahaan

Pernyataan	Options	F	%
Mitigasi adalah dominan nonfisik di perusahaan	Ya	22	52.4
	Tidak	15	35.7
	Tidak Tahu	5	11.9
	Jumlah	42	100

Opsi berikutnya adalah adanya lahan penampungan limbah. Dominan penampungan di sini kebanyakan para *entrepreneur* telah memiliki penampungan limbah. Ini artinya mereka telah peka terhadap lingkungan. Kondisi ini ditunjukkan pada hasil kuesioner mendapatkan sejumlah 22 orang atau 52,4% dari 42 menyatakan ya, 15 orang atau 35,7% menyatakan tidak, dan hanya 5 orang atau 11,9% yang menyatakan tidak tahu.

4. Dampak Sosial-Ekonomi dan Kebijakan Mitigasi Banjir

Kondisi Pekalongan Utara sebelum datangnya rob sepuluh tahun sebelumnya masih stabil. Artinya belum ada tanda-tanda akan terjadinya bencana rob seperti sekarang ini. Pada masa-masa sebelumnya daerah Pekalongan Utara dibilang aman. Ketika terjadi banjir, ini dianggap sebagai hal biasa karena airnya akan hilang sendiri seiring berjalannya waktu.

Banjir yang menggenangnya saat itu belum dianggap sebagai rob. Hal ini berdasar pada hasil penelitian yang menyebutkan daerah berdekatan dengan bibir pantai sepuluh tahun sebelumnya adanya banjir bukan berasal dari rob (Sitanggang, W., & Sunarti, S., 2013). Kelurahan Bandengan adalah kelurahan pertama

di wilayah pesisir yang mengalami masalah rob dan banjir yang merusak tempat bermukim mereka sejak 10 tahun terakhir.

Seperti yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (2015), sejak tahun 2007 hingga tahun 2010 tingkat curah hujan di Pekalongan Utara bertambah setiap tahunnya. Sejak tahun 2004, wilayah yang terkena rob yang melanda lokasi ini bertambah luas setiap tahun. Kerusakan-kerusakan yang terlihat jelas di bangunan hunian warga dan kondisi sarana prasarana jalan adalah salah satu dampak dari bencana yang terjadi di wilayah ini.

Secara ekonomi kondisi kehidupan masyarakat di daerah ini tergolong pas-pasan . Hal ini didukung dari penghasilan warga rata-rata di bawah Rp1.000.000/ bulan. Dari pendapatan yang 'pas-pasan' ini terlihat warga yang tidak memiliki daya untuk melakukan melakukan upaya sebagai wujud adaptasi terhadap kondisi yang terjadi. Ini sebagaimana di salah satu RW IV Kelurahan Bandengan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka warga melakukan bentuk upaya yang berbeda-beda. Upaya penanganan yang sudah dilakukan warga dianalisis menggunakan analisis crosstab untuk mengetahui hubungan antara upaya dengan kondisi yang terjadi saat ini. Upaya tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap bencana rob dan banjir yang melanda wilayah pesisir saat ini.

Bentuk adaptasi yang sudah dilakukan warga berupa adaptasi reaktif dan adaptasi proaktif. Bentuk adaptasi ini dialami oleh semua kalangan yang bukan

hanya pedagang. Adaptasi reaktif yang dilakukan warga Bandengan adalah dengan meninggikan bagian depan rumah saja yang dapat berguna juga sebagai tanggul sementara. Sedangkan adaptasi proaktif yang akan dilakukan adalah pembuatan geotube di sepanjang garis pantai sebagai penghalang ombak atau pasang yang masuk ke daratan.

Namun demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa warga lebih banyak memilih untuk pasrah dan tidak melakukan upaya penanganan apa pun. Hal tersebut disebabkan karena dengan kondisi ekonomi yang rendah dan jenis kerusakan pada atap dan lantai rumah, maka warga lebih memprioritaskan kebutuhan pangan daripada harus memperbaiki tempat bermukim mereka yang sudah rusak.

Mitigasi termasuk upaya untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Bangunan tahan bencana adalah bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga bangunan tersebut mampu bertahan atau mengalami kzerusakan yang tidak membahayakan apabila bencana yang bersangkutan terjadi. Menurut Yusup, Y. (2014) teknis mitigasi dapat direkayasa sesuai prosedur perancangan struktur bangunan yang telah memperhitungkan karakteristik aksi dari bencana. (2) Mitigasi Nonstruktural merupakan upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya tersebut di atas. Mitigasi ini bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan seperti Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU PB), Perda desain tata

ruang kota, *capacity building* masyarakat, bahkan sampai menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat.

Kebijakan nonstruktural yang lain meliputi legislasi, perencanaan wilayah, dan asuransi. Kebijakan non struktural ini lebih berkaitan dengan kebijakan yang bertujuan untuk menghindari risiko yang tidak perlu dan merusak. Tentu, sebelum perlu dilakukan identifikasi risiko terlebih dahulu. Penilaian risiko fisik meliputi proses identifikasi dan evaluasi tentang kemungkinan terjadinya bencana dan dampak yang mungkin ditimbulkannya.

Kebijakan mitigasi baik yang bersifat struktural maupun yang bersifat nonstruktural harus sinergi antara satu dengan yang lainnya (Tondobala, L., 2012). Menurutnya pemanfaatan teknologi untuk memprediksi, mengantisipasi dan mengurangi risiko terjadinya suatu bencana harus diimbangi dengan penciptaan dan penegakan perangkat peraturan yang memadai yang didukung oleh rencana tata ruang yang sesuai. Sering terjadinya peristiwa banjir dan tanah longsor pada musim hujan dan kekeringan di beberapa tempat di Indonesia pada musim kemarau sebagian besar diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum dan pemanfaatan tata ruang wilayah yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Teknologi yang digunakan untuk memprediksi, mengantisipasi dan mengurangi risiko terjadinya suatu bencana pun harus diusahakan agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan pada masa mendatang (Tondobala, L., 2012).

5. Proses-proses Mitigasi Bencana Rob

Gambaran tentang Pekalongan Utara dari sisi kependudukan pada masa sebelum rob tidak jauh beda dengan sekarang. Pekalongan Utara termasuk daerah dengan penduduk padat dengan luas 1.488 km² atau 33,3 persen dari seluruh luas wilayah Kota Pekalongan. Kepadatan penduduk Pekalongan Utara menurut catatan BPS sejumlah 4.822 jiwa/km² dan jumlah secara keseluruhan penduduknya mencapai 79.469 jiwa (BPS Kota Pekalongan, 2016).

Semula Kecamatan Pekalongan Utara terdiri atas 9 kelurahan yaitu Panjang Wetan, Kandang Panjang, Kraton Lor, Dukuh, Bandengan, Pabean, Krapyak Lor, Krapyak Kidul, dan Degayu. Namun sejak tanggal 22 Januari 2008, kelurahan Panjang Wetan dimekarkan menjadi 2 kelurahan menjadi Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Panjang Baru. Kemudian pada 1 Januari 2015 bersamaan dengan penggabungan beberapa kelurahan di Pekalongan Utara mengalami perubahan dan kini menjadi 7 kelurahan. Tujuh kelurahan pasca merger tersebut adalah: (1) Krapyak, (2) Kandang Panjang (3) Panjang Wetan (4) Padukuhan Kraton, (5) Degayu, (6) Bandengan dan (7) Panjang Baru.

Kondisi Pekalongan Utara sebelum datangnya rob sepuluh tahun lalu sebelumnya masih stabil. Artinya belum ada tanda-tanda akan terjadinya banjir rob seperti sekarang ini. Pada masa-masa sebelumnya daerah Pekalongan Utara dibilang aman. Ketika terjadi banjir, ini dianggap sebagai hal biasa karena airnya akan hilang sendiri meresap masuk ke dalam tanah. Hal ini sebagaimana dikatakan seorang warga Panjang Wetan

sebelum tahun 2009 di dekat rumahnya yang ditanami pohon mangga dapat berbuah (Wawancara Bapak Ade, 2/07/2018). Setiap musim mangga akan panen kemudian dinikmati dan dibagikan kepada tetangganya. Ia mengatakan banjir yang menggenangi depan rumahnya saat itu belum dianggap sebagai rob (Mutiarawati, T., 2017). Hasil risetnya menyebut daerah yang berdekatan dengan bibir pantai sepuluh tahun sebelumnya adanya banjir bukan berasal dari rob. Menghadapi problema banjir rob ini ada beberapa langkah proses terkait mitigasi:

a. Jaring Aspirasi oleh Wakil Rakyat

Mengetahui informasi adanya banjir rob yang semakin meresahkan warga para anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekalongan dan Pusat mengadakan silaturahmi. Sejumlah warga di Kecamatan Pekalongan Utara dan Barat menyampaikan keluhan terkait dampak banjir rob. Acara jaring aspirasi masyarakat atau reses dari Anggota DPRD Kota Pekalongan membaca perasaan warga. Nusron Hasa dari anggota DPRD Kota Pekalongan menyatakan, persoalan dampak rob atau meluapnya banjir rob memang menjadi persoalan yang sedang perhatian pemerintah saat ini. Pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran untuk penanganan rob di wilayah Kota Pekalongan di bagian utara.

Salah satu anggota DPR RI yang diwakili Fraksi PKB Bisri Romly di Gedung Aswaja Kota Pekalongan juga menyampaikan persoalan banjir rob sudah menjadi perhatian pemerintah pusat. Hal

tersebut dibuktikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp500 miliar lebih guna penanganan dampak rob di wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Selain menyampaikan masalah rob, persoalan yang lain juga disampaikan dalam forum tersebut seperti bantuan masyarakat untuk bidang pendidikan, sosial dan kesejahteraan untuk rakyat. Anggota dewan ini juga memberi langkah-langkah dalam memitigasi bencana.

b. Diskusi Para Komunitas

Proses mitigasi selanjutnya berasal dari diskusi komunitas lokal Kota Pekalongan. Suara Merdeka mengungkap belasan Komunitas yang ada di Kota Pekalongan memadati Aula Museum Batik, untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam rangka penanganan rob yang melanda Kota Pekalongan, (SM. 16/7/2018). Sekitar 19 Komunitas yang hadir di aula museum tersebut membahas peran masyarakat termasuk peran komunitas dalam mengurangi dampak bencana rob. Salah satu anggota komunitas bernama Arie Dacosta, perwakilan dari Komunitas Fotografi Indonesia Wilayah Pekalongan menyampaikan bahwa rob yang melanda Pekalongan sudah terjadi bertahun-tahun dan masyarakat dituntut aktif dalam mengurangi dampak bencana tersebut. Acara juga dihadiri oleh Lembaga Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan guna mensinergikan pencanaan aksi bersama terkait penanganan rob yang melanda Pekalongan.

Chong J. dkk. (2015) menyampaikan selama ini bencana banjir rob hanya dilihat sebagai persoalan tergenangnya wilayah permukiman yang hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah. Menurutnya rob tidak hanya persoalan genangan air, tetapi juga berdampak pada sektor-sektor lainnya seperti gangguan pernafasan, penyakit kaki gajah dan gangguan kejiwaan. Selain itu sektor pendidikan juga terdampak karena ada beberapa sekolah rusak, serta berdampak pada sisi ekonomi warga. Menurutnya, rob membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian, dikarenakan lahan pertanian dan perkebunan rusak.

c. Aksi para *Entrepreneur*

Baik pemerintah dan penduduk di sekitar Pekalongan Utara pasca terjadinya rob terlihat revitalisasi kondisi fisik yang ada. Ada sarana yang langsung diperbaiki seperti rumah, jalan desa dan tempat ibadah. Umumnya rumah terdekat dengan dampak rob langsung diperbaiki, seperti di Panjang Baru dan Bandengan. Berdasarkan pengamatan peneliti terdapat sejumlah rumah relatif baru direvitalisasi. Revitalisasi tersebut ada yang sebagian hanya halaman depan rumah saja, dalam rumah atau bagian tertentu. Ada pula revitalisasi seluruhnya yaitu dengan membongkar semua bangunan rumah kemudian dibangun dari awal.

Sementara itu para *entrepreneur* terdampak rob seperti para wirausaha kecil, menengah dan besar ini berlainan. Ada tiga aksi yang dilakukan oleh ketiga

golongan *interpreneur*, *pertama* bertahan dengan merenovasi toko. Aksi ini dilakukan oleh sebagian besar pedagang atau wirausahawan. Para wirausahawan cenderung bertahan di lokasi tempat tinggal karena merasa telah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Asumsi mereka jika pindah maka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi ada sesuatu hal yang sulit bila pindah lokasi. *Kedua* bertahan dengan pindah lokasi. Aksi kedua ini dilakukan wirausahawan kecil yang tidak membutuhkan adaptasi lama misal pedagang warungan, makanan ringan dan sejenisnya. Alasan pindah lokasi karena untuk melindungi perabot atau peralatan memasak. Selain memang harus pindah lokasi sebab kondisi pasca banjir rob toko maupun rumah terasa tidak nyaman. Para wirausahawan yang pindah lokasi mencari daerah yang relatif aman seperti daerah Kedungwuni, Pekalongan Selatan dan Kajen. *Ketiga* bertahan tetapi dengan mengurangi aktivitas bisnis. Aksi ini dilakukan oleh sebagian kecil wirausahawan seperti pedagang ikan, perajin batik dan sejenisnya. Para wirausahawan yang cenderung mengurangi aktivitas bisnisnya karena dikawatirkan saat datangnya banjir barang-barang tak bisa diselamatkan. Dengan mengurangi aktivitas ini maka terasa ringan untuk memindahkan peralatan usahanya.

C. Penutup

Simpulan dari pembahasan di atas yaitu bahwa mitigasi banjir rob perspektif *entrepreneur* di Pekalongan

Utara dengan criteria usia usaha lima tahun lebih sebanyak 71,43% produksinya menghasilkan sisa yang didukung oleh sejumlah 47,62% pengolahan sampah dan 73,81% lahan untuk penampungan sampah. Tentang pemahaman mitigasi banjir rob sebanyak 73,81% memiliki instrumen perhatian terhadap lingkungan sekitar dengan dukungan sistem drainase. Sejumlah 83,3% dan sejumlah 42,86% *entrepreneur* yang melakukan perubahan lahan perusahaan selama 5 tahun. Ada sejumlah pelaku usaha atau *entrepreneur* 66,67% perusahaan punya *planning* mitigasi atas bahaya banjir rob, hanya sejumlah 9,52% perusahaan punya mitra dalam penanganan banjir rob dan 57,14% perusahaan punya langkah atas penanganan banjir rob.

Kemudian dampaknya ada dua hal yaitu (1) dampak ekonomi yang semakin memperparah dari sisi pendapatan dan atribut materi lainnya, (2) dampak social yang mengharuskan tiga hal ketahanan, *pertama* bertahan dengan merenovasi tokonya. *Kedua* bertahan dengan pindah lokasi usaha dan rumahnya. *Ketiga* bertahan dengan mengurangi aktivitas bisnisnya.

D. Referensi

- Adi Sindhupatty, B. (2012). Model dan Media Pembelajaran Mitigasi Bencana Lahar Dingin Menggunakan Metode Active Learning. *Doctoral dissertation*. Program Studi Sistem Informasi FTI-UKSW.
- Bakti, L. M. (2010). Kajian Sebaran Potensi Rob Kota Semarang dan Usulan Penanganannya. *Doctoral dissertation*. Magister Teknik Sipil.
- Blackett, P., & Hume, T. (2007). Community Involvement in Coastal Hazard Mitigation: Some Insights into Process

and Pitfalls. *New Zealand Planning Institute, Palmerston North 27th-30th March.*

- Cahyadi, A., Marfai, M. A., Mardiatno, D., & Nucifera, F. (2017). *Pemodelan Spasial Bahaya Banjir Rob Berdasarkan Skenario Perubahan Iklim dan Dampaknya di Pesisir Pekalongan.*
- Chong, J., Willetts, J., Suartana, N., & Hidayat, L. (2015). *Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan untuk Kota dan Kota Kecil di Sumatra, Indonesia–Pilihan Tema-tema Kunci untuk Pemerintah Daerah dan Pengambil Kebijakan. Makalah Singkat.*
- Desmawan, B. T., & Sukamdi, S. (2012). *Adaptasi Masyarakat Kawasan Pesisir terhadap Banjir Rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Jurnal Bumi Indonesia, 1(1).*
- Drestanto, A. S., Indarjo, A., & Helmi, M. (2014). *Pemetaan Area Genangan Banjir Pasang di Kawasan Lahan Budidaya Air Payau Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Journal of Marine Research, 3(4), 439-446.*
- Dodman, D., & Satterthwaite, D. (2008). *Institutional Capacity, Climate Change Adaptation and The Urban Poor. IDS Bulletin, 39(4), 67-74.*
- Drestanto, A. S., Indarjo, A., & Helmi, M. (2014). *Pemetaan Area Genangan Banjir Pasang di Kawasan Lahan Budidaya Air Payau Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Journal of Marine Research, 3(4), 439-446.*
- Faiqoh, F., Sulistyani, S., & Budiyo, B. (2017). *Analisis Hubungan Tingkat Kerentanan Penduduk Wilayah Pantai Kota Semarang Akibat Banjir Rob dengan Status Kesehatan. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), 5(5), 649-648.*

- Grotberg, E. H. (1997). The International Resilience Research Project.
- Hapsoro, A. W., & Buchori, I. (2015). Kajian Kerentanan Sosial dan Ekonomi terhadap Bencana Banjir (Studi Kasus: Wilayah Pesisir Kota Pekalongan). *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(4), 542-553.
- Heryani, N. (2008). Sistem Pemanenan Air Hujan (Rainwater Catchment Systems): Dalam Upaya Pengelolaan Banjir di Daerah Perkotaan. *Buletin DAS*, 4(4).
- Indonesia, U. U. R. (2003). *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Imtikhanah, A. (2016). Pengembangan Minat Wirausaha Peserta Didik melalui Program Enterpreneur di SMP Negeri 11 Surabaya. *Doctoral dissertation*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Isaak, R. (1998). *Green Logic: Entrepreneurship, Theory and Ethics*. Sheffield, UK: Greenleaf Publishing; West Hartford, CT: Kumarian Press.
- Kasbullah, A. A., dan Marfai, M. A. (2014). Pemodelan Spasial Genangan Banjir Rob dan Penilaian Potensi Kerugian pada Lahan Pertanian Sawah Padi Studi Kasus Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. *Geo Edukasi*, 3(2).
- Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). *Tata Ruang Air*. Penerbit Andi.
- Lei, Y., Yue, Y., Zhou, H., & Yin, W. (2014). Rethinking The Relationships of Vulnerability, Resilience, and Adaptation from A Disaster Risk Perspective. *Natural hazards*, 70(1), 609-627.

- Mardiatno, D., Malawani, M. N., Annisa, D. N., & Wacano, D. (2017). Review on Tsunami Risk Reduction in Indonesia Based on Coastal and Settlement Typology. *The Indonesian Journal of Geography*, 49(2), 186-197.
- Marfai, M. A., & Cahyadi, A. (2017). Pemetaan Partisipatif untuk Estimasi Kerugian Akibat Banjir Rob di Kabupaten Pekalongan.
- Marfai, M. A. (2014). Peran Geomorfologi Kebencanaan dalam Pengelolaan Wilayah Kepesisiran di Indonesia.
- Marfai, M. A. dkk. (2012). *Pemodelan Spasial Bahaya Banjir Rob Berdasarkan Skenario Perubahan Iklim dan Dampaknya di Pesisir Pekalongan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Marfai, M. A., & Cahyadi, A. (2017). Dampak Bencana Banjir Pesisir dan Adaptasi Masyarakat Terhadapnya di Kabupaten Pekalongan.
- Maryani, E. (2010). Model Pembelajaran Mitigasi Bencana dalam Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Geografi Gea*, 10(1).
- Mufidah, Y. A. (2013). Efektivitas Kerja Pegawai dalam Penggunaan Sistem Kearsipan Elektronik di Kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 1(3).
- Moko P. Astamoen. (2005). *Entrepreneurship dalam Perspektif Kondisi Bangsa Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Mutiarawati, T. (2017). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*, 1(2), 48-62.
- Nugroho, S. H. (2013). Prediksi Luas Genangan Pasang Surut (Rob) Berdasarkan Analisis Data Spasial di Kota

Semarang, Indonesia. *Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi*, 4(1), 71-87.

Nirwansyah, A. W. (2013). Damage Exposure Estimation Due to Coastal Flood and Sea Level Rise in Pekalongan Municipal Using Participatory GIS Method to Support Spatial Planning. *Doctoral dissertation*. Universitas Gadjah Mada.

Nurcholis, A. L. (2010). Kawasan Perak Terancam Banjir Rob. Sumber: <http://nasional.news.viva.co.id>.

Sitanggang, W., & Sunarti, S. (2013). Upaya Masyarakat dalam Penanganan Tempat Bermukim di Lingkungan Pesisir di Kelurahan Bandengan Pekalongan Utara. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 2(4), 905-913.

Tondobala, L. (2012). Pemahaman tentang Kawasan Rawan Bencana dan Tinjauan terhadap Kebijakan dan Peraturan Terkait. *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur*, 3(1).

Yusup, Y. (2014). Hidup Bersama Risiko Bencana: Konstruksi Ruang dalam Perspektif Ruang Relasional. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 25(1), 59-77.



Kiat Sukses Berbisnis Batik Pekalongan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Muhamad Masrur, M.E.I.
masrurshimei@gmail.com

A. Pendahuluan

Pekalongan sudah dikenal dengan industri batiknya, bahkan jangkauan pasarnya sudah merambah ke berbagai daerah di Indonesia sampai mancanegara seperti Amerika, Australia, Eropa, Timur Tengah, Jepang, Korea dan Singapura. Sampai saat ini industri batik menjadi bisnis yang cukup menjanjikan, sehingga muncul pengusaha-pengusaha baru di bidang industri batik. Kemunculan generasi pengusaha baru ini menambah jumlah deretan pesaing, yang menjadikan kompetisi pangsa pasar menjadi lebih sempit, apalagi pengusaha baru dengan modal besar.

Persaingan antar pengusaha batik pun terjadi, pengusaha batik yang tidak mampu mengikuti arus persaingan banyak yang mengalami gulung tikar, baik terjadi karena faktor strategi harga, di mana salah satu pengusaha menentukan harga yang lebih mahal dengan kualitas yang sama, oleh pengusaha lain ditawarkan dengan harga yang lebih murah, strategi ini membuat pengusaha yang bermodal sedikit akan mengalami kerugian karena tidak mampu memproduksi lagi. Gulung tikar bisa juga terjadi bila sang pengusaha tidak mampu berinovasi dalam mengemas model produknya, monoton, atau begitu-begitu

saja, tanpa adanya perubahan menyesuaikan dengan keinginan pasar, sehingga produk bisa jadi tidak diminati lagi oleh konsumennya, akibatnya produk batik yang diproduksi tidak laku.

Berbicara asal muasal lahirnya pengusaha batik di Pekalongan bila ditelusuri jejaknya mempunyai latar belakang sejarah yang berbeda-beda. *Pertama*, pengusaha batik sukses yang mengawali usahanya karena warisan usaha orangtuanya, artinya orangtuanya seorang pengusaha batik, kemudian diturunkan keahliannya tersebut kepada anaknya, walaupun tidak semua anak pengusaha batik meniti karier menjadi pengusaha batik juga. *Kedua*, pengusaha batik yang meniti karier usahanya dengan menjadi karyawan atau buruh terlebih dulu di salah satu pengusaha batik lainnya yang sudah mapan, setelah ia memiliki *skill* yang mahir dalam perbatikan, kemudian ia membuka usaha batik sendiri. *Ketiga*, pengusaha batik yang mengawali karier usahanya dari looper, atau menjualkan produk batik dari salah satu pengusaha batik ke pasar-pasar, kemudian setelah mempunyai modal dan pengalaman yang cukup, lalu ia mendirikan usaha batik dan menjualnya sendiri. *Keempat*, pengusaha batik yang sebenarnya belum banyak ilmunya tentang usaha batik, namun karena mempunyai modal finansial yang cukup banyak, ia mencoba membuka usaha batik dibantu oleh tenaga ahli batik dalam menjalankan bisnisnya, dan pengusaha tersebut sambil belajar seiring berjalannya waktu ia pun menjadi pengusaha batik yang mumpuni.

Dari keempat macam latar belakang pengusaha ini semuanya mempunyai risiko kerugian bila tidak mempunyai semangat kerja yang tinggi dan tidak

mempunyai manajemen strategi pengembangan usaha batik yang jitu. Oleh karena itu untuk menjadi pengusaha yang tetap eksis dalam berbagai situasi dan kondisi, serta sukses dalam menghadapi persaingan, tentunya dibutuhkan semangat kerja yang tinggi yang berakar dari dirinya, menular ke lingkungan perusahaannya ditambah dengan melakukan strategi pengembangan usaha yang biasanya tidak dimiliki oleh pengusaha lain.

Di sisi lain seorang pengusaha muslim mempunyai tanggung jawab moral bahwa segala usahanya harus diikuti dengan etika bisnis yang benar menurut syariat Islam, jangan hanya gara-gara persaingan belaka, membuat pengusaha berlomba-lomba menguasai pangsa pasar dengan melakukan berbagai cara yang penting mendapatkan profit atau memaksimalkan laba tanpa memperdulikan aturan syariat atau etika bisnis Islam.

B. Pembahasan

Motivasi dalam bekerja atau terkadang dibunyikan dengan kata etos sangat penting, biasanya kata etos (*ethos*) dalam bahasa Yunani dapat diartikan sebagai karakter, watak, kepribadian, sikap, dan keteguhan. Etos sangat dipengaruhi oleh pemikiran, budaya dan kebiasaan yang diyakini. Etos bisa dipunyai oleh individu dan kelompok masyarakat (Toto Tasmara, 2002: 15). Arti kerja menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah kegiatan melakukan sesuatu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994: 488). Tentu saja makna kerja tersebut adalah kerja yang sengaja dilakukan mempunyai tujuan dan motif tertentu dan mendapatkan penghasilan atau upah baik materil maupun nonmateril (Ahmad Janan Asifudin, 2004: 27). Islam memiliki konsep

etos kerja yang unik, berbeda dengan konsep lainnya. Sebagaimana pendapat Toto Tasmara Etos kerja seorang Muslim merupakan upaya sungguh-sungguh dengan menggerakkan, mengerahkan tenaga, pikiran, harta, dan zikirnya dalam rangka memposisikan dirinya sebagai hamba yang bisa menjadi khalifah dan sebaik-baik umat (Toto Tasmara, 2004: 25). Dalam pandangan Islam, bekerja adalah kewajiban sebagaimana kewajiban bersuci sebelum melakukan shalat, sebagaimana dalam kaidah fiqih mengatakan bahwa jika sesuatu kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itupun dihukumi wajib. Seseorang diwajibkan untuk mempertahankan hidupnya dengan makan dan minum, untuk bisa membeli makan dan minum ia harus mempunyai uang dan agar mempunyai uang ia harus berusaha untuk bekerja.

Di dalam bekerja, Islam menganjurkan agar dalam melakukan segala sesuatu hendaknya dilakukan dengan *itqan* yakni sungguh-sungguh dan profesional sehingga memberikan hasil yang maksimal, di sinilah perlunya bekerja diiringi dengan tekad etos kerja yang tinggi.

Di dalam buku "*Membudayakan Etos Kerja*" Toto Tasmara (2002: 73) memberikan pandangannya mengenai karakter dalam bekerja seorang muslim yang kalau diringkas adalah sebagai berikut: sangat menghargai waktu, mempunyai akhlak dan jujur, memiliki pendirian yang kuat, disiplin, berani menghadapi tantangan, percaya diri, kreatif, bertanggung jawab, berorientasi masa depan, mempunyai insting bertanding, selalu semangat dalam belajar, tangguh pantang menyerah, produktif, menjalin silaturahmi (*networking*), dan semangat perubahan.

1. Menghargai Waktu

Pertama yang harus dimiliki oleh pengusaha batik adalah menghargai waktu. Ada berbagai cara pengusaha batik dalam mengatur waktunya. Dalam menggunakan waktu, pengusaha batik di Pekalongan mempunyai standar waktu yang berbeda-beda, ada yang bekerja dari mulai jam 07.00 pagi, ada yang mulai dari jam 10.00 pagi, dan waktu selesainya ada yang jam 15.00 sore sampai ada yang jam 21.00 baru selesai (Wawancara dengan pemilik Batik Novi, 2019). Namun berdasarkan penelitian wawancara, pada umumnya standar jam kerja mayoritas UMKM batik ini adalah 8 jam serta diberikan waktu istirahat yaitu pukul 12.00 WIB untuk istirahat, sholat, dan makan. Selain itu, pengusaha batik biasanya memiliki *time-line* atau alur yang biasanya dilakukan untuk hari ini juga dibarengi dengan *planning*. Salah satu pengusaha batik yang telah diwawancarai ia mengatakan bahwa setiap hari ia mengatur waktu dengan baik, sebelum melakukan aktivitas beliau selalu merencanakan apa saja yang akan dikerjakan beliau hari ini. Selain itu, beliau memberikan waktu kerja standar yaitu 8 jam, mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 serta memberikan waktu istirahat di pukul 12.00 untuk istirahat, sholat, dan makan (Wawancara dengan Eddywan pemilik Batik Larissa, 2019). Pada umumnya pengusaha di Pekalongan terutama daerah Buaran waktu kerja dimulai dari hari Sabtu sampai Kamis, libur di hari Jum'at, sehingga hari Jum'at bisa digunakan untuk acara bersosialisasi dengan masyarakat seperti acara walimahan, tahlilan, pengajian setiap jum'atan. Untuk toko batik ada yang tutupnya hari ahad namun

biasanya tidak ada tutupnya selama satu minggu, kecuali hari besar Islam, hanya saja pelayan toko libur sesuai sipnya masing-masing.

Dilihat dari sisi ajaran Islam memang waktu merupakan dimensi yang sangat berharga dan tidak bisa terulang, tak akan kembali dan tidak bisa ditebus walaupun dengan membayar harta sebanyak apapun, karena waktu adalah nyawanya kehidupan, dipakai habis tidak dipakai juga habis, sehingga waktu harus digunakan sebaik-baiknya dalam mengarungi kehidupan termasuk dalam bekerja.

Rasulullah Saw. bersabda:

اَعْتَبُوا خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ،
وَعِنَاكَ قَبْلَ فُقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

Artinya: “Jagalah lima perkara sebelum (datang) lima perkara (lainnya). Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu dan hidupmu sebelum matimu.” (HR Nasai dan Baihaqi)

Hadis tersebut mengingatkan kita akan pentingnya waktu, agar supaya bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai melewatkan waktu yang sudah diberikan. Biasanya moto bagi seorang pengusaha adalah *time is money*, waktu adalah uang, semakin banyak waktu yang digunakan untuk bekerja maka semakin banyak produktivitas dan semakin banyak penghasilan yang diperoleh. Rasulullah Saw. sendiri

pernah mendoakan kepada umatnya *Ya Allah berkatilah umatku di waktu paginya*. Ini artinya siapa yang mampu memulai aktivitas yang produktif dari sejak pagi maka akan memperoleh keberkahan dalam usahanya, karena semakin pagi memulai usaha semakin lama durasi waktu yang bisa dimanfaatkan.

2. Memiliki Kejujuran

Sifat yang harus dimiliki oleh pengusaha adalah kejujuran. Salah satu ciri-ciri pengusaha beretos kerja tinggi menurut Asifudin adalah kejujuran. Kejujuran adalah kunci dari kesuksesan. Jika seorang penguasaha tersebut selalu jujur dalam usahanya, maka pembeli atau pelanggannya pasti akan loyal terhadapnya.

Berdasarkan wawancara dengan pengusaha batik di Pekalongan kejujuran merupakan pondasi yang utama baik itu dengan menjaga kualitas, memberikan pelayanan terbaik, sehingga para pembeli menjadi loyal. Pengusaha batik yang menjunjung tinggi kejujuran dengan menjaga kualitas salah satunya adalah Pak Eddywan. Menurut beliau “Ada harga, ada kualitas”. Beliau juga mempercayakan toko kepada karyawannya. Jika ada salah satu karyawannya yang tidak jujur dan beliau mengetahuinya, maka beliau tidak segan untuk mengeluarkan karyawannya tersebut (Wawancara dengan Eddywan pemilik Batik Larissa, 2019). Demikian juga keterangan dari pemilik Batik Kampus bahwa kejujuran dalam harga dan kualitas juga penting, harga yang ia terapkan sesuai dengan kualitas barangnya jika ada barang yang memang barang pasaran ia menerapkan harga normal pasar tetapi

dengan harga terendah. Jika kualitas barang tersebut lebih baik maka harganya sesuai dengan kualitasnya (Wawancara dengan pemilik Batik Kampus, 2019).

Kejujuran merupakan benteng yang menyelamatkan pelakunya dari neraka, dan memberikan ketenangan batinnya dari ketakutan yang muncul sebagai ancaman baik dari intenal maupun internal, sehingga dengan kejujuran pikiran menjadi bersih, bisa berpikir dengan jernih, menjual dengan penuh ketenangan, melayani dengan senyuman tanpa was-was, dan keberkahan akan mengikutinya. Namun bila menjual dengan tipu daya maka hati akan merasa khawatir selalu dihantui oleh perasaan bersalah walaupun memperoleh banyak keuntungan namun tidak barakah, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاذِبَةُ
مَنْقَعَةٌ لِّلسَّلْعَةِ مَمْحُوقَةٌ لِّلْكَسْبِ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ الْبُرْكَاءُ

Artinya: “Sumpah palsu (bombastis sehingga menjadikan laku barang yang dijual) mendatangkan keluasan tetapi menghilangkan pekerjaan.” Ibnu Ja’far berkata: “Menghapus keberkahan.”

3. Memiliki Pendirian Kuat (Istiqomah)

Sikap yang perlu dimiliki oleh pengusaha berikutnya adalah berpendirian kuat atau istiqomah. Berdasarkan observasi dan penelitian kepada pengusaha batik yang ada di Pekalongan, kiat untuk menjadi pengusaha sukses salah satunya yaitu tetap konsisten menjual atau menawarkan. Selain itu, juga harus

memperbaharui ilmunya secara berkala agar tak tertinggal informasi dan tetap istiqomah untuk menjalankan usahanya walaupun dalam keadaan sepi atau ramai. Berdasarkan wawancara dengan pemilik Batik Sul & Mit yaitu Mifta Ulha dan Sulaiman. Mereka merintis hingga menjalankan usahanya dengan menjaga konsistensi atau keistiqamahan dalam berbisnis. Sejak toko batik milik mereka terbakar, mereka memulai lagi dengan stok barang yang ada di rumahnya. Selain itu, mereka belajar sedikit demi sedikit untuk mengembangkan usahanya dengan mengikuti seminar wirausaha dan selalu memperbarui ilmu pemasaran *online*-nya secara konsisten dan berkala (Wawancara dengan Mifta Ulha pemilik Batik Sul & Mit, 2019). *Entrepreneur* muslim lainnya yang menunjukkan sikap konsisten atau istiqamah yaitu Abdul Ghani pemilik Batik Kampus. Ia belajar ilmu pemasaran ke teman-teman atau langganannya yang menjalankan *online shop* batik. Sehingga ia juga mengembangkan usahanya berdasarkan analisis usahanya secara berkala dan mengevaluasi kerjanya. Kemudian diperbaiki dengan sedikit demi sedikit secara konsisten (Wawancara dengan M. Abdul Ghani pemilik Batik Kampus, 2019).

Apa pun bentuk usaha dan pekerjaan bila menginginkan kesuksesan harus memiliki kepribadian yang kuat. Istiqamah atau konsisten bisa diibaratkan membangun sebuah gedung, maka tidak bisa *bim salabim* langsung jadi, namun butuh waktu, tenaga dan pikiran yang tidak terputus-putus sampai gedung tersebut jadi dan bisa disinggahi. Rasulullah Saw. juga bersabda:

سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ لَنْ يُدْخَلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، وَأَنَّ أَحَبَّ
الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

Artinya: “Tetaplah dalam kebenaran dan bersikaplah yang lurus. Ketahuilah, bahwasanya amalan seseorang tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Dan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit.” (HR Bukhar dan Muslim)

Dari hadis tersebut kita mengerti bahwa untuk meraih kesuksesan harus lurus, fokus, istiqamah, walapun dilakukan sedikit demi sedikit yang penting terus menerus dan langgeng, sampai pada tujuan yang diimpikan dan meraih kesuksesan.

4. Memiliki Kedisiplinan

Selanjutnya sikap yang harus dimiliki seorang pengusaha adalah disiplin. Disiplin bisa dikatakan titik awal dalam mencapai kesuksesan bagi seseorang. Disiplin dalam arti Positif, menurut Hodges yaitu sikap seseorang atau kelompok yang mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Di sini, disiplin tidak hanya dilakukan oleh karyawan saja, tetapi oleh para pemilik usaha. Menurut Eddywan, seorang Budayawan dan pemilik usaha Batik Larissa, disiplin dapat dimulai dari diri sendiri. Misal, dengan membuat daftar *to do list* untuk setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Selain itu, disiplinnya seorang pengusaha yaitu dapat menyeimbangkan perannya sebagai pengusaha dan

seorang figur dalam keluarga (Wawancara dengan Eddywan pemilik Batik Larissa, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian, observasi dan wawancara, disiplin dalam kaitan kerja sendiri yaitu suatu bentuk ketaatan karyawan pada peraturan dalam organisasi. Seorang karyawan, dituntut agar tepat waktu, bergerak cepat dan dapat melayani konsumen dengan ramah. Hal tersebut menjadi keuntungan sendiri pada sebuah perusahaan, karena dapat memaksimalkan pelayanan terhadap calon pembeli. Hal tersebut juga yang akan memengaruhi prestasi karyawan, sehingga bisa saja dapat diberikan *reward* oleh bosnya.

Allah Swt. berfirman:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Artinya “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

Dari ayat tersebut menegaskan kepada kita agar segala urusan dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, tidak menunda-nunda, bila satu pekerjaan sudah selesai, segera dilanjutkan dengan melakukan pekerjaan yang mengiringinya, tidak membiarkan pekerjaan menumpuk sehingga urusan tidak bisa diselesaikan dengan baik. Dengan ketepatan pelayanan dan waktu yang dijanjikan hal ini akan membuat hasil pekerjaan menjadi lebih baik, bisa memuaskan kepada semua pihak, termasuk konsumen, kalau konsumen puas maka penjualan akan bisa berlangsung berulang kali.

5. Konsekuensi dan Berani Menghadapi Tantangan

Dalam segala hal pasti ada tantangan, tidak berbeda dengan bisnis batik, tentunya tantangan merupakan hal yang wajar, tantangan yang selalu ada terutama pada usaha batik sekarang ini adalah mengenai kecepatan informasi. Untuk menghadapinya hal tersebut, maka harus diikuti dengan kecakapan dan pemanfaatan terhadap teknologi yang ada. Selain itu, seperti berdasarkan wawancara dengan Asykur karyawan Batik Feno (Asykur, 2019) dalam usaha batik sendiri yang sebagian besar berkecimpung dalam dunia *fashion*, maka para pelaku usaha juga harus mengikuti perkembangan trend atau mode untuk selalu *meg-update* produk-produknya serta melakukan inovasi agar produk yang dihasilkan dapat tetap bersaing di pasar. Dalam sudut pandang sebagai konsumen, tentu kita akan membeli produk yang unggul dengan kualitas yang baik. Dalam hal ini, kualitas dapat memengaruhi kepuasan konsumen pada sebuah produk yang dibelinya. Kepuasan merupakan hasil penilaian konsumen bahwa produk atau pelayanan telah memberikannya kenikmatan di mana tingkat pemenuhan tersebut bisa lebih atau kurang. Konsumen tentu akan merasa puas apabila harapannya terpenuhi atau akan sangat puas jika harapan konsumen tersebut dapat terlampaui (Tjiptono, 2008). Selain itu, pelayanan yang baik serta penghargaan terhadap pembeli juga menjadi poin tambahan bagi seorang konsumen dalam memutuskan apakah akan membeli produk atau tidak.

Dari sini pebisnis batik tidak boleh lari dalam menghadapi tantangan, setiap waktu tantangan datang

silih berganti, pola permintaan pasar selalu berkembang, hal ini harus diikuti dan tidak bisa mengelak, oleh karenanya pebisnis harus selalu menyiapkan jawaban-jawaban dari tantangan yang selalu datang setiap saat ini, bila tidak bisa mengikuti perkembangan, bisa jadi akan ketinggalan dan konsumen akan lari berpindah ke tempat yang lainnya.

6. Memiliki Sikap Percaya Diri

Berikutnya seorang pengusaha harus memiliki sikap percaya pada dirinya sendiri. Dari kegiatan produksi hingga sebuah produk batik sampai kepada konsumen, seorang pengusaha harus berani bertanggung jawab atas produk yang dipasarkannya. Hal tersebut, didasari oleh sikap percaya diri yang memang harus dimiliki oleh seorang pengusaha yang sukses, sebagai salah satu elemen semangat kerja yang menjadi dasar untuk dirinya dalam menjalankan usahanya. Setiap orang yang memiliki semangat kerja yang tinggi bisa dipahami dari perilakunya (Ramadhan, & Ryandono, 2015: 4). Sikap percaya diri oleh para pengusaha akan produknya diinterpretasikan pada penjagaan kualitas produk, inovasi pada produk dan kesetiaan konsumen, hal tersebut berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Eni, salah seorang pegawai Kedai Batik (Eni, 2019). Rasa percaya diri konsumen atas keputusan pembelian merepresentasikan sejauh mana konsumen memiliki keyakinan diri atas keputusannya memilih suatu produk, mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu produk (Astuti, S. W., & Cahyadi, I. G, 2007: 2).

Allah Swt berfirman dalam surat Ali Imran: 139

وَلَا يَهُنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.”

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa manusia dalam berusaha tidak boleh mempunyai sikap pesimis, selalu murung tidak yakin dengan dirinya sendiri, sehingga merasa tidak berdaya dalam menghadapi tantangan, kalau sudah demikian maka kita tidak mau lagi berjuang, dan kalah sebelum perang. Ayat ini jelas akan pentingnya sikap percaya diri tidak mudah menyerah dan selalu berusaha menjadi yang unggul.

7. Memiliki Kreativitas

Melakukan kreativitas pada produk adalah salah satu cara agar suatu perusahaan batik tetap dapat bersaing di pasar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada salah satu pegawai dari Batik Ellna (Dewi, 2019), dalam menentukan strategi pemasaran, inovasi produk yang beragam pada motif dan bahan, dan selalu mengikuti trend adalah beberapa cara yang di antaranya dapat dilakukan oleh seorang pengusaha batik. Batik sendiri merupakan salah satu industri kreatif yang eksistensinya semakin berkembang di mana kegiatannya termasuk pada kegiatan ekonomi kreatif yang merupakan suatu sistem kegiatan manusia yang mencakup kegiatan berkreasi, produksi, distribusi,

pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa yang bernilai kultural, artistik, estetika, intelektual, dan emosional bagi para pelanggan di pasar (Simatupang, T. M., 2008). Dan ekonomi kreatif sendiri digerakkan oleh kreativitas dan inovasi dalam penghasilan suatu produk atau kerajinan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat ar Ra'd ayat 11:

لَهُ مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ ۗ حَافِظُونَهُ ۗ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
 بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Ayat ini memberikan pengertian arti penting sebuah kreativitas, kita tidak bisa merubah sebuah usaha bisnis agar menjadi berkembang lebih besar tanpa didasari adanya berpikir kreatif, karena nasib sebuah usaha akan sangat tergantung dari usaha kreatif dan inovatif yang dilakukan.

8. Memiliki Tanggung Jawab

Menjadi seorang pengusaha tentu memiliki sejumlah tanggung jawab yang harus dipenuhinya. Seperti tanggung jawab pada dirinya sendiri, lingkungan, konsumen, serta karyawannya. Seorang pengusaha, harus memenuhi hak-hak yang menjadi tanggungannya. Berdasarkan wawancara dengan Marlina, karyawan Batik Novi (Marlin, 2019), seorang pengusaha memberikan hak dirinya dengan memperoleh keuntungan, bertanggung jawab kepada karyawannya dengan memberi upah yang layak, tanggung jawab terhadap konsumen dengan memberikan pelayanan jasa dan produknya sesuai antara kualitas dan harganya, bertanggung jawab kepada lingkungan dengan menjaga dan merawat lingkungan dari kerusakan dan pencemaran. Tanggung jawab sosial perusahaan diyakini sebagai suatu program yang dapat mendamaikan hubungan antara kegiatan dengan hak-hak orang sekitar (Sefriani, S., & Wartini, S., 2017: 1-28).

Setiap manusia bertanggung jawab terhadap apa yang diusahakannya sebagai mana firman Allah Swt. dalam surat al-Muddasir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”

Dan firman Allah Swt. dalam surat al-Qashas: 77:

وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan berbuat baiklah (kepada orang lain dan alam) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”

Rasulullah Saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya.”

Dari uraian ayat dan hadis di atas seorang pengusaha harus melakukan upaya-upaya tanggung jawab terhadap semua elemen yang melingkupinya, berusaha untuk berbuat baik terhadap dirinya, karyawan, konsumen, masyarakat sekitar serta alam lingkungan, tidak melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya saja atau egois, sedangkan yang lainnya dirugikan. Oleh karenanya pengusaha harus mau berbagi keuntungan melalui zakat, infaq, sedekah, serta kegiatan sosial lainnya sebagai wujud tanggung jawabnya.

9. Memiliki Orientasi Obsesi Masa Depan

Seorang pengusaha hendaknya mau membangun usahanya tidak hanya berorientasi sekarang saja, namun juga harus diarahkan untuk tujuan masa depan yang jelas. Artinya ketika merintis usaha batik jangan hanya berbisnis untuk sekarang, namun perlu dikelola agar bisnis yang dijalani bisa berumur panjang, bisa turun-temurun sampai anak cucunya dengan cara menjaga

hubungan yang baik saling menguntungkan ke sesama pihak serta menjaga nama baik usahanya dalam rangka meningkatkan produktivitasnya. Batik Mihama, batik Mahkota Agung merupakan sekian dari pengusaha batik yang mewarisi usaha keluarga dan menjadi usaha batik yang tumbuh besar, dan mereka juga mempunyai motivasi bahwa usahanya tidak hanya untuk mencari keuntungan dunia saja, namun mempunyai orientasi masa depan yaitu kebahagiaan akhirat, upaya yang mereka lakukan antara lain dengan mendirikan masjid, menyantuni fakir, miskin, anak yatim dan lain sebagainya, ini merupakan bentuk orientasi masa depan yang cemerlang. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: “Dan di antara mereka ada yang berdoa, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”

Ayat ini seharusnya menjadi orientasi setiap pengusaha batik, yaitu orientasi masa kini dan masa depan, menggapai keuntungan dunia dan kebahagiaan akhirat, keduanya merupakan cita-cita bagi setiap Muslim dalam mengarungi kehidupan, sehingga ayat ini hendaknya selalu dibaca dalam setiap iringan doa yang dipanjatkan.

10. Memiliki Insting Bertanding

Menjadi pemenang dalam perlombaan adalah sebuah impian, namun untuk menjadi *the winner* tentu tidak mudah, ia harus berlatih sungguh-sungguh dengan mengumpulkan kekuatan yang dimiliki, menjaga stamina, mengorbankan waktu dan harta, serta dilakukan dengan keuletan, kegigihan, dan mental yang tak mau menyerah. sedangkan usaha batik pun merupakan sebuah wirausaha yang penuh persaingan, sehingga butuh adanya mental siap untuk bertanding, bukan bertanding dengan cara nekat namun harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan strategi yang tepat (M. Ma'rif Abdullah, 2012.139).

Bertanding di sini diartikan sebagai persaingan yang sehat, berlomba-lomba mendapatkan konsumen dengan cara yang halal. Bertanding dengan cara yang halal yaitu tidak mendzalimi antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain. Berdasarkan penelitian Para pelaku usaha di Pekalongan memiliki insting bertanding, namun mereka tidak memiliki strategi khusus untuk memikirkan bagaimana menangani pesaing. Sebagai contoh ketika penulis melakukan wawancara ke batik Sul & Mit, mereka tidak memikirkan pesaing namun mereka fokus pada usaha apa yang sedang mereka jalani. Jika terlalu fokus pada pesaing justru akan membuat semakin *down* dan tidak bisa memaksimalkan usaha yang seharusnya bisa dilakukannya. Langkah yang tepat untuk menghadapi persaingan pasar yaitu dengan cara meningkatkan kualitas produk agar bisa unggul dibanding batik-batik lain yang sudah ada, kemudian meningkatkan

pelayanan. Meningkatkan kinerja, bukan hanya memikirkan keberadaan pesaing (Wawancara dengan pemilik Batik Sul & Mit, 2019).

Sikap insting bertanding ini sesuai yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 48, Allah berfirman:

.....فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا

كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: "... maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan."

Dari penjelasan ayat tersebut bisa dipahami bahwa manusia perlu usaha agar menjadi lebih baik, dengan memperbanyak berbuat kebaikan, dalam dunia bisnis tentunya sangat urgen. Dengan keinginan menjadi yang terbaik, berarti akan berusaha memperbaiki performance dalam segala hal yang diperlukan untuk menunjanya, misalnya agar nilai produknya bisa mendapatkan ranking teratas, dan selalu mendapatkan posisi yang unggul di benak konsumennya.

11. Memiliki Kecanduan Belajar dan Haus Mencari Ilmu

Memiliki candu terhadap ilmu merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh pelaku usaha agar usaha yang dijalani mampu berkembang. Selalu mencari ilmu-ilmu kewirausahaan agar usaha yang dijalani mampu bertahan di era sekarang, agar usahanya tetap eksis.

Mayoritas pelaku batik di Pekalongan sudah memiliki semangat belajar yang tinggi berkaitan dengan usahanya. Salah satu contohnya yaitu pada batik Larissa, *owner* yang selalu haus akan ilmu (Wawancara dengan pemilik Batik Larissa, 2019). *Owner* tidak menyerah dengan keadaan, justru selalu melakukan perbaikan-perbaikan yang ada di usahanya agar mampu bersaing di era sekarang. Agar paham langkah yang seharusnya diambil ketika usaha mulai surut sehingga kebijakan yang diambil dalam usahanya bisa tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dengan *owner* yang selalu mengikuti seminar-seminar, kajian Islam, gabungan beberapa komunitas yang ada di Pekalongan sehingga bisa saling berbagi pengalaman (Wawancara dengan pemilik Batik Sul & Mit, 2019). Trisno Suhito berpendapat bahwa “dalam berusaha kita juga perlu mengandalkan dan memaksimalkan teknologi, beliau pribadi pernah membeli buku serial “*Disruption*” sebanyak 3 buah. Dengan buku tersebut, dapat dipelajari bagaimana caranya agar tetap bertahan dalam bisnis sehingga tidak terjadi kegagalan di kemudian hari.” (Trisno Suhitho, 2019)

Dalam hal ini Rasulullah Saw. bersabda:

أَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

Artinya: “Tuntutlah ilmu dari buaian (bayi) hingga liang lahat.”

Dan sebagaimana yang disebutkan Imam Baihaqi di dalam kitab *Manaqib as Syafii*, beliau Imam Syafii berkata:

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا
فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Artinya: “Barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu.”

Dari uraian hadis dan maqalah Iman Syafii di atas sejatinya siapa pun, termasuk pebisnis sangat perlu untuk selalu meng-*upgrade* keilmuannya yang kian hari kian canggih, untuk mendapatkan informasi terkini, memperoleh inspirasi dan motivasi dalam menjalankan bisnisnya.

12. Tangguh dan Pantang Menyerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha batik diketahui bahwa mereka dalam menerapkan sikap tangguh dan pantang menyerah ditunjukkan dalam kasus apabila usaha batik mengalami penurunan produksi maupun pendapatan maka upaya yang dilakukan yaitu mempertahankan dengan menginovasi produk, menata ulang toko, memasang promo diskon, memberikan sedekah, meluruskan niat, tidak mengambil hutang ke bank (lebih baik pinjam ke relasi atau menjual aset lainnya. Dapat juga dilakukan dengan cara menambah modal dengan turun serta tetap menjaga kekompakan tim kerja (Wawancara dengan Bu Vini pemilik batik Vini 2019).

Pengusaha batik harus mempunyai jiwa pekerja keras yaitu tangguh dan pantang menyerah. Pengusaha batik memotivasi para karyawannya agar bekerja dengan keras, penuh semangat dan tidak mudah menyerah dalam kondisi apa pun terhadap hal-hal yang terjadi pada usaha batik (Wawancara dengan Pak Askur, 2019).

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Insyirah ayat 5-6

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

Juga sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

Artinya: “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah dan dalam segala hal selalu mengerjakan yang terbaik, raihlah apa yang dapat memberi manfaat bagimu, dan mintalah pertolongan pada Allah, jangan lemah! Kalau engkau tertimpa sesuatu maka jangan berkata: “kalau aku berbuat begini, pasti begini

dan begitu,” tetapi katakanlah: “Allah Swt. telah menentukan dan menghendaki aku.” Berandai-andai itu adalah perbuatan setan.

Dari paparan ayat tersebut bahwa yang namanya kehidupan akan terjadi pasang surut, bergonta-ganti keadaan, kadang susah kadang senang, namun bila dalam posisi sulit jangan pantang menyerah, karena pasti ada asa dan harapan, kemudahan pun biasanya hadir setelah itu, karena antara sulit dan mudah ibarat rangkaian satu paket yang tak terpisahkan, ibarat permen ada bungkus dan isinya permen, jika menghendaki makan permen harus rela bersusah payah membuka bungkusnya. Sementara dalam hadis di atas memotivasi agar menjadi seorang mukmin yang kuat, jangan menjadi mukmin yang lemah, jangan suka berandai andai, dan banyak angan-angan kosong sehingga tidak mampu berbuat sesuatu, menyerah terhadap keadaan.

13. Berorientasi pada Produktivitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha batik Pekalongan dan sekitarnya diketahui bahwa para pengusaha batik dalam hal peningkatan produktivitas ditunjukkan dalam strategi pemasaran produk yang dilakukan dengan berbagai cara antara lain mendisplay produk di toko, memasang iklan di khalayak umum maupun media sosial. Dalam penetapan harga masing-masing usaha batik mengacu pada harga standar di mana harga faktor produksi ditambah persentase laba kemudian dilakukan pendistribusian penjualan produk

kepada agen maupun retail. Dalam mempertahankan strategi pemasaran produk dilakukan dengan mengupdate informasi produk. Memperkuat komunikasi dengan reseller juga sangat berperan penting bagi peningkatan serta kelancaran produktivitas usaha batik (Wawancara dengan pemilik Kedai Batik 2019).

Ciri-ciri pribadi yang memiliki etos kerja adalah berorientasi pada produktivitas (B. M. Ramadhan, & M. N. H. Ryandono, 2015: 4). Setiap bisnis yang dijalankan harus memperhatikan etika bisnis Islam termasuk dalam usaha batik yang salah satu karakteristiknya yaitu berorientasi pada peningkatan produktivitas yang akan mengacu pada keberhasilan serta kesuksesan usaha batik yang dijalani (Wawancara dengan pemilik Batik Sul & Mit, 2019).

Anjuran agar manusia melakukan produktifitasnya adalah sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat at-Taubah: 105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Dan hadis Rasulullah Saw.

عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَزِفَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba mukmin yang berkarya."

Ayat yang kita baca di atas memerintahkan kepada kita untuk giat bekerja demi menghasilkan produk-produk terbaiknya, karena produk yang dihasilkan akan dinilai oleh Allah, Rasulullah, dan manusia mukmin yang menyaksikan dan menikmati produk produk tersebut, sedangkan hadis tersebut merupakan apresiasi Allah kepada hamba yang mau berkarya yang bermanfaat buat manusia lainnya melalui karya hasil produksinya.

14. Memperkaya Jaringan Silaturahmi

Salah satu cara lagi dalam meningkatkan usaha batik yang tidak kalah pentingnya adalah memperkaya jalinan silaturahmi. Menjalin hubungan yang baik antar pelaku usaha batik dan konsumen merupakan suatu cara dalam memperluas jaringan agar usaha batik semakin maju dan berkembang mencapai kesuksesan (Wawancara dengan karyawan Kedai Batik 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha batik Pekalongan diketahui bahwa para pengusaha batik dalam hal memperkaya jaringan silaturahmi antar pengusaha batik dengan menjalin hubungan rekan kerja yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan

satu sama lain. Menjalin silaturahmi yang baik dengan pelanggan juga dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan usaha. Memperluas jaringan kepada sesama pengusaha batik dengan cara bergabung dengan komunitas pelaku usaha batik yang dari komunitas tersebut dapat memperoleh ilmu, rekan kerja, serta berbagai pengalaman menarik dari masing-masing pengusaha batik. Pentingnya sharing bersama tentang perkembangan usaha dapat menggugah semangat serta membangun motivasi tinggi dalam jiwa pelaku usaha batik agar selalu meningkatkan produktivitas masing-masing usaha batiknya (Wawancara dengan karyawan Ellna Batik, 2019).

Silaturahmi antara pengusaha batik juga bisa dilakukan dengan mendirikan paguyuban pengusaha batik, seperti adanya paguyuban Kampung Batik Kauman, Kampung Batik Pesindon, Paguyuban Batik Kusuma Banyurip, Grup Konco Bollo, menyelenggarakan even batik dalam waktu tertentu baik yang dikelola oleh swadaya maupun pemerintah, sehingga terjalin hubungan yang baik antara mereka.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya: "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmiilah."

Dari hadis ini bila dihubungkan dengan bisnis, bisa dijadikan sebagai strategi agar usaha yang digeluti bisa memperoleh keuntungan dan pendapatan yang melimpah, serta agar usaha yang dijalankan bisa bertahan dan memiliki eksistensi yang panjang maka harus menjalin silaturahmi, memperbanyak *networking*, dan mengenalkan ke calon pelanggan. Dengan banyaknya jalinan silaturahmi berarti usaha bisnis semakin dikenal luas, dengan banyaknya calon pembeli berarti memiliki potensi yang strategis untuk meraup banyak keuntungan dan memiliki jangkauan jangka panjang.

15. Memiliki Semangat Perubahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha batik Pekalongan diketahui bahwa dalam hal melakukan perubahan usaha batiknya ditunjukkan dengan upaya membangun semangat perubahan. Untuk menjadi pengusaha batik yang bonafit dan bermanfaat bagi masyarakat maka dilakukan dengan cara mempertahankan eksistensi masing-masing usaha batik. Melaksanakan syariat Islam seperti menjaga sholat fardhu, sholat sunah seperti sholat dhuha dan sholat tahajud dan aktif berdakwah yang mengambil tema berbisnis dalam agama Islam. Menjaga kekompakan dan solid antar tim kerja. Untuk menjadi pengusaha yang tangguh harus memiliki komitmen, jujur, menguasai tentang ilmu usahanya (*product knowledge*), tegas, pintar membaca peluang, dan pintar membaca keinginan calon pembeli. Perubahan usaha batik yang terlihat adalah mulai menjalankan pasar *online* di samping dengan

membuka toko dengan sistem *offline*. Berkomunikasi yang baik terkait perkembangan usaha batiknya dan berusaha melakukan inovasi dan meningkatkan kreativitas di setiap tahunnya (Wawancara langsung dengan karyawan Batik Feno 2019).

Semangat perubahan sangat dibutuhkan bagi suatu usaha batik dengan cara melakukan inovasi produk seperti model dan motif batik serta memunculkan kreativitas yang menarik agar usaha batik semakin menarik para investor dan konsumen (Wawancara dengan karyawan Batik Feno, 2019).

Allah Swt. telah menjanjikan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 100.

﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسِعَةً
وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ
فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

Artinya: "Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Dalam ayat tersebut Allah menjanjikan kepada siapapun termasuk pebisnis, jika memiliki semangat untuk berubah, dengan niat karena Allah, maka Allah

berjanji akan membukakan sebuah pintu keberkahan serta rizqi yang berlimpah. Semangat perubahan itu bisa dilakukan melalui perubahan secara hissy ataupun maknawi, baik perubahan spiritual dengan memperbanyak zikir, wirid, mendekatkan diri kepada Allah melalui membersihkan diri dari dosa dan maksiat, misalnya menghindari praktik riba, berbohong, sumpah palsu. Kemudian memperbanyak shalat, puasa, membaca shalawat, sedekah ataupun ritual lainnya. Sedangkan perubahan secara fisik bisa dilakukan dengan merubah pola strategi pemasaran dalam segmentasi, targeting, positioning, produk, penetapan harga, distribusi, promosi dan strategi lainnya.

C. Penutup

Berbisnis merupakan salah satu pintu dari sejumlah pintu rizki yang dianugerahkan oleh Allah Swt., dari sejumlah pintu rizki tersebut yang mendapatkan persentase keuntungan terbanyak dibandingkan dengan pintu rizki yang lainnya adalah berbisnis, namun jangan asal bisnis bila menghendaki kesuksesan dan tidak ingin gagal di tengah jalan. Dalam buku ini dirumuskan kiat-kiat menjadi pengusaha yang sukses yang sudah dijalani oleh para pengusaha batik yang dikuatkan dengan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis sebagai landasan beretika bisnis, sehingga dengan semangat menjalankan kiat-kiat tersebut yaitu, Menghargai Waktu, Mempunyai Akhlak dan Jujur, Memiliki Pendirian yang Kuat, Disiplin, Berani Menghadapi Tantangan, Percaya Diri, Kreatif, Bertanggung Jawab, Berorientasi Masa Depan, Mempunyai Insting Bertanding, Selalu Semangat Dalam Belajar, Tangguh Pantang Menyerah, Produktif, Menjalin

Silaturahmi (*Networking*), dan Semangat Perubahan, *in sya Allah* akan mencapai kesuksesan dunia dan akhirat.

D. Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Abdullah, M. R. (2012). *Manajemen Berbasis Syariah*.

Asifudin, A. J., & Islam, E. K. (2004). Muhammadiyah University Press.

Astuti, S. W., & Cahyadi, I. G. (2007). Pengaruh Elemen Ekuitas Merek terhadap Rasa Percaya Diri Pelanggan di Surabaya atas Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, 17(2).

Auliyah, R., Herawati, N., & Rimawati, Y. (2015). Mengungkap Fenomena Kiat Kreatif UMKM “Bungkoh Batik Peri Kecil” dalam Persaingan MEA. In *Prosiding Seminar Nasional 4th UNS SME's Summit & Awards*.

Chisty, A. A., & Faiza, S. I. (2014). Peranan Silaturahmi dalam Komunikasi Bisnis pada Kesuksesan Pengusaha Batik Jetis Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(10).

Ramadhan, B. M., & Ryandono, M. N. H. (2015). Etos kerja Islami pada Kinerja Bisnis Pedagang Muslim Pasar Besar Kota Madiun. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2(4), 274-287.

Sefriani, S., & Wartini, S. (2017). Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 1-28.

Simatupang, T. M. (2008). Perkembangan Industri Kreatif. *School of Business and Management of the Bandung Institute of Technology*, 1-9.

Tasmara, T. (2002). *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Gema Insani.

Wawancara

Wawancara dengan pemilik Batik Novi, Kamis, 8 Agustus 2019.

Wawancara dengan pemilik Batik Larissa yaitu Pak Eddywan hari Kamis, 8 Agustus 2019.

Wawancara dengan pemilik Batik Sul & Mit yaitu Mifta Ulha hari Rabu, 31 Juli 2019.

Wawancara dengan Bu Vini Fitria Hani pemilik Batik Vini hari Rabu, 31 Juli 2019.

Wawancara dengan M. Abdul Ghani pemilik Batik Kampus hari Minggu, 4 Agustus 2019.

Wawancara dengan Mifta Ulha pemilik Batik Sul & Mit hari Rabu, 31 Juli 2019.

Wawancara dengan pemilik Batik Larissa yaitu Pak Eddywan hari Kamis, 8 Agustus 2019.

Wawancara dengan Bu Vini Fitria Hani pemilik Batik Vini hari Rabu, 31 Juli 2019.

Wawancara dengan karyawan Ellna Batik hari Sabtu, 31 Agustus 2019.

Wawancara dengan Pak Askur, karyawan batik Feno hari Rabu, 7 Agustus 2019.

Wawancara dengan karyawan Ellna Batik hari Sabtu, 31 Agustus 2019.

Wawancara dengan karyawan Kedai Batik hari Sabtu, 31 Agustus 2019.

Wawancara dengan karyawan Batik Feno hari Rabu, 7 Agustus 2019.

Wawancara dengan Trisno Suhito, Pemilik Batik Foda, 2018.



Bagian 3
KEARIFAN EKONOMI LOKAL

Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pengembangan Produk Berbahan Limbah Konveksi Jeans di Desa Jajarwayang Kec. Bojong Kab. Pekalongan

Dr. Agus Fakhrina
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan

Nur Fani Arisnawati, M.M.
Herna Mordianty
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan

A. Pendahuluan

Desa Jajarwayang yang terletak di Kecamatan Bojong merupakan salah satu desa sentra konveksi jeans di Kabupaten Pekalongan. Setidaknya terdapat sembilan pelaku usaha konveksi jeans dan delapan puluh delapan buruh konveksi jeans. Dari sembilan tersebut, dua di antaranya adalah pelaku usaha konveksi jeans yang membuat produk sendiri untuk kemudian di pasar sendiri ke Jakarta dan Jawa Timur. Sementara tujuh lainnya adalah pelaku usaha penerima jasa konveksi yang menerima limpahan pekerjaan pesanan konveksi dari desa di sekitarnya. Berikut adalah tabel hasil pemetaan pelaku usaha konveksi:

Jumlah				
RW	RT	Buruh konveksi	Pengusaha konveksi	Jumlah seluruhnya
RW 1	RT 1	4	-	23 buruh
	RT 2	6		
	RT 3	10		
	RT 4	3		

RW 2	RT 5	1	1	13 buruh 1 bos
	RT 6	4		
	RT 7	4		
	RT 8	4		
RW 3	RT 9	20	2	31 buruh 2 bos
	RT 10	4		
	RT 11	5		
	RT 12	2		
RW 4	RT 13	-	6	21 buruh 6 bos
	RT 14	10		
	RT 15	11		
	RT 16	-		

Layaknya sebuah kegiatan produksi yang juga menghasilkan limbah, maka industri konveksi jeans di Desa Jajarwayang ini juga menghasilkan limbah berupa potongan-potongan kecil kain jeans (kain perca). Limbah ini sebagian dibakar, sebagian lagi dibuang begitu saja di pinggir sungai dan sebagian lagi dijual dengan harga satu kilogram sebesar Rp500,- sampai dengan Rp750,-. Limbah jeans yang dibakar atau dibuang begitu saja di pinggir sungai, tentunya, menimbulkan pencemaran mulai dari pencemaran udara dan pencemaran air sungai. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara lingkungan sungai agar tidak tercemarnya dan keterbatasan pengetahuan masyarakat serta belum adanya kelompok/lembaga komunitas yang berinisiasi dalam upaya memanfaatkan limbah konveksi jeans menjadi barang yang memiliki nilai guna dan ekonomis memberi dampak bagi menumpuknya sampah limbah jeans di pinggir sungai dari waktu ke waktu. Kondisi ini tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri yang perlu dicarikan solusi alternatifnya. Padahal, limbah jeans yang berupa potongan-potongan kecil kain jeans (kain perca) sebenarnya

juga masih bisa dimanfaatkan untuk dibuat sebuah produk souvenir yang menarik sehingga juga dapat memberikan dampak ekonomi.

Berangkat dari kondisi inilah, maka perlu dilakukan pendampingan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang mampu berkreasi memanfaatkan limbah konveksi jeans menjadi barang bernilai guna dan ekonomis.

B. Pembahasan

1. Ekonomi Kreatif sebagai Kerangka Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Ekonomi kreatif secara konseptual disebut sebagai sebuah konsep ekonomi baru yang mengintegrasikan informasi dan kreativitas dari ide dan pengetahuan sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama. Konsep ini merupakan lanjutan dari konsep ekonomi informasi yang mana informasi menjadi unsur utama dalam pengembangan ekonomi (Ratna, 2018). Adalah John Howkins yang pertama kali memperkenalkan istilah ekonomi kreatif, di mana dia menyadari akan lahirnya gelombang ekonomi baru berbasis kreativitas setelah Amerika Serikat pada tahun 1997 menghasilkan produk-produk Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) senilai 414 miliar dolar. Howkins sendiri mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai *the creation of value as a result of idea* (kreasi nilai sebagai hasil dari ide/gagasan) (Ratna, 2018). Ekonomi kreatif juga dapat didefinisikan sebagai talenta (baru) yang mengubah kehidupan ekonomi masyarakat melalui ide/gagasan kreatif sehingga mampu menghasilkan produk-produk kreatif yang memiliki nilai tambah

ekonomi yang dapat menjadikan kehidupan lebih sejahtera (Novita dan Sundari, 2021). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan satu bentuk pengembangan ekonomi berbasis ide-ide/gagasan-gagasan kreatif.

Menurut Nurjaman (2018), kreativitas mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi pengembangan inovasi yang dapat digunakan untuk kemajuan usaha. Menurutnya, inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dapat berdampak pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Sementara itu, karya kreasi dari limbah selain dapat mengurangi limbah yang berdampak pada buruknya lingkungan, juga dapat memiliki nilai komersial yang menjanjikan, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu gerakan pemberdayaan masyarakat (Ghofur dan Irawan, 2020; Nadlifatin, 2018; Ginting, 2016). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengembangan produk-produk berbahan limbah di satu sisi dapat mengurangi dampak buruk limbah terhadap lingkungan juga dapat memberikan keuntungan komersial di sisi yang lain.

Berangkat dari kerangka dasar pemikiran tersebut, maka pemberdayaan ini merupakan satu bentuk pendampingan kepada komunitas masyarakat yang ada di Desa Jajarwayang Kec. Bojong Kab. Pekalongan untuk mengubah sampah berupa limbah jeans menjadi produk-produk kreatif sehingga memiliki nilai tambah ekonomi, dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk sampai ke sana, maka indikator yang hendak diwujudkan dalam pendampingan ini adalah 1) adanya contoh-contoh

produk kreatif dari limbah konveksi jeans yang ada di sekitar mereka; 2) bertambahnya (baca: berubahnya) nilai limbah konveksi jeans menjadi produk kreatif; dan 3) adanya lembaga “*rumah kreatif*” yang mendukung kreatifitas masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dengan pembentukan lembaga “*rumah kreatif*” beserta pengembangan sarana prasarananya dengan skema pengembangan kemitraan dengan para pemangku kepentingan di tingkat lokal.

2. Fasilitasi Pengembangan Produk Kreatif dari Limbah Jeans

Kegiatan fasilitasi pengembangan kapasitas ini, diawali dengan fasilitasi analisa kebutuhan melalui *Focused Group Discussion* (FGD). Dalam kegiatan FGD ini menghasilkan keputusan bahwa peralatan-peralatan yang dibutuhkan meliputi: benang jahit, jarum, mesin jahit, lem tembak beserta alatnya, gunting, meteran kain, kapur kain, kertas untuk menggambar pola, pensil dan lain-lain. Kegiatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pengadaan barang yang dibutuhkan sebagaimana tersebut di atas bersama warga.

Setelah fasilitasi analisa dan pemenuhan kebutuhan tersebut di atas, kemudian pada pertemuan berikutnya kami melakukan fasilitasi pengembangan produk kreatif dari limbah jeans. Dalam pelatihan ini, empat anggota masyarakat tersebut di atas mengikuti pelatihan bagaimana caranya membuat tas, bross, dompet, sarung bantal, lepek anti panas, dan cempal. Pada kesempatan ini, mereka diberi pelatihan bagaimana membuat pola untuk membuat tas, bross,

dompet, sarung bantal, lepek anti panas, dan cempal. Setelah pola dibuat kemudian pola itu digambar pada bahan jeans. Setelah itu bahan jeans yang sudah diberi gambar pola dipotong sesuai dengan pola kemudian mulai dijahit baik dengan tangan ataupun dengan mesin jahit. Setelah selesai kemudian dilakukan *finishing*. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang untuk menghasilkan lebih banyak produk kerajinan/*craft*.

3. Masalah yang Dihadapi dan Cara Penanganannya

Kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan ini tidaklah sepenuhnya berjalan mulus tanpa menghadapi masalah-masalah di lapangan. Ada beberapa masalah yang kami hadapi dalam melakukan kegiatan pengabdian ini, di antaranya: keengganan melakukan pengembangan produk kreatif, dan belum dirasakannya limbah konveksi jeans sebagai masalah besar di desa mereka.

Sebagaimana masyarakat pada umumnya yang lebih memilih berada di zona nyaman, mereka enggan melakukan inovasi-inovasi atau langkah-langkah kreatif untuk mengembangkan usahanya. Ada kekhawatiran di antara mereka. Kekhawatiran tersebut adalah apabila mereka melakukan langkah-langkah kreatif lain, seperti mengembangkan pemasaran berbasis *online shop*, justru nanti akan mematikan usaha mereka yang telah lama mereka lakukan. Mereka merasa sudah zaman dengan kondisi yang ada.

Menghadapi kondisi yang demikian, kami kemudian melakukan transfer nilai-nilai (*transfer of value*) dan transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*)

kepada mereka. Mula-mula kami menyampaikan tentang pentingnya melakukan pengembangan kreativitas produk berbahan limbah konveksi jeans. Kami sampaikan bahwa dari limbah konveksi jeans dapat dibuat berbagai macam pernak-pernak souvenir dan kerajinan/*craft* yang dapat memiliki nilai ekonomis, seperti gantungan kunci, bross, tas, sarung bantal, lepek anti panas, cempal dan lain-lain. Mendengar ide-ide semacam itu, pada prinsipnya mereka menyetujui, sehingga terbentuknya komunitas "*Jawa Berkarya*".

Awal pembentukan komunitas "*Jawa Berkarya*" di Desa Jajarwayang melalui kegiatan rutin ibu-ibu yaitu kelas ibu hamil, posbindu yang dilakukan dua minggu sekali. Juga melalui rutin ibu-ibu PKK. Alasan memilih media ini dikarenakan sulitnya mengumpulkan warga di Desa Jajarwayang yang mayoritas warganya adalah buruh konveksi yang hanya bisa ditemui ketika sore hari, karena pada waktu pagi dan siang masyarakat berada di pabrik konveksi.

Adapun susunan pengurus "*Jawa Berkarya*" Desa Jajarwayang dapat di lihat dalam struktur di bawah ini:

Pelindung : Edi Fahrudin (Kades Desa Jajarwayang)

Ketua : H. Batiyah

Wakil Ketua : Nasihin

Sekretaris : Falasifah

Bendahara : Khorizanah

Anggota komunitas “Jawa Berkarya” antara lain:

No	Nama Anggota Komunitas	Pekerjaan	
		Utama	Sampingan
1.	Nasihin	Pengusaha	-
2.	Wasnuri	Wiraswasta	-
3.	Syarifudin	Wiraswasta	-
4.	Waryanto	Bos Konveksi	-
5.	Warmudin	Sopir Mobil	-
6.	Rohimin	Bos konveksi	-
7.	Rohmat	Wiraswasta	-
8.	Samsul al Huda	Wiraswasta	-
9.	H. Batiyah	PNS	-
10.	Anggesti	Penjahit	-
11.	Midya Ningsih	Penjahit	-
12.	Iis Mugiwati	Penjahit	-
13.	Rasitun	Pedagang	-
14.	Vera Rosfita	Salon	-

4. Dampak Kegiatan Pendampingan

Kegiatan pendampingan yang kami lakukan serta cara bagaimana kami menangani masalah yang dihadapi sebagaimana tersebut telah mendorong beberapa di antara mereka untuk membuat produk kreatif dari limbah konveksi jeans. Dari sini mereka sudah mulai tercerahkan bahwa mereka dapat mengembangkan produk kreatif dari limbah konveksi jeans yang ada di sekitar mereka. Dengan adanya keberadaan komunitas “Jawa Berkarya” ini akan dilaksanakan pembuatan produk kreatif dari limbah konveksi jeans tersebut pada pertemuan ibu-ibu PKK setiap 2 minggu sekali. Hasil dari pembuatan produk kreatif nantinya akan dikomunikasikan melalui media sosial yaitu Whatsapp secara rutin oleh ketua komunitas. Produk akan di pasarkan oleh komunitas, Tim Pokja dan mahasiswa

yang sudah KKN di Desa Jajarwayang melalui ditawarkan secara langsung dan dipromosikan melalui media sosial.

Kondisi ini sejalan pernyataan yang disampaikan oleh Ghofur dkk. (2020), bahwa pemberdayaan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Bojonegoro dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya mengolah limbah menjadi barang atau produk yang berguna. Mereka tergerak untuk melakukan produksi kreatif dari kulit salak menjadi teh kulit salak yang kemudian dipasarkan melalui berbagai cara. Di antaranya: 1) melakukan kemitraan dengan mitra kuliner; 2) ditampilkan dalam festival salak Bojonegoro; 3) dititipkan di sentra oleh-oleh Kota Bojonegoro dan 4) pengoptimalan media sosial dan *online*.

Apabila kondisi ini terus berlanjut, di mana masyarakat menyadari bahwa pembuatan produk kreatif dari limbah, di satu sisi, dapat mengurangi limbah yang berdampak buruk bagi lingkungan, dan, di sisi yang lain, dapat memberikan tambahan pendapatan kepada masyarakat maka dengan sendirinya akan dapat berdampak pada terselesaikannya masalah limbah di masyarakat, di satu sisi, dan, di sisi yang lain, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini merupakan kondisi yang tentunya cukup bagus dan baik, dan mungkin yang diharapkan oleh semua pihak. Terlebih lagi, apabila kesadaran semacam ini merupakan satu bentuk kesadaran massif dalam komunitas masyarakat, sehingga menjadi sebuah gerakan besar yang pada gilirannya akan memberi pengaruh kepada komunitas lain untuk ikut juga melakukannya.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai pelajaran (*lesson learn*) dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini:

- a. Dalam membangun kesadaran bersama di antara masyarakat bahwa sesuatu yang pada mulanya tidak memiliki nilai (sampah) apabila dikreasi dengan baik akan dapat memiliki nilai, diperlukan kerja keras menyelami kondisi kehidupan mereka untuk membangun raport yang baik dengan mereka. Dengan terbangunnya raport yang baik, mereka mulai terdorong melakukan inovasi dan kreasi baru.
- b. Pendampingan merupakan cara yang paling efektif dalam mendorong masyarakat untuk melakukan inovasi dan kreasi baru.
- c. Proses belajar bersama atas masalah yang mereka dalam kegiatan pengabdian ini telah memberi semangat mereka untuk terus tetap melakukan inovasi dan kreasi.
- d. Pola pembuatan produk-produk kreatif dari limbah konveksi jeans sebagai satu contoh berkreasi telah mendorong anggota masyarakat yang lain untuk ikut serta melakukannya.

2. Rencana Tindak Lanjut

Dari kegiatan pengabdian yang dilakukan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah penguatan komunitas “Jawa Berkarya” Desa Jajarwayang, dalam hal ini: (i) pembentukan lembaga “*rumah kreatif*” beserta pengembangan sarana prasarannya; (ii) pengembangan

sentra komoditas kreatif; (iii) pengembangan kemitraan pengembangan produk kreatif dari limbah konveksi jeans. Dengan demikian peningkatan kapasitas perlu ditindaklanjuti dengan penguatan kelembagaan sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang kreatif mengubah masalah menjadi potensi pengembangan ekonomi.

D. Daftar Pustaka

- Ghofur, A., Efendi, Y., & Irawan, M. R. N. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Limbah Kulit Salak Menjadi Produk Unggul melalui Model Industri Kreatif di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 91-98. DOI: [10.36407/berdaya.v2i2.217](https://doi.org/10.36407/berdaya.v2i2.217). diakses 23 November 2021.
- Ginting, A. (2016). Pemanfaatan Limbah Kulit Jagung untuk Produk Modular dengan Teknik Pilin. *Dinamika Kerajinan dan Batik: Majalah Ilmiah*, 32(1), 51-62. DOI: <http://dx.doi.org/10.22322/dkb.v32i1.1180>. Diakses 23 November 2021.
- Nadlifatin, R. (2018). Pengolahan Limbah Plastik Menjadi Produk Kerajinan Tangan untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sendang Dajah. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.30996/abdikarya.v1i1.2048>. Diakses 23 November 2021.
- Novita, N., & Sundari, R. (2021). Membangun Daya Saing Usaha dari Produk Kreatif Industri Kecil di Kota Pekanbaru. *Jurnal Economica*, 9(2), 185-192. DOI:

<https://doi.org/10.31932/jpe.v6i1.1084>. Diakses 19 November 2021.

Nurjaman, J. (2018). Pengaruh Kreativitas terhadap Daya Saing Usaha. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 2(3), 255-262. DOI:

<https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v2i3.16493>.

Diakses 23 November 2021.

Ratna, S. (2018). Ekonomi Kreatif dan Kaizen. *Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen)*, 1(2), 57-66. DOI: [10.31002/rn.v1i2.713](https://doi.org/10.31002/rn.v1i2.713). Diakses 19 November 2021.

~oOo~

Ritual *Nyadran* Dukuh Jambean Pesisir Pekalongan (Telaah Antropologi dan Ekonomi Bisnis Islam)

Achmad Tubagus Surur, M.Ag.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan
surur_difa@yahoo.com

Muhammad Hufron, M.S.I.
Dosen IAIN Pekalongan

A. Pendahuluan

Sebuah ritual keagamaan sudah tentu dibangun dengan sejumlah tradisi dan simbol-simbol (Hakim, 1999). Simbol-simbol ritual tersebut mewakili dari sekian makna, cita-cita, idealisme dan nilai-nilai luhur suatu masyarakat. Nilai-nilai luhur inilah yang sebagian oleh masyarakat dipertahankan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Dengan demikian ritual tersebut akan berkembang sebagai sebuah budaya masyarakat yang bersangkutan.

George Homans menunjukkan hubungan antara ritual dan kecemasan. Menurut Homans, ritual berawal dari kecemasan. Dari segi tingkatannya, ia membagi kecemasan menjadi kecemasan yang bersifat sangat yang ia sebut kecemasan primer, dan kecemasan yang biasa, yang ia sebut kecemasan sekunder.

Selanjutnya, Homans menjelaskan bahwa kecemasan primer melahirkan ritual primer, dan kecemasan sekunder melahirkan ritual sekunder. Oleh karena itu, ia

mendefinisikan ritual primer sebagai upacara yang bertujuan mengatasi kecemasan meskipun tidak langsung berpengaruh terhadap tercapainya tujuan dan ritual sekunder sebagai upacara penyucian untuk kompensasi kemungkinan kekeliruan atau kekurangannya dalam ritual primer.

Berbeda dengan Homans, Anthony Wallace meninjau ritual dari segi jangkauannya, yakni sebagai berikut:

1. Ritual sebagai teknologi, seperti upacara yang berhubungan dengan kegiatan pertanian dan perburuan.
2. Ritual sebagai terapi, seperti upacara untuk mengobati dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Ritual sebagai ideologis-mitos dan ritual tergabung untuk mengendalikan suasana perasaan hati, nilai, sentimen, dan perilaku untuk kelompok yang baik. Misalnya, upacara inisiasi yang merupakan konfirmasi kelompok terhadap status, hak, dan tanggung jawab yang baru.
4. Ritual sebagai penyelamatan (*salvation*), misalnya seseorang yang mempunyai pengalaman mistikal, seolah-olah menjadi orang baru, ia berhubungan dengan kosmos yang juga memengaruhi hubungan dengan dunia profan.
5. Ritual sebagai revitalisasi (penguatan atau penghidupan kembali). Ritual ini sama dengan ritual *salvation* yang bertujuan untuk penyelamatan tetapi fokusnya masyarakat (Hakim, 1999).

Masyarakat Dukuh Jambean Desa Pecakaran Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan memiliki tradisi yaitu *Nyadran*. Ritual ini diselenggarakan pada tiap tanggal 10 Syura dalam kalender Hijriyah oleh warga setempat, namun warga dari

berbagai wilayah turut serta meramaikan acara *Nyadran* karena Warga Dukuh Jambean dalam menyelenggarakan tradisi ini di samping agenda utama yaitu *Sedekah Laut*, diselingi dengan berbagai agenda, di antaranya Wayang Kulit, Pengajian Umum dan Panggung Hiburan Rakyat.

Tradisi *nyadran* Dukuh Jambean merupakan upacara ritual yang diwujudkan dalam bentuk acara *Sedekah Laut*, di mana warga Dukuh Jambean dan sekitarnya secara periodik memeriahkan acara ini dengan kemasannya berbagai acara yang mencerminkan situasi dan kondisi struktur sosial budaya masyarakat setempat. Dalam fenomena ini, ritual *nyadran* bukan sekadar mengusung kepercayaan pada Sang Khalik akan tetapi kaya akan makna dari berbagai aspek. Oleh karena itu, sangat menarik untuk dilihat lebih jauh tentang motif-motif ekonomi yang tersirat maupun tersurat pada tradisi *nyadran* Dukuh Jambean.

B. Pembahasan

1. Sejarah Ritual *Nyadran*

Seiring keyakinan ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean, bahwa tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang mereka. Menurut penuturan tokoh sesepuh Dukuh Jambean Mbah Kanapi (Kanapi, Wawancara, 2017), *nyadran* mulai diselenggarakan secara meriah semenjak Mbah Anwarturut bergabung berlabuh di kongsi (Tempat Pelelangan Ikan) Dukuh Jambean. Beberapa waktu kemudian pendatang Anwar ini dijadikan anak angkat Mbah. Abbas, Lurah Desa Pecakaran waktu itu, selanjutnya tokoh ini menjadi populer di kalangan masyarakat setelah mempersunting Mbah Siti dari Dukuh Kedongombo Desa Pecakaran.

Dari hasil perkawinan dengan Mbah Siti ini, Mbah Anwar mendapatkan keturunan cukup banyak dan keturunannya rata-rata menjadi tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Pecakaran pada hari-hari kemudian.

Dengan bergabungnya Mbah Anwar ke Desa Pecakaran ini, tradisi *nyadran* semakin ramai ketika upacara sadranan di Dukuh Jambean. Tradisi ini kemudian semakin populer di kalangan masyarakat khususnya warga Dukuh Jambean yang memang fokus mata pencahariannya adalah nelayan di tepi pesisir pantai utara Laut Jawa.

Menurut penuturan panitia, tradisi *nyadran* fokus dikelola warga masyarakat Dukuh Jambean, sementara itu nelayan dengan kapal besar dan berlabuh di luar TPI Dukuh Jambean tidak secara langsung menangani upacara ritual tradisi *nyadran*. Namun demikian, saat berlangsung upacara sadranan, hampir semua warga di sekitar Dukuh Jambean turut berpartisipasi dan ikut meramaikan perayaan tradisi ini. Hal ini memang inisiatif panitia sejak lama sudah menerapkan beberapa agenda berbarengan dengan upacara sadranan, misalnya lomba Dayung, yang diikuti oleh kontingen dari berbagai daerah luar kota berlangsung beberapa hari dan menjanjikan hadiah yang cukup besar. Selain itu ada hiburan orkes dangdut yang notabene selera kaum muda remaja menjadikan semakin ramai. Ditambah lagi ada pengajian umum dengan menghadirkan da'i atau mubaligh kondang turut menyedot perhatian masyarakat setempat maupun sekitarnya.

Menurut Mbah Kanapi, termasuk rangkaian ritual sadranan adalah pagelaran wayang kulit saat upacara *nyadran*, di mana dalam pagelaran ini memang disediakan sesajian dan mantra-mantra yang diperuntukkan bagi para *dayang-dayang* yang menurut keyakinan warga merupakan *penunggu* di sepanjang sungai Dukuh Jambean hingga muara dan pesisir pantai Laut Jawa. Cerita dan tema lakon wayang pun diambilkan yang berkaitan dengan para *penunggu* ikan di sekitar pantai pesisir utara Laut Jawa.

Masih menurut Mbah Kanapi, bahwa beliau dalam keadaan setengah sadar pernah melihat sendiri tepi pantai pesisir Laut Jawa ada keramaian dengan kapal-kapal besar, banyak orang berlalu lalang dan terdapat pabrik besar dengan suara bertalu-talu ternyata di situ terdapat pabrik kain mori. Setelah beliau tersadar ternyata semua itu hamparan pantai pesisir Laut Jawa, semua yang beliau lihat sebelumnya merupakan ilusi, atau memang sebuah kerajaan besar, yang banyak penghuni dari golongan jin. Hal ini semakin membuktikan bahwa memang penuturan banyak orang bahwa pantai pesisir utara Laut Jawa merupakan kerajaan besar, untuk wilayah Pantai Pekalongan konon ada penunggu yaitu *Dewi Lanjar*. Istilah *lanjar* merupakan konotasi dari *pesugihan* (cara mendapatkan kekayaan). Banyak penuturan dari warga lingkup wilayah Pekalongan mengenai cerita *Dewi Lanjar* yang menurut keyakinan mereka sebagai jalan pintas untuk mencari “pesugihan” dengan cara amalan-amalan ritual.

2. Dayang Ritual Nyadran

Warga dalam upacara ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean ini tentu menyebut dan bersinggungan dengan tokoh-tokoh *dayang* dalam yang menurut keyakinan mereka dapat memengaruhi perikehidupan umat manusia di sekitarnya. Keyakinan warga Dukuh Jambean ini tumbuh dan bersemi seiring dengan perjalanan waktu dan teruji dari tahun ke tahun. Sampai-sampai warga Dukuh Jambean pun tidak berani manakala harus menunda apalagi menghentikannya. Oleh sebab itulah upacara ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean terus berjalan dari generasi ke generasi dalam acara tahunan pada bulan Suro menurut kalendre Jawa atau bulan Muharram menurut kalender Hijriyah. Adapun tanggalnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi warga dan lingkungannya.

Menurut Mbah Kanapi, ada beberapa tokoh *dayang* dalam upacara ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean Desa Pecakaran, di antaranya adalah:

a. Nabi Sits (a.s)

Nabi Sits (a.s) diyakini merupakan penjaga lautan lepas di seluruh dunia, sehingga dalam berbagai kesempatan para nelayan yang menghabiskan seluruh waktunya di lautan untuk mendapatkan ikan tangkapannya. Warga terus memberikan doa dan pengharapan kepada Nabi Sits (a.s) agar tetap terjaga dan terjamin selama masa mencari ikan di laut dengan cara mengadakan upacara ritual tradisi *nyadran*. Upacara ini terus berlangsung di Dukuh Jambean Desa Pecakaran hingga sekarang.

b. Nabi Khidhir (a.s)

Nabi Khidhir (a.s) adalah nabi yang dipercaya berada di lautan lepas, warga meyakini bahwa Nabi Khidhir (a.s) adalah penguasa lautan, oleh karenanya para nelayan (pencari ikan di laut) memberikan *salam ta'dhim* dan penghormatan kepada Nabi Khidhir (a.s) setidaknya setahun sekali dalam upacara ritual tradisi *nyadran* sebagai tanda bakti, setia dan terima kasih.

Kaum muslimin meyakini keberadaan Nabi Khidhir (a.s) sebagaimana disebutkan dalam kitab suci al-Qur'an dalam surat al-Kahfi. Dalam al-Qur'an dikisahkan pertemuan Nabi Khidhir (a.s) bersama Nabi Musa (a.s) di mana Nabi Musa (a.s) belajar dan berguru kepada Nabi Khidhir (a.s) yang keberadaannya di perairan.

Warga masyarakat, para nelayan dan pencari ikan di lautan mengetahui bahwa Nabi Khidhir (a.s) adalah sosok yang dihormati, disegani, dan dimintai doa restu bagi keselamatan, kesejahteraan dan keberkahan dalam upaya mencari ikan di lautan, sebagai mata pencaharian dan penghidupan masyarakat. Oleh karenanya warga nelayan pada setiap tahunnya tepatnya bulan Suro mengadakan upacara sebagaimana ritual tradisi *nyadran* di Dukuh Jambean.

c. Dewi Lanjar (Pesisir Laut Jawa)

Upacara ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean menurut pengamatan peneliti tentu tidak lepas dari mitos Dewi Lanjar. Beliau dikenal masyarakat luas di eks karesidenan Pekalongan bahkan pesisir utara

Laut Jawa sebagai sosok yang disegani, ditaati dan dimintai doa restu serta keberkahan dalam mencari hasil tangkapan ikan laut di pesisir utara Laut Jawa. Bahkan sebagian kalangan menjadikan Dewi Lanjar sebagai simbol untuk mencari nasib, keberuntungan dan kekayaan dalam tindakan ekonominya.

Dalam pelaksanaan sadranan di Dukuh Jambean, sebagaimana penuturan Mbah Kanapi, tidak lepas dari tradisi *persembahan*, pamitan dan permintaan doa restu keberkahan kepada “Penguasa Pesisir Utara Laut Jawa” yaitu Dewi Lanjar. Warga meyakini bahwa demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat terutaman warga nelayan Dukuh Jambean maka pada setiap tahunnya pada bulan Suro diadakan ritual sadranan. Alasannya sederhana, yaitu untuk mendapatkan keselamatan, ketenangan, dan keberkahan dalam mencari penghidupan, mata pencaharian dan tegaknya ekonomi masyarakat Dukuh Jambean khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

d. Rara Santang (Moro)

Tokoh ini, yaitu Rara Santang, diyakini warga Dukuh Jambean dan para nelayan sebagai sosok “penunggu” atau penjaga di *moro* “muara” sungai Dukuh Jambean, sehingga warga perlu sekali untuk berpamitan dan minta doa restu untuk keselamatan dan keberkahan warga Dukuh Jambean dan sekitarnya dari berbagai bahaya dan malapetaka yang mungkin menyimpannya setiap saat.

Dengan upacara ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean diharapkan bisa meredam berbagai mara

bahaya yang muncul. Maka dari itu Rara Santang selalu disebut ketika upacara sadranan Dukuh Jambean di samping beberapa tokoh lainnya.

e. Tokoh-tokoh Lain

Selain tersebut di atas, para tokoh yang menjadi sosok “*dayang*” saat upacara sadranan Dukuh Jambean antara lain adalah Pandan Sari (*dayang penjaga moro wetan*), Adam Ma’na (*dayang penjaga moro kulon*), Ontobogo (Ontoseno, *dayang penjaga daratan*), Barara (Ontorejo, *dayang penjaga perairan*), Badak Pasa (*dayang pemelihara ikan*), dan Dewi Sinta (*dayang pemelihara padi*).

3. Sedekah Laut

Sedekah Laut merupakan ritual khusus dalam acara *Nyadran* Dukuh Jambean. Di mana warga setempat dan para pendatang dari berbagai daerah sekitar turut meramaikan acara dengan menjalani serangkaian ritual yang dipimpin oleh sesepuh warga yang dikenal tokoh spiritual. Selama ritual Sedekah Laut warga berbondong-bondong beriringan menyusuri sungai menuju muara di perbatasan tepian laut dan selanjutnya melakukan kegiatan ritual. Seusai upacara ritual, warga beramai-ramai menghanyutkan barang bawaan dalam perahu ke lautan lepas.

a. Sesaji

Dalam upacara ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean, sesaji yang disiapkan panitia berdasarkan keterangan Mbah Kanapi adalah sebagai berikut: *Juadah Pasar*, aneka rupa makanan pasar, *Kebo Segluntung*, Kerbau Seutuhnya, *Gedang Mas Gerito*,

Rujak Degan, Ndas Kebo, kepala kerbau, Rokok, biasanya merek "Layar", Susur Kinang, Sisir-Pengilon, dan Menyan Garu.

b. Ritual dalam Sedekah Laut

Prosesi ritual sadranan Dukuh Jambean dimulai star dari pelataran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dukuh Jambean dengan beberapa perahu pengangkut sesaji di bagian depan disusul perahu pengiring menyusuri sungai menuju muara dan pantai utara Laut Jawa. Di sepanjang sungai disebarkan sesajian yang sudah direncanakan sebelumnya dipimpin oleh tokoh adat atau pawang sadranan. Dalam beberapa tahun terakhir pawang sadranan dilakukan oleh Mbah Kanapi.

Sampai di muara sesajian terus disebarkan, dan pada akhirnya sampai ke tengah laut sesajian utama berupa kepala kerbau dilemparkan ke laut dengan berbagai doa dan mantra untuk para penunggu atau para *dayang* yang diyakini warga turut memengaruhi kehidupan masyarakat Dukuh Jambean dan sekitarnya.

4. Tujuan Ritual *Nyadran*

Ritual *Nyadran* Dukuh Jambean bukan tanpa tujuan. Acara yang berlangsung dengan biaya dan pendanaan yang sangat besar ini memiliki tujuan yang mengkristal di kalangan masyarakat Dukuh Jambean. Menurut analisa peneliti, dari olahan keterangan berbagai sumber dan amatan, maka tujuan upacara ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean memiliki beberapa tujuan teknis, antara lain:

a. Tujuan Religius

Warga mengakui ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam menyelenggarakan ritual *nyadran* di Dukuh Jambean. Tujuan religius merupakan tujuan yang berlandaskan nilai-nilai religi atau keyakinan kepercayaan atau agama.

- 1) Syiar Islam, dengan memodifikasi ritual yang notabene peninggalan tradisi Hindu dalam persembahan dan pemujaan kepada kekuatan-kekuatan supranatural diisi dengan doa dan istighotsah bahkan pengajian umum. Orientasi yang semula pemujaan “dewa” atau *dayang* berangsur-angsur dialihkan dengan doa dan permohonan kepada Sang Maha Kuasa, Allah Swt.
- 2) Asimilasi budaya, yang semula budaya Hindu dengan sesaji dan mantra, dengan pelan-pelan diadopsi dan diganti dengan budaya Islam, misalnya penggunaan *kemenyan garu* (menyan Arab) berbeda dengan menyan dupa yang didesain untuk mengundang para makhluk halus, *dayang* atau “dewa”.

b. Tujuan Magis

Warga juga mempunyai target dalam melakukan ritual *nyadran* di Dukuh Jambean. Tujuan magis merupakan tujuan yang berlandaskan nilai-nilai kekuatan supranatural di luar daya nalar manusia biasa.

- 1) Mendapatkan Kekuatan Batin, Spirit dan Semangat. Dengan upacara sadranan Dukuh

Jambean maka warga mendapatkan kekuatan batin, spirit dan semangat dalam menjalani kehidupan dan pencaharian ekonomi sehari-harinya.

- 2) Mendapatkan kekuatan magis. Hal ini untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dengan jalan kekuatan magis. Kekuatan magis ini bagi warga bisa didapati melalui ritual *nyadran*.

c. Tujuan Terapis

Dalam ritual *nyadran* warga antusias ingin menggapai target dalam melakukan acara sakral di Dukuh Jambean. Tujuan terapis merupakan tujuan yang berharap ada solusi atau pengobatan bagi sejumlah masalah dan dilema yang menjadi keprihatinan warga.

- 1) Untuk mencari solusi berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena kondisi masyarakat yang masih labil terhadap guncangan berbagai peristiwa lebih-lebih urusan ekonomi masyarakat. Maka caranya adalah dengan upacara ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean.
- 2) Untuk melakukan usaha bersama mencari formula baru dalam menghadapi dan memecahkan masalah warga. Misalnya dengan acara Wayang Golek diyakini dapat 'meruwat' berbagai problem sosial untuk dicarikan solusi terbaiknya.

d. Tujuan Pragmatis

Tujuan pragmatis diartikan sebagai tujuan yang menjadi jalan pintas untuk kepentingan dan manfaat jangka pendek. Adapun tujuan pragmatis dari ritual *nyadran* Dukuh Jambean yaitu:

- 1) Untuk mendapatkan kemudahan dalam mencari nafkah 'mencari ikan' dengan segala macam pengharapan masyarakat sehingga ada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan warga Dukuh Jambean.
- 2) Untuk mencari perlindungan baik secara fisik maupun psikis, agar terhindar dari berbagai macam gangguan dan cobaan (*tolak balak*). Dengan upacara ritual sadranan ini diharapkan mampu meredam dan meghilangkan segala ketakutan dan ketidakmampuan warga.

e. Tujuan Ekonomis

Tujuan ekonomis dimaknai sebagai tujuan yang berlandaskan nilai-nilai ekonomi atau kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-hari. Adapun tujuan ekonomis dari ritual *nyadran* Dukuh Jambean di antaranya:

- 1) Untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi, dengan demikian *income* bertambah dan kesejahteraan keluarga pun meningkat. Warga meyakini upacara ritual sadranan ini mampu memberi harapan baru dengan adanya perolehan tambahan nilai ekonomi dengan hasil tangkapan ikan yang melimpah.

- 2) Untuk menunjukkan tingkat ekonomi masyarakat setempat. Dengan upacara sadranan warga secara tidak langsung merasa puas walaupun upacara sadranan ini menggunakan dana yang cukup besar untuk ukuran masyarakat bawah. Warga perlu bukti bahwa mereka mampu untuk menyelenggarakan agenda yang cukup besar berskala kabupaten dan menjadi aset wisata bahari Kabupaten Pekalongan.

Ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean membuka mata kita betapa besar pengaruhnya terhadap pola perilaku dan pengharapan hidup bahkan *nasib* bagi warga setempat. Namun demikian, warga menyadari nuansa islamisasi budaya *nyadran* yang semula *Hindu Sentris* menjadi *Islam Sentris* dengan bukti-bukti yang ada. Demikian juga, budaya lama terasa begitu kuat hingga tidak mudah untuk meninggalkannya.

Ritual *nyadran* Dukuh Jambean menurut analisa selain memberikan pengaruh kuat pada budaya secara makro, ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean pun mempunyai motif, dorongan dan harapan di bidang ekonomi, selain itu juga memiliki nilai-nilai edukasi yang tinggi, terlepas dari keyakinan dasar dari upacara warga terhadap ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean.

Aspek ekonomi merupakan semangat dan penggerak utama perikehidupan fisik material duniawi di mana kita bergerak bernapas hidup, oleh karenanya kekhawatiran dan kecemasan selalu menyertai manusia manakala aspek ekonomi sebagai simbol semangat dan

penggerak utama perikehidupan terganggu atau menjumpai ketidakpastian. Akumulasi dari kecemasan dan ketakutan tersebut masyarakat menyandar-kan diri dan pasrah demi pertolongan dan perlindungan dari kekuatan dan kebesaran dari luar dirinya kekuatan dan kebesaran itu mereka temukan sebagai *supranatural*. Dalam bahasa masyarakat setempat, sesuai tingkat spiritualitas mereka, kekuatan *supranatural* itu mereka sebut *Dewa, Yang Maha Kuasa, Tuhan, Kang Murbeng Dumadi*, dal lain sebagainya untuk memenuhi hajat warga setempat dan kalau perlu untuk seluruh umat manusia. Termasuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik, lahiriyah dan duniawiyah, maka dari itu warga Dukuh Jambean dengan alasan apapun tidak akan meninggalkan tradisi ini, mereka tetap akan mengadakan upacara ritual tradisi *nyadran* setiap bulan Suro menurut kalender Jawa, atau Muharram sesuai kalender Hijriyah.

Demikian juga, tradisi *nyadran* Dukuh Jambean memiliki nilai-nilai edukasi yang tinggi. Nilai-nilai edukasi tradisi *nyadran* Dukuh Jambean sungguh memberi angin segar bagi pencerahan generasi muda mendatang, khususnya generasi penerus warga Dukuh Jambean. Nilai-nilai ini akan terus terpancar dan menggema sejauh gaung seremoni ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean di kalangan masyarakat.

5. Motif Ekonomi Ritual *Nyadran*

Aspek ekonomi adalah tiang utama kehidupan, baik diri individu, sebuah ikatan keluarga, maupun interaksi dalam masyarakat bahkan negara bangsa.

Kebekuan atau ketersumbatan bidang ekonomi mampu mencabik-cabik atau meruntuhkan perikehidupan mereka semua itu. Oleh karenanya, ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean tidak lepas dari fakta, kenyataan dan realitas masyarakat atas adanya motif-motif ekonomi dari semua itu.

Motif-motif ekonomi yang dapat peneliti paparkan di sini merupakan bagian kecil yang nampak dari sebuah realitas yang besar namun tersembunyi, ibarat gunung es, yang nampak hanya puncak dari dasarnya yang kompleks.

a. Motif Ekonomi Produsen Ritual *Nyadran*

Motif ekonomi atas terselenggaranya upacara ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean dapat kami jabarkan sebagaimana bagian berikut ini. Motif ekonomi produsen menggambarkan motif-motif ekonomi yang bersandar atas nalar dan penilaian pihak produsen atau pihak yang menghasilkan barang dan atau jasa. Motif ekonomi produsen ini meliputi: pertama, motif fisiologis atau pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan misalnya makan dan minum serta penyangga hidup lainnya, kedua, motif profit atau keuntungan dan laba dari produksi yang dihasilkan, ketiga, motif *reward* atau penghargaan dan penghormatan yang diperoleh di mana mereka tinggal, keempat, motif *power* atau kekuasaan ekonomi dan/atau politik dengan menguasai pasar, kelima, motif sosial atau darma bakti pengabdian dan solidaritas terhadap sesama atas berbagai kesulitan, ketergantungan dan kekurangan sumber ekonomi akibat berbagai hal misalnya bencana,

paceklik, krisis, ataupun ketidakadilan, keenam, motif politik atau keinginan untuk berkuasa atas sebuah wilayah masyarakat yang bersangkutan sehingga tercapai sebuah otoritas.

1) Motif Fisiologis

Upacara ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean Desa Pecakaran mengisyaratkan adanya motif fisiologis. Motif fisiologis berarti keinginan yang didasarkan atas kebutuhan naluriyah biologis dan lahiriah semata, misalnya kebutuhan makan, minum, sehat, aman, hasrat seksual dan semua keinginan yang terkait duniawi. Peneliti mendapati kesimpulan dasar yang menjadi motif utama dan pertama upacara ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean adalah faktor fisiologis, pemenuhan kebutuhan jasmaniyah, di mana rasa ketakutan dan kecemasan selalu menghantui para penangkap ikan, para nelayan atau bisnis pengolah ikan, oleh karenanya semua ingin dapat ketenangan dan ketentraman dengan “memuja” kekuatan supranatural yang mereka ketahui. Simbol-simbol kekuatan supranatural yang muncul dalam upacara ritual *nyadran* Dukuh Jambean misalnya adalah Nabi Sits (a.s), Nabi Khidliir (a.s), Dewi Lanjar, Rara Santang, Pandan Sari, Adam Ma’na, Barara, Ontobogo, Badak Pasa, Dewi Sinta dan lain sebagainya.

Melalui upacara ritual tradisi *nyadran* inilah salah satu peluang untuk mendapatkan tiket agar bisa berdoa dan memohon kepada para “dewa”

atau *dayang* yang mereka yakini mampu mengatasi masalah dan menjamin kelancaran ekonomi demi kebutuhan keluarga yang mereka miliki. Secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa motif dasar dan utama upacara sadranan Dukuh Jambean adalah motif fisiologis, warga Dukuh Jambean terutama para nelayan dan pengolah ikan menginginkan adanya ketenangan dan ketenteraman batin atas kecemasan dan ketakutan yang selalu menghantui mereka sepanjang tahun, lebih dari itu mereka “meminta” agar diberikan kelancaran ekonomi, peningkatan hasil tangkapan ikan dan bertambah kesejahteraannya (Kanapi Wawancara, 2017).

2) Motif Profit

Ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean selain motif fisiologis, menurut peneliti ada indikasi motif profit, yaitu keinginan dan dorongan untuk memperoleh hasil dan/atau keuntungan, baik pribadi maupun kolektif.

Menurut analisa peneliti, bahwa upacara ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean diselenggarakan dengan pendanaan yang sangat fantastis, cukup besar untuk ukuran ritual lokal, namun dana terkumpul mencapai ratusan juta rupiah. Tahun 2016 penyelenggaraan ritual *nyadran* Dukuh Jambean tercatat menyedot pendanaan sebesar Rp217.980.000,- (Wawancara, Panitia, 2017) dengan pemasukan terbesar dari “*jimpitan*” atau iuran sebagian dari hasil tangkapan kapal ikan pada setiap bonkar

muatan, sebagian pemasukan lagi dari berbagai hal, termasuk sponsor, donatur, administrasi lomba dayung, jasa parkir dan lain-lain.

Motif profit yang berkembang dalam upacara sadranan Dukuh Jambean adalah proses jasa promosi, edukasi dan sosialisasi ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean. Popularitas ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean semakin meluas seluruh warga masyarakat Desa Pecakaran dan melebar hingga warga masyarakat sekitarnya. Hal ini karena upacara sadranan tersebut didukung dengan berbagai agenda kegiatan menarik warga masyarakat, misalnya, mulai dari lomba dayung, pagelaran wayang golek, pentas orkes hiburan, pengajian umum, sampai pada santunan sosial dan infaq ke pembangunan masjid atau musholla.

3) Motif *Reward*

Motif ketiga ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean adalah motif *reward*. Motif *reward* yaitu motif-motif yang mendorong agar mendapatkan penghargaan dan kemuliaan bahkan “pujian” dari masyarakat luas atas apa yang telah dialami dan dilakukan. Dalam ritual sadranan Dukuh Jambean peneliti mendapati motif *reward*. Motif *reward* dapat dijumpai misalnya pada lomba dayung, di mana setiap peserta lomba dayung secara otomatis ingin mendapatkan juara dan penghargaan. *Reward* atau penghargaan dari panitia penyelenggara cukup besar hingga puluhan juta rupiah.

Lebih dari itu, menurut analisa peneliti, bahwa motif *reward* atau motif penghargaan dan kemuliaan ini mendorong dan mendapati keinginan supaya memperoleh status sosial, pengakuan dari warga masyarakat dan peningkatan derajat, martabat dan harga diri dengan turut serta meramaikan upacara ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean.

4) *Motif Power*

Motif keempat yaitu motif *power*, motif *power* yaitu motif untuk melakukan serangkaian tindakan ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan ekonomi dan/atau politik pada wilayah tertentu. Dengan motif *power* ini, seseorang berusaha mencari pengaruh dan peluang untuk mendapatkan daerah “jajahan” atau ladang pasar bagi kegiatan ekonominya.

Secara tidak langsung, upacara ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean merupakan manifestasi dari keinginan untuk “menguasai” atau minimal mempertahankan lahan dan ladang pasar kegiatan ekonomi warga Dukuh Jambean terutama lahan dan ladang pasar bagi para penangkap ikan atau para pebisnis pengolah ikan, sehingga tidak serta merta bisa tergerus oleh laju arus ekonomi yang semakin berkembang. Secara tersirat warga Dukuh Jambean melalui ritual tradisi *nyadran* ini, ingin menunjukkan bahwa mereka masih eksis, dengan geliat perekonomian yang dinamis.

5) Motif Sosial Ritual *Nyadran*

Motif selanjutnya yaitu motif sosial, motif sosial yaitu motif yang melatarbelakangi seseorang untuk melaksanakan tindakan ekonomi dengan tujuan pengabdian masyarakat, solidaritas sosial dan keinginan semata-mata menolong antarsesamanya. Dengan motif sosial, seseorang yang melakukan tindakan ekonomi berdasar atas nama kemanusiaan, rasa senasib sepenang-gungan, beban orang lain merupakan beban dirinya maka dari itu ringan sama dijinjing berat sama dipikul.

Ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean sangat nyata menunjukkan jiwa kebersamaan, kerja sama dan tolong-menolong sesamanya, bahwa tiada keberhasilan seseorang tanpa keterlibatan orang lain, maka dari itu, motif sosial ini hampir merata tumbuh dan bersemi di kalangan warga Dukuh Jambean lebih-lebih saat prosesi upacara ritual tradisi *nyadran*.

Mayoritas warga Dukuh Jambean adalah nelayan, penangkap dan pengolah hasil tangkap ikan, sudah tentu merekalah yang pertama dan utama dalam membela dan mempertahankan tradisi *nyadran* Dukuh Jambean, dengan semangat sosial, kebersamaan dan kegotong-royongan warga siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Dengan kata lain, warga Dukuh Jambean dipersatukan dengan adanya upacara ritual tradisi *nyadran*, “bahagiamu adalah bahagiaku, deritamu adalah deritaku”, dengan

pepatah lain “sukamu adalah sukaku, dukamu adalah dukaku”. Inilah gambaran motif sosial yang berkembang di Dukuh Jambean. Berbagi, bersama dan bersatu untuk menggapai kehidupan yang lebih sejahtera, bermartabat, berkeadilan dan manusiawi.

b. Motif Ekonomi Konsumen Ritual *Nyadran*

Motif ekonomi konsumen yang dimaksudkan di sini adalah motif ekonomi atas dasar nalar dan pertimbangan logis pihak konsumen atau pengguna, pemakai dan penikmat dari transaksi ekonomi. Dalam ritual *nyadran* Dukuh Jambean, motif ekonomi konsumen berarti semua faktor pendorong tindakan ekonomi ritual *nyadran* dipandang dari sudut warga Dukuh Jambean sebagai pengguna, pemakai dan penikmat atas segala produk yang dihasilkan dari upacara ritual tradisi *nyadran* tersebut.

Motif ekonomi konsumen ritual *nyadran* Dukuh Jambean menurut analisa peneliti muncul beberapa motif yang alamiah, misalnya: ingin mendapatkan kepuasan optimal, ingin mendapatkan bekal untuk bertahan hidup, ingin agar dapat diterima di masyarakat, juga adanya keinginan agar mendapatkan status sosial di masyarakat. Berikut adalah analisa peneliti terhadap motif ekonomi konsumen ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean:

1) Kepuasan Optimal melalui Ritual *Nyadran*

Pertama yaitu motif ingin mendapatkan kepuasan optimal melalui ritual *nyadran*. Bagi

warga Dukuh Jambean khususnya dan warga sekitar pada umumnya, bahwa upacara ritual tradisi *nyadran* mampu memberikan rasa kepuasan batin, ketenangan dan ketenteraman bagi warga Dukuh Jambean, hal ini dibuktikan dengan daya tahan untuk tetap menyelenggarakan ritual dari generasi ke generasi, tidak ada yang mampu menghalangi. Sebaliknya, manakala belum terealisasi sebuah upacara ritual tradisi *nyadran*, maka ada semacam perasaan galau, gelisah dan gundah gulana yang menghantui seluruh warga Dukuh Jambean, sehingga yang muncul adalah rasa kecemasan dan ketakutan yang tak berkesudahan. Inilah yang mendasari alasan mengapa tradisi ini bisa bertahan hingga sekarang. Berapa pun ongkos yang harus dibayar, betapa pun beban yang harus ditanggung, yang penting adalah mendapatkan kepuasan setelah selesai prosesi ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean.

Hal yang paling mahal harganya di dunia ini adalah kepuasan, maka dari itu bagi warga Dukuh Jambean ongkos rupiah tidak jadi masalah, pengorbanan tenaga tidak menjadi soal, pengabdian yang tulus adalah tulang punggung bagi suksesnya prosesi ritual, asalkan warga Dukuh Jambean mendapati harta benda yang tak ternilai harganya yaitu kepuasan batin, rasa aman, perasaan tenang dan hati damai. Inilah simbiose mutualisme antara tradisi

nyadran dan kepuasan batin bagi warga Dukuh Jambean terlebih para nelayan dan penangkap ikan.

2) Bertahan Hidup dari Ritual *Nyadran*

Motif kedua ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean menurut analisa peneliti yaitu agar bisa bertahan hidup, dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari dan mampu menjalani perikehidupan dengan taraf ekonomi yang layak. Inilah sebuah keyakinan warga Dukuh Jambean, cita-cita dan harapan yang amat sederhana namun sangat mendasar, agar bisa bertahan hidup yang layak dan manusiawi.

Struktur sosial budaya warga Dukuh Jambean tergolong masih lemah dalam berbagai hal. Tingkat pendidikan masih rendah, tingkat ekonomi masih lemah dan pola peradaban masih terbelakang menjadikan kondisi masyarakat relatif terbelakang. Oleh karenanya, pola pikir tentang masa depan pun sederhana, mereka tidak jauh dari harapan dasar, cita-cita yang minimalis, atau memang sejauh itu memaknai hidup dan kehidupan, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, fisik, jasmaniah, lahiriah agar bertahan hidup, itulah keinginan dan harapan mereka, warga Dukuh Jambean.

3) Diterima Masyarakat melalui Ritual *Nyadran*

Motif ketiga yaitu ingin agar diterima masyarakat sebagaimana warga lainnya. Hal ini menandai bahwa dengan bergabung dalam upacara ritual tradisi *nyadran* maka baik perasaan

diri maupun pandangan warga lain tidak bermasalah, tidak dianggap penentang tradisi.

Dengan kata lain bahwa dengan berperan aktif dalam ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean maka seorang warga dukuh tersebut mempunyai motif agar dapat berinteraksi sosial secara sehat, tanpa beban psikologis, yang mana semua warga lainnya turut berpartisipasi dalam mensukseskan ritual maka dari itu keterlibatan individu dalam ritual warga mempunyai motif agar dapat diterima warga lainnya secara wajar.

4) Status Sosial Naik karena Ritual *Nyadran*

Setiap warga Dukuh Jambean yang berperan aktif dalam upacara ritual tradisi *nyadran* mempunyai poin positif dalam kacamatan warga lain. Dengan bergabung dalam euforia ritual maka status sosial seorang warga menjadi tersorot dan memang demikian layaknya bagi warga Dukuh Jambean. Status sosial diperhitungkan karena turut serta dalam pagelaran sakral ritual *nyadran* Dukuh Jambean.

Manakala seorang warga abai dalam sakralitas ritual *nyadran* maka dia secara alami akan terdegradasi dalam lingkungannya. Tidak memberikan respon positif terhadap ritual tradisi *nyadran* maka seseorang telah siap untuk menerima risiko fisik maupun psikologis yang harus ditanggung. Beban mental begitu berat jika di luar sistem yang telah berakar kokoh dan teruji dalam pasang surutnya jaman.

Tegasnya, dalam hal ini serorang warga ikut gabung dalam gegap gempita ritual *nyadran* karena ingin menaikkan status sosialnya dalam masyarakat Dukuh Jambean. Tanpa pikir panjang, bagi warga setempat langsung ambil tiket agar tidak ketinggalan “kereta” sebagaimana warga lainnya larut dalam sakralitas ritual *nyadran*.

Sebagaimana telah disebut terdahulu bahwa ritual *nyadran* Dukuh Jambean mempunyai motif ekonomi yang mendasari keinginan dan semangat dalam menjalani ritual. Sebuah tradisi yang telah mengalami pergeseran budaya yang tadinya sarat dengan nilai nilai mistis bergerak menuju kepada rekayasa ekonomi yang mampu membuat munculnya perekonomian di belakang perayaan *nyadran* itu sendiri. Meskipun sampai sekarang masih ada tuduhan -secara evolusi yang “*Hinduism sentris*” ke arah “*Islamism senter*” walau tidak seluruhnya. Hal ini memang adanya asimilasi budaya secara makro dari budaya Hindu ke budaya Islam kemudian ke ranah tradisi, yaitu secara perlahan tradisi-tradisi yang lama dan “*Hindu oriented*” kini secara perlahan namun pasti bergeser ke tradisi-tradisi baru dan “*Islamic oriented*”, misalnya tradisi upacara kenduri pasca kematian anggota keluarganya, *tingkeban*, sedekah bumi, sedekah laut, termasuk *nyadran*.

C. Penutup

Upacara ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean membukakan mata kita tentang salah satu kearifan lokal

yang dimiliki masyarakat setempat. Dukuh Jambean Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan memiliki struktur antropologi sosial budaya yang unik. Salah satu keunikannya adalah memiliki tradisi yang kokoh dan teruji dalam kurun waktu yang panjang dari generasi berganti generasi tiada henti.

Simpulan yang kami sarikan dari analisa data adalah sebagaimana berikut ini;

1. Ritual tradisi *nyadran* Dukuh Jambean merupakan kristalisasi dari tradisi lama (Hindu Buddha) yang kemudian berasimilasi dengan tradisi Islam. Struktur antropologi sosial budaya masyarakat Dukuh Jambean memberi ruang untuk melestarikan tradisi warisan nenek moyang peninggalan tradisi lama yang kemudian secara evolusi mengalami sentuha tradisi baru yaitu tradisi Islam.
2. Ritual budaya "*nyadran*" Dukuh Jambean juga didorong oleh persoalan faktor ekonomi, dan yang paling dominan bisa dilihat dari sisi fisiologis, yaitu agar terpenuhinya kebutuhan dasar fisik dan lahiriah, ekonomi keluarga.

D. Referensi

- Abimanyu, Petir. (2014). *Mistik Kejawaen: Menguak Rahasia Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Palapa.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rinaka Cipta.
- Hakim, Atang Abd. (1999). *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Hasil wawancara dengan Mbah Kanapi tanggal 27 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB di kediaman beliau Dukuh Jambean, seorang pawang dan tokoh spiritual ritual *nyadran* juga hasil wawancara dengan panitia *nyadran* dan beberapa warga Dukuh Jambean.

Hasil wawancara dengan panitia tanggal 24 Juli 2017 pukul 14.00 WIB di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dukuh Jambean Desa Pecakaran.

Laporan Panitia tentang Keuangan Pendanaan *Nyadran* tahun 2016 Dukuh Jambean.

Nugroho, Bayu Septian. (2015). Tradisi Upacara *Nyadran* di Desa Senoageng Kec. Prambon Kab. Nganjuk Tahun 1994-2014. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Keguruan UIN Jember.

Poniran. (2016). *Tradisi Nyadran dalam Masyarakat Jawa*. Diakses 8 Juli 2017 jam 09.08 WIB.
<http://masponiran.blogspot.co.id/2016/05/tradisi-nyadran-dalam-masyarakat-jawa.html>.

Tumanggor, Rusmin dkk. (2010). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Edisi III. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.

Tuti, Siti Noer Tyas. (2017). *Tradisi Nyadran sebagai Komunikasi Ritual: Studi Kasus di Desa Senoageng Kab. Nganjuk*, Diakses 24 Februari 2017. Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, <http://ameraastuti.blogspot.co.id/2015/07/tradisi-nyadran-sebagai-komunikai-ritual.html>.

Pemberdayaan Komunitas Lokal dalam Pengelolaan Bank Sampah di Desa Semampir, Batang

Drajat Setiawan

drajat.setiawan@iainpekalongan.ac.id

A. Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat kaitannya dengan kesehatan lingkungan adalah terkait dengan masalah sampah yang kurang diperhatikan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 disebutkan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Dari pengertian ini, sumber sampah bermula dari kegiatan masyarakat baik rumah tangga maupun hasil-hasil produksi. Pada umumnya, ketika berbicara mengenai persoalan sampah yang terlintas pada masyarakat bersentuhan dengan hal-hal teknis seperti keterbatasan sarana dan prasarana seperti halnya bak sampah, tempat penampungan sampah sementara, kendaraan pengangkut sampah dan lain sebagainya.

Di samping hal-hal teknis tadi juga ada aspek yang tidak kalah penting yaitu manusia dan budayanya. Budaya membuang sampah sembarangan harus mulai dikikis. Cara lama yang hanya membuang sampah sembarangan harus ditinggalkan, pembiasaan masyarakat untuk memilah dan menghargai sampah sebagai hal yang bisa dikembangkan

untuk menciptakan ekonomi kerakyatan, salah satunya melalui bank sampah (Tallei, Iskandar, Runtuwene, & Filho, 2013). Sampah seharusnya tidak lagi dianggap sebagai barang yang tidak bermanfaat sebagaimana pandangan masyarakat umum. Akan tetapi sampah seharusnya dianggap barang yang mempunyai kegunaan dan berharga. Pengelolaan sampah pada rumah tangga maupun lingkungan menjadi sebuah keharusan sebagai bentuk langkah nyata dalam memanfaatkan sampah menjadi bernilai guna. Dalam mengelola maupun mendaur ulang sampah, pengetahuan, sikap maupun keterampilan warga sangat diperlukan (Hanif Akhtar, 2014).

Dalam rangka mematuhi Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 tentang pembuangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis seperti sampah rumah tangga, pengolahan dan pengumpulan sampah, harus diimbangi dengan langkah nyata dalam pengelolaan sampah. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan penduduk setempat dalam membuang sampah rumah tangga untuk didaur ulang juga penting untuk pengelolaan sampah (Hanif Akhtar, 2014). Kemampuan warga sangat diperlukan dalam memisahkan jenis sampah rumah tangga. Sampah yang masuk ke kategori sampah organik dapat digunakan sebagai pupuk ataupun kompos, sedangkan untuk kategori sampah anorganik dapat dilakukan penyimpanan di bank sampah, sehingga nantinya bisa didaur ulang untuk mendapatkan bahan yang pada akhirnya bernilai ekonomis (Jumar, Fitriyah, & Kalalinggi, 2014).

Bank sampah pada prinsipnya sebagaimana perbankan konvensional dalam proses manajemen. Yang membedakan adalah barang yang ditabung bukan berupa uang akan tetapi berwujud sampah. Orang yang menabung pada bank

sampah juga disebut nasabah. Sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang, kemudian akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama dengan bank sampah (Astoria & Heruman, 2016).

Adanya kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup, serta rasa keprihatinan akan sampah yang semakin banyak dan tidak tekelola dengan baik, baik itu sampah yang organik maupun nonorganik. Sehingga muncullah gagasan untuk mengelola sampah-sampah tersebut menjadi bernilai guna, yakni dengan mendirikan bank sampah. Pemanfaatan dan pengelolaan sampah melalui bank sampah diharapkan mampu untuk membantu pemerintah khususnya di tingkat desa dalam menangani sampah dan mampu untuk meningkatkan ekonomi (Anih Sri Suryani, 2014). Sehingga Pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan warga dalam mengelola sampah rumah tangga untuk dilakukan daur ulang juga menjadi hal penting dalam pengelolaan sampah.

Bank sampah yang dicanangkan dan dirintis komunitas pemuda-pemudi di Desa Semampir sangat membantu dalam proses pemberdayaan warga setempat. Adanya aktivitas pengelolaan sampah khususnya pada bank sampah memunculkan peran serta masyarakat dalam melestarikan alam dan menciptakan kesehatan masyarakat, khususnya dalam meminimalisir masalah sampah. Serta masyarakat juga menjadi kreatif dan inovatif untuk mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis.

B. Pembahasan

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologi pemberdayaan berawal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan.

Berdasarkan pemaknaan bahasa tersebut, menurut Keban dan Lee pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mendapatkan kekuatan/kemampuan atau daya dan proses pemberian daya kepada pihak yang belum memiliki daya dari yang memiliki daya (Mulyono, 2008). Lebih mendalam lagi menurut Camber dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi lokal tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar (Noor, 2011). Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah warga yang mengikuti kegiatan program bank sampah di Desa Semampir Kecamatan Reban. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan adanya kesadaran dan kemampuan dalam pengelolaan maupun pemanfaatan sampah baik organik maupun nonorganik.

Pemberdayaan masyarakat di samping sebagai pemberian daya juga tidak kalah penting adalah proses dalam pemberian pendidikan. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses dalam meningkatkan kemampuan pada kelompok maupun perorangan untuk memahami dan mengontrol baik kekuatan sosial, politik maupun ekonomi dalam kedudukannya di tengah masyarakat (Mulyono, 2008). Pemberdayaan juga dimaknai sebagai usaha pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan keinginan maupun kesadaran guna mendapatkan *knowledges*, *skill* maupun *abilities*, sehingga mampu untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Subekti, Setianti, & Hafiar, 2018).

Tujuan pemberdayaan masyarakat seharusnya ada usaha untuk melakukan perbaikan. Sebagaimana

menurut Mardikanto dan Soebianto beberapa usaha perbaikan tersebut yaitu (Mardikanto, T., & Soebianto, 2017): (a) Perbaikan pendidikan, maksudnya adalah dengan pemberdayaan tersebut mampu menumbuhkan semangat belajar hingga akhir hayat. (b) Perbaikan aksesibilitas, hal ini utamanya adalah sumber inovasi maupun informasi, sumber pembiayaan maupun sumber penyedia produk dan pemasaran. (c) Perbaikan tindakan, perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik. (d) Perbaikan kelembagaan, dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha. (e) Perbaikan usaha, berupa perbaikan pendidikan (semangat belajar) pada perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki segala bentuk usaha yang dilakukan. (f) Perbaikan pendapatan, adanya sebuah bisnis yang dilakukan maka terdapat harapan dalam memperbaiki pendapatan yang diperolehnya. Termasuk pendapatan individu keluarga dan masuk lebih besar lagi untuk masyarakat. (g) Perbaikan lingkungan, perbaikan lingkungan berupa perbaikan pendapatan yang diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. (h) Perbaikan kehidupan, perbaikan pada tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik, maka harapan untuk dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat semakin

besar. (i) Perbaikan masyarakat, dengan dukungan lingkungan baik fisik maupun social yang semakin baik, diharapkan akan tercapai pula kehidupan masyarakat yang semakin membaik.

Berdasarkan pendapat tersebut, secara garis besar dapat ditarik garis lurus bahwa tujuan pemberdayaan adalah supaya individu masyarakat mampu menjadi mandiri dengan segala potensi yang dimiliki dengan melalui pelatihan, pembelajaran maupun kegiatan pemberdayaan lain.

2. Tahap-tahap Pemberdayaan

Menurut Mulyono (Mulyono, 2008) Individu Masyarakat akan mampu untuk mandiri, terlebih dahulu melalui tahapan berikut: 1) Tahap penyadaran dan pembedaan perilaku. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan. Pada tahap ini untuk menyentuh keinginan dan kesadaran masyarakat untuk berubah keadaan yang lebih baik. Pada tahap ini diperlukan seorang fasilitator ataupun pendamping untuk bertukar gagasan, pengetahuan ataupun pengalaman. Serta untuk memberi masukan dan arahan yang positif. 2) Tahap transformasi pengetahuan, masyarakat yang telah terbuka kesadaran terkait keadaan dan kondisinya serta ingin untuk berubah menjadi lebih baik, akan belajar tentang pengetahuan dan kecakapan hidup. Belajar tentang kecakapan hidup yang sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki. Kondisi tersebut akan mendorong terjadinya keterbukaan wawasan dan penguasaan kecakapan-keterampilan dasar yang mereka butuhkan. 3) Tahap

peningkatan kemampuan dan inovatif, pada tahap ini diperlukan pengayaan maupun peningkatan kualitas yang dibutuhkan sehingga kemampuan kemandirian terbentuk. Kemandirian akan tercipta dengan ditandainya kemampuan masyarakat untuk berinovatif, berkreasi dan melakukan pembangunan. Sebagaimana menurut (Djara, J., Raharjo, T., & Suminar, 2019) yang diungkapkan bahwa:

“After aware of capabilities and potentials have been the around, and on the insight ability in knowledge, skill and attitude that open insight and impart skills the base soas to can take in the in development and having initiative and innovative ability to deliver independency activities.”

3. Bank Sampah: Sebuah Tinjauan

Istilah bank sampah terdiri dari dua kata. Bank adalah sebuah lembaga perantara yang berfungsi sebagai tempat menabung dan meminjamkan uang dan juga transaksi keuangan. Limbah didefinisikan karena semua bahan yang tidak diinginkan atau tidak dapat digunakan, yang biasanya dibuang oleh pemiliknya (Pinheiro, 2015). Bank sampah adalah perantara lembaga untuk mengubah sampah menjadi uang tunai. Bank Sampah adalah kampanye untuk mengatasi masalah sampah dengan membeli kembali dan menghemat uang dari limbah dengan benar di sistem perbankan (Pariatamby dan Tanaka, 2014). Model pengelolaan bank sampah hampir sama dengan bank umum di mana terdapat nasabah, pembukuan dan pengelolaannya, di bank umum, nasabah menyetor uang tapi di bank

sampah simpanan nasabah mubazir yang memiliki nilai ekonomis, sedangkan pengelola bank sampah membutuhkan kreatif dan inovatif, serta memiliki jiwa wirausaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Sistem kerja bank sampah berbasis pada rumah tangga, dengan memberikan *reward* kepada orang yang berhasil memilah dan menyimpan limbahnya.

Bank sampah merupakan sistem dalam pengelolaan sampah yang bernilai guna dan bersifat kering sertan dikelola secara bersama (kolektif) untuk mendorong masyarakat supaya berperan serta di dalamnya. Sistem yang digunakan dalam pengelolaan bank sampah adalah menampung, memilah dan menyalurkan sampah yang bernilai ekonomis pada pasar tertentu atau pengepul sehingga masyarakat akan memperoleh keuntungan ekonomi dari proses dalam menabung sampah (Astheria & Heruman, 2016). Implementasi dari kegiatan bank sampah pada prinsipnya dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat. Bank sampah dalam operasionalnya juga memiliki sistem manajerial yang dilakukan oleh masyarakat selayaknya bank konvensional pada umumnya (Utami, 2013). Dalam menentukan pengelola bank sampah, masyarakat membuat dan menentukan sendiri melalui forum musyawarah yang sifatnya bisa formal maupun nonformal dari lingkungan masyarakat.

4. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Pendekatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat didasarkan pada: konsep koperasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membuat perubahan

dalam pengelolaan sampah komunal, dari segi sumber pemisahan, pemulihan bahan yang dapat didaur ulang, dan penyimpanan sebelum dikumpulkan. Melalui pendekatan ini, sebuah komunitas masyarakat dapat menciptakan rasa memiliki dan melibatkan semua anggota dari masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam banyak projek, komunitas telah dibentuk organisasi dalam bentuk koperasi. (Anih Sri Suryani, 2014) mendefinisikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai pendekatan pengelolaan sampah yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Pemerintah dan lembaga lainnya hanya sebagai motivator dan fasilitator. Douglas dkk. (1994) menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan memerlukan fasilitasi dan pelaksanaan upaya berbasis masyarakat sebagai strategi untuk memberdayakan dan meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya lingkungan penting, terutama tanah, infrastruktur, dan jasa. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat penting karena kegiatan tersebut dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri. Mereka membuat keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri. Itu akan lebih efektif jika disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas lokal serta kapasitasnya (Anih Sri Suryani, 2014).

Klasifikasi Sampah. Secara umum sampah terbagi menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah nonorganik. Sampah yang mudah untuk terurai secara alamiah dan sampah yang tidak dapat terurai atau sering disebut sampah rumah tangga (Linda, 2016). Sampah organik merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat diurai oleh mikroba. Sampah

jenis ini mudah terurai dalam proses alami. Pada sampah rumah tangga sebagian besar bersifat organik (Sugeng Riyadi, 2015) sebagai contoh adalah sisa makan, buah maupun sayuran. Selanjutnya sampah nonorganik merupakan sampah yang muncul akibat adanya bahan-bahan nonhayati. Contohnya adalah logam, barang pecah belah dan lain sebagainya. Sebagian besar sampah nonorganik tidak dapat terurai oleh mikroorganisme.

5. Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah

Manajemen pengelolaan sampah memiliki tujuan yang dibagi menjadi lima aspek: (1) aspek lingkungan, yakni membantu pemerintah dalam mengurangi volume sampah; (2) aspek sosial, yakni munculnya rasa kepedulian dan kerja sama dari masyarakat untuk membentuk bank sampah desa agar lingkungannya bersih dan sejuk; (3) aspek pendidikan, masyarakat yang menjadi anggota bank sampah akan tahu bahayanya sampah yang tidak diolah dan bagaimana manfaat dari hasil pengelolaan sampah; (4) aspek pemberdayaan, bahwa ada pemberdayaan di semua elemen keluarga tingkat (ayah/ibu, anak) mencapai tingkat RT/RW; (5) aspek ekonomi, pemanfaatan sampah yaitu mampu menghasilkan keuntungan secara ekonomi.

Penanganan pada pengolahan sumber sampah memiliki konsep tersendiri, di mana perilaku penanganan disesuaikan pada jenis dan karakteristik sampah. Pada konsep bank sampah berbeda pada penanganan sampah yang lain seperti konsep pengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik. Bank sampah menggunakan konsep penanganan

pendekatan konsep 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). Konsep 3R tersebut dilakukan dengan cara mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah (*reduce*), menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan kembali (*reuse*) dan mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang dan produk baru yang bermanfaat (*recycle*) (Shentika, 2016) yakni: (1) *Reduce* (Pengurangan), *Reduce* yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, contohnya ketika belanja membawa kantong/keranjang dari rumah, mengurangi kemasan yang tidak perlu, menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang, misalnya bungkus nasi menggunakan daun pisang atau daun jati. (2) *Reuse* (Penggunaan Kembali), *Reuse* adalah kegiatan penggunaan kembali sampah yang masing dapat digunakan baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain, contohnya berupa botol bekas minuman dirubah fungsi jadi tempat minyak goreng, ban bekas, dimodifikasi jadi kursi dan pot bunga. (3) *Recycle* (Daur Ulang), *Recycle* adalah salah satu dari bagian konsep 3R di mana kegiatannya yaitu mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah salah satu rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Melalui bank sampah, ditemukan satu solusi inovatif untuk 'memaksa' masyarakat memilah sampah. Dengan menyamakan sampah serupa uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilainya sehingga mereka mau memilah sampah.

Warga yang menabung (menyerahkan sampah) juga disebut nasabah dan memiliki buku tabungan serta dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang, kemudian akan dijual di pabrik atau perusahaan pemanfaatan sampah lain yang sudah bekerja sama dengan bank sampah.

6. Mekanisme Sistem Bank Sampah

Proses pelaksanaan pada kegiatan bank sampah mempunyai mekanisme yang agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan bank konvensional pada umumnya meskipun proseduralnya pada umumnya sama. Sebagaimana menurut utami (Utami, 2013) mekanisme pada sistem bank sampah minimal meliputi kegiatan berikut: Pertama, pemilahan sampah. Masyarakat peserta bank sampah terlebih dahulu memilah sampah-sampah yang mau disetorkan ke bank sampah. Antara sampah yang organik dan anorganik dipisah. Pengelompokan ini untuk memudahkan nantinya dalam penyaluran sampah. Yakni penyaluran sampah ke tempat yang bisa untuk dibuat kompos atau untuk didaur ulang ke *home industry* rumah tangga seperti plastik dan atom. Dengan sistem bank sampah, masyarakat secara tidak langsung juga ikut serta membantu mengurangi tumpukan sampah di tempat-tempat pembuangan akhir. Karena, sebagian besar sampah yang sebelumnya langsung ke pembuangan akhir telah dikurangi dengan pemilahan yang dilakukan masyarakat dan dikirimkan ke bank sampah akan

dimanfaatkan kembali. Sehingga sampah yang masuk ke pembuangan akhir benar-benar tinggal sampah yang memang tidak memiliki nilai ekonomis dan berbahaya. Kedua, penyetoran sampah ke bank, proses penyetoran ini dilakukan sesuai jadwal yang dibuat dari pihak pengelola bank sampah ataupun sesuai kesepakatan dengan warga. Misalnya dilakukan seminggu sekali atau dua kali, misalnya di hari Minggu. Supaya jadwal warga yang setor sampah bisa berbarengan dengan pengambilan oleh pihak pengepul. Sehingga sampah-sampah tidak banyak tertimbun di lokasi bank sampah. Ketiga, Penimbangan, sebelum dimasukkan bank sampah maka, sampah-sampah yang disetor warga ditimbang terlebih dahulu. Minimal berat sampah sebelumnya sudah disepakati bersama atau sudah diatur oleh pengelola bank sampah. Misalkan sampah yang disetor minimal beratnya 5 kg. Keempat, pencatatan, sampah yang sudah ditimbang dan diklasifikasikan selanjutnya dicatat oleh petugas sampah berat maupun jenis sampahnya. Kemudian hasil pencatatan tersebut dikonversikan ke dalam bentuk rupiah yang dicatat di buku tabungan sampah. Tabungan bank sampah bisa dimodifikasi menjadi beberapa jenis, yaitu tabungan hari raya, tabungan pendidikan dan tabungan yang sifatnya sosial tergantung pada jenis tabungan program yang tersedia dari pengelola bank sampah. Keempat, pengangkutan, pada tahap ini sampah-sampah yang ada di bank sampah setelah diklasifikasikan dan dicatat beratnya selanjutnya diangkut ke tempat pengepul sampah yang sebelumnya sudah kerja sama dengan pengelola bank sampah. Bisa juga pihak pengepul yang

mendatangi ke bank sampah untuk mengangkut sampah-sampah tersebut. Hal ini bisa dilakukan keduanya sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak pengelola bank sampah dengan pihak pengepul.

7. Pengelolaan Sampah pada “Bank Sampah Kusuma Bangsa”

Desa Semampir Kabupaten Batang merupakan salah satu desa yang memiliki penduduk total sebanyak kurang lebih 3444 orang. Dengan fasilitas meliputi sekolahan ada 3, posyandu ada 1 masjid 1 dan mushola ada 12. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan disebabkan karena sebagian besar wilayah berupa pedesaan, sering kali menjadikan pola berpikir masyarakat terhadap sampah masih tradisional. Masyarakat pedesaan masih cenderung menimbun sampah organik dan sampah anorganik di satu tempat yang sama dan bahkan masih sering membakar sampah yang berakibat pada polusi udara. Menyadari hal tersebut, maka komunitas pemuda dan pemudi dalam hal ini IPNU/IPPNU bersama dengan mahasiswa IAIN Pekalongan Desa Semampir Reban Kabupaten Batang berupaya untuk merintis pendirian bank sampah di desa tersebut. Perintisan bank sampah tersebut diawali dengan adanya kegiatan pemberdayaan yang menfokuskan salah satunya pada program bank sampah. Selanjutnya bank sampah yang sebelumnya sudah dirancang diresmikan oleh Pak Lurah di Balai Desa Semampir Kecamatan Reban dengan diberi nama Bank Sampah Kusuma Bangsa. Pada peresmian bank sampah ini juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme

bagaimana dalam pengelolaan bank sampah. Selain itu juga untuk mensosialisasikan mengenai bagaimana cara pemilahan sampah rumah tangga dan apa saja yang bisa disetorkan pada bank kusuma bangsa. Pada praktiknya, teknis pengumpulan sampah bisa dilakukan dengan menyetorkan sampah sendiri secara langsung ke tempat bank sampah atau bisa juga dengan jemput bola ketempat warga. Kegiatan bank sampah ini dilakukan seminggu sekali yakni pada hari Minggu dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00. Berhubung masih tahap rintisan maka pelaksanaan pengelolaan bank sampah bersama anak IPNU dan IPPNU diawali dengan cara menjemput bola, yakni mengambil dahulu sampah-sampah dari masyarakat lalu menimbang hasil sampah tersebut. Kemudian dibawa ke bank sampah kusuma bangsa, setelah terkumpul cukup banyak sampah, pihak pengelola bank sampah kusuma bangsa mendatangi pihak pengepul untuk kerja sama terhadap hasil sampah yang sudah dikumpulkan tersebut.

Masalah lingkungan menjadi salah satu yang sering dibicarakan dalam berbagai kajian di masyarakat. Lingkungan yang bermasalah bisa disebabkan dari beberapa faktor baik akibat dari alam itu sendiri maupun bersumber dari manusianya itu sendiri. Sampah menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling banyak diresahkan dewasa ini, di mana orang semakin hari semakin banyak memproduksi sampah sedangkan lahan untuk bisa menampung sampah sendiri semakin sempit. Pola hidup masyarakat yang membuang sampah sembarangan menjadi ancaman tersendiri yang

menunjukkan kesadaran sikap yang rendah dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Masalah selanjutnya adalah masalah ekonomi, di mana setiap masyarakat memiliki kebutuhan hidup masing-masing. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masyarakat sudah seharusnya dimiliki oleh tiap-tiap orang. Akan tetapi, kemampuan tersebut belum bisa dikatakan secara menyeluruh dimiliki masyarakat. Berbagai kalangan masyarakat masih belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga inilah yang sering dikatakan dengan kemiskinan.

Berdasarkan pada kedua masalah tersebut yaitu masalah lingkungan yang berupa sampah dan masalah ekonomi yang berupa kemiskinan perlu untuk dicarikan solusi. Jalan solusi tersebut salah satunya adalah melalui program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat akan membantu masyarakat agar bisa untuk mandiri terhadap masalah yang dihadapinya.

Bank sampah merupakan alternatif pemberdayaan masyarakat yang cocok di mana fungsinya selain pada menjaga lingkungan bersih dan sehat, tetapi juga memiliki dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Bank sampah melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan pemberdayaan harus dilakukan melalui program-program layanan.

C. Penutup

Program pemberdayaan bank sampah ini dibuat untuk mengurangi sampah yang menumpuk di lingkungan masyarakat, sekaligus mengurangi polusi udara akibat

pembakaran sampah yang dilakukan di masing-masing keluarga. Selain itu juga untuk menumbuhkan jiwa wirausaha bagi warga Desa Semampir. Masyarakat antusias dengan adanya program bank sampah, sehingga turut terlibat dan berpartisipasi dalam menabung sampah rumah tangga seperti (plastik, botol, kertas, besi dan lain sebagainya) di bank sampah kusuma bangsa yang terletak di rumah rekan Rizqi (Anggota IPNU) bekerja sama dengan anggota IPNU/IPPNU Desa Semampir sebagai roda penggerak jalannya Bank Sampah di Desa Semampir. Manfaat adanya program Bank Sampah Kusuma Bangsa adalah menjadikan sampah menjadi nilai guna ekonomis serta menjaga lingkungan dari polusi udara akibat pembakaran sampah rumah tangga dan mengajarkan kewirausahaan kepada pemuda. Dampak jangka panjang adanya Bank Sampah Kusuma Bangsa yaitu pembuatan koperasi desa di mana hasil keuangan dari bank sampah dapat dimanfaatkan untuk perputaran perekonomian Desa Semampir.

D. Daftar Pustaka

- Anih Sri Suryani. (2014). Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014, 5, 71-84. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/447/344>.
- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank Sampah sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(1), 136.
- Djara, J., Raharjo, T., & Suminar, T. (2019). Community Empowerment Through Weaving Bond Training in The

- Family Planing Village Program (Case Studi at Desa Taraf Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur). *Journal of Nonformal Education*, ISSN. 2528-4541.
- Hanif Akhtar, dan H. P. S. (2014). Peran Sikap dalam Memediasi Pengaruh Pengetahuan terhadap Perilaku Minimisasi Sampah pada Masyarakat Terban, Yogyakarta (The Role of Attitude to Mediate The Effect of Knowledge on People's Waste Minimization Behaviour in Terban, Yogyakarta). *Journal of People and Environment*, 21(3), 386-392.
- Jumar, Fitriyah, N., & Kalalinggi, R. (2014). Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, 2(1), 101-112.
- Linda, R. (2016). Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola kerja sama dalam bank sampah, dan b. *Jurnal Al-Iqtishad*, 1, 1-19.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyono, S. E. (2008). Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Jalur Pendidikan Non Formal di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. *Edukasi*, 14(1), 1-10.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87-99.
- Shentika, P. A. (2016). Pengelolaan Bank Sampah di Kota Probolinggo. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(1), 92-100.
<https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p092>.

- Subekti, P., Setianti, Y., & Hafiar, H. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup di Desa Margalaksana Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kawistara*, 8(2), 148. <https://doi.org/10.22146/kawistara.30379>.
- Sugeng Riyadi. (2015). Reiventing Bank Sampah: Optimalisasi Nilai Ekonomis Limbah Berbasis Pengelolaan Komunal Terintegrasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 205–215.
- Tallei, T. E., Iskandar, J., Runtuwene, S., & Filho, W. L. (2013). Local Community-based Initiatives of Waste Management Activities on Bunaken Island in North Sulawesi, Indonesia. *Research Journal of Environmental and Earth Sciences*, 5(12), 737–743. <https://doi.org/10.19026/rjees.5.5730>.
- Utami, E. (2013). *Buku Panduan-Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*. Jakarta: Yayasan Unilever.





EKONOMI DAN KEARIFAN LOKAL “ PETANGLONG ”

Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan (Petanglong) merepresentasikan wilayah pesisir di Pulau Jawa yang roda perekonomiannya bergerak sangat dinamis. Dinamika ini tidak saja karena kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, namun juga upaya mereka untuk terus mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang dianut selama ini.

Buku ini merupakan potret aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat “Petanglong” yang dikupas dan dikaitkan dengan kearifan lokal.